

Satu Dekade Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia:

Analisis Tender 2011-2020 & Pemanfaatan Opendender.net oleh Publik

Indonesia Corruption Watch
November 2021





Diterbitkan oleh

Indonesia Corruption Watch
30 November 2021

Tim Peneliti

Christian Evert Tuturoong
Desiana Samosir
Siti Juliantari Rachman

Asisten Peneliti

Muhammad Rifqi Jundullah
Mohammad Ammar Alwandi

Penelaah

Adnan Topan Husodo

Penelitian ini dapat terlaksana dengan dukungan dari Open Contracting Partnership. Untuk pertanyaan/umpan balik tentang penelitian ini, silakan hubungi kami di icw@antikorupsi.org

Daftar Isi

Akronim / Daftar Singkatan	8	2. BAB	BAB
Ringkasan Eksekutif	16	2.1	Gambaran Umum
1. BAB		2.2	
Pendahuluan		2.3	
1.1 Latar Belakang	26	2.1 Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	38
1.2 Rumusan Masalah	27	2.2 Opentender.net	52
1.3 Tujuan Penelitian	27	2.3 Indikator Penilaian Kuantitatif	54
1.4 Jangka Waktu Penelitian	28		
1.5 Metode Penelitian	28	3. BAB	
1.6 Tahapan Penelitian	28	Analisis	
1.7 Ruang Lingkup Penelitian dan Limitasi	30	3.1 Gambaran Umum	64
1.8 Teknis Analisis Data	33	3.2 Kompetisi dan Kesempatan pasar	66
1.9 Validasi dan Triangulasi	34	3.2.1 Konsentrasi Pasar	66
1.10 Sistematika Penulisan	35	3.2.2 Top 10 Penyedia	70
		3.2.3 Persentase Jumlah Kontrak yang Diberikan kepada Top 10 Penyedia	77
		3.2.4 Jumlah Penyedia yang Baru Pertama Kali Memenangkan Kontrak (Penyedia Baru)	80
		3.2.5 Perbandingan antara Penyedia Baru dengan Seluruh Penyedia	83
		3.2.6 Persentase Pertumbuhan Penyedia Baru di setiap K/L/PD	87
		3.3 Efisiensi Internal	90
		3.3.1 Persentase Jumlah Tender Gagal	90
		3.3.2 Durasi antara Tanggal Pengumuman Tender dan Tanggal Penetapan Pemenang (Durasi Tender)	94

3.4 Nilai Manfaat Uang	98
3.4.1 Persentase Nilai Kontrak di atas Nilai HPS	98
3.4.2 Persentase Nilai Kontrak di bawah Nilai HPS (Penghematan)	100
3.5 Integritas Publik	103
3.5.1 Persentase Jumlah Tender dengan RUP	103
3.5.2 Persentase Jumlah Tender dengan Judul di bawah 20 Karakter	106
3.5.3 Persentase Jumlah Tender dengan Keterangan Deskripsi Kurang dari 60 Karakter	108
3.5.4 Persentase Jumlah Tender Tanpa Informasi Jenis Pengadaan	111
3.6 Red Flag	117
3.6.1 Pengadaan dengan Nilai Kontrak Tertinggi	117
3.6.2 Pengadaan di Kuartal ke-Empat	119
3.7. Opentender sebagai Platform Data dan Informasi serta Dampak Pelibatan Pengguna Data	122
3.7.1 Dampak Pelibatan Pengguna Data	122
Akademisi	123
Jurnalis	127
Organisasi Masyarakat Sipil	133
APIP - Aparat Pengawas Internal Pemerintah	142
3.7.2 Opentender sebagai Platform Data dan Informasi	147
Fitur Populer dan Tidak Populer	147
Analisis Pengunjung Opentender	148
Jangkauan Opentender	151

4. BAB Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1 Kesimpulan	156
4.2 Rekomendasi	163

Lampiran dan Daftar Pustaka 170

Daftar Pertanyaan	170
-------------------	-----

Referensi	176
Kebijakan	176
Publikasi Lembaga	177
Artikel Online	178
Skripsi	178
Situs	178
Berita Online	179

Akronim / Daftar Singkatan

AJI	Aliansi Jurnalis Independen
ANRI	Arsip Nasional Republik Indonesia
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
API	<i>Application Programming Interface</i>
APIP	Aparat Pengawas Internal Pemerintah
BA-BUN	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BLP	Biro Layanan Pengadaan
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPK	Badan Pengawas Keuangan
BPFK	Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPS	Badan Pusat Statistik
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
COVID-19	<i>Coronavirus Disease 2019</i>
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DPA	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DKI	Daerah Khusus Ibukota
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>

HHI	Herfindahl-Hirschman Index
HPS	Harga Perkiraan Sendiri
IAIN	Institut Agama Islam Negeri
ICW	Indonesia Corruption Watch
IDFoS	Institute for Development of Society, Bojonegoro
IDEA Yogyakarta	Perkumpulan Ide dan Analitika Indonesia, Yogyakarta
INKINDO	Ikatan Nasional Konsultan Indonesia
JV	Joint Venture
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KemenPPN/ Bappenas RI	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
Kemensos RI	Kementerian Sosial Republik Indonesia
Kemendikbud RI	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Kemenkes RI	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
KemenPUPR RI	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
KemenkumHAM	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KJI	Klub Jurnalis Investigasi
KPK RI	Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
K/L/D/I	Kementerian/Lembaga/Daerah/ Institusi Lainnya
K/L/PD	Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
KPK RI	Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
LKPP	Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
LPSE	Layanan Pengadaan Secara Elektronik
MONEV TEPRA	Monitoring dan Evaluasi Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
PBJ	Pengadaan Barang dan Jasa

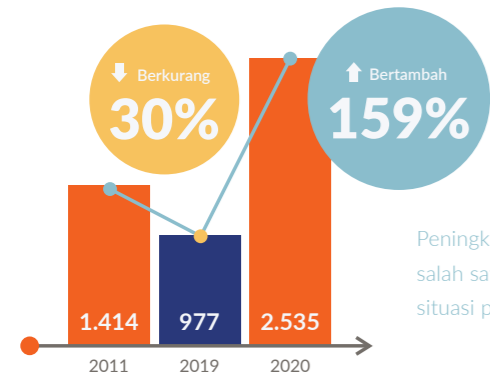
PFA	Potential Fraud Analysis
PHLN	Pinjaman Hibah Luar Negeri
PJU	Penerangan Jalan Umum
PKL	Pedagang Kaki Lima
PKS	Pelatihan Kantor Sendiri
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PUSJAGA	Pusat Belajar Anggaran
PUSPAHAM	Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia
RUP	Rencana Umum Pengadaan
SAKTI	Sekolah Anti Korupsi
SBU	Sertifikat Badan Usaha
SIKaP	Sistem Informasi Kinerja Penyedia
SNI	Standar Nasional Indonesia
SiRUP	Sistem rencana umum pengadaan
SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPPBJ	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
SPSE	Sistem Pengadaan Secara Elektronik
SRBGC	Sino Road and Bridge Group Corporation
ULP	Unit Layanan Pengadaan
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
UKPBJ	Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menenga
YASMIB	Yayasan Swadaya Mitra Bangsa, Makassar
YSNM	Yayasan Suara Nurani Minaesa, Manado



Analisis Data Tender 2011 - 2020 Tingkat Nasional

Kompetisi dan Kesempatan Pasar

Penurunan **tingkat konsentrasi pasar** dalam proses tender.



Peningkatan pada 2020 salah satunya dipengaruhi situasi pandemi Covid-19.

Top 10 penyedia, masih didominasi oleh BUMN

tahun pengadaan 2011-2020

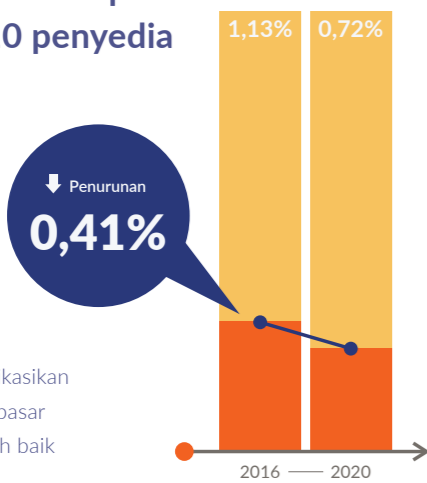


3 dari 10 perusahaan yang paling banyak mendapatkan pengadaan berasal dari BUMN yaitu PT Telekomunikasi Indonesia, PT Rajawali Nusindo, dan PT Indofarma Global Medika



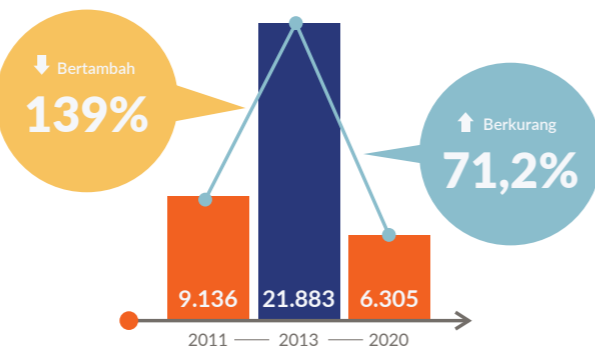
9 dari 10 tender dengan jumlah nilai kontrak paling banyak juga dimenangkan oleh BUMN, dan **1 BUMD** di DKI Jakarta

Jumlah kontrak yang diberikan kepada **Top 10 penyedia**



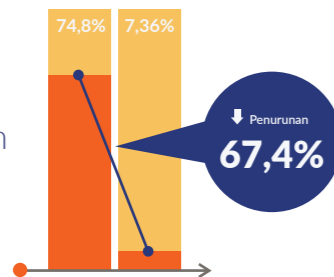
Hal ini mengindikasikan peluang pasar yang lebih baik

Pada 3 tahun pertama (2011-2013) terdapat tren peningkatan baik di tingkat nasional dan subnasional untuk **Jumlah Penyedia Baru yang memenangkan tender**

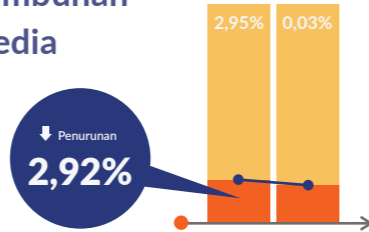


Setelah tahun 2013 hingga 2020, tren tersebut mengalami penurunan.

Persentase Penyedia Baru dengan Seluruh Penyedia

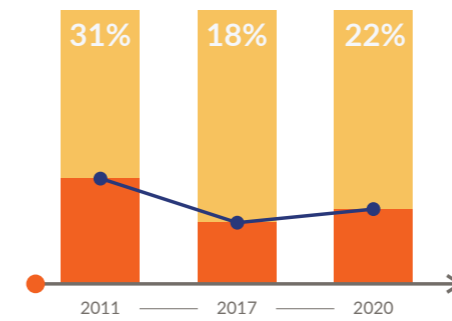


Pertumbuhan penyedia baru

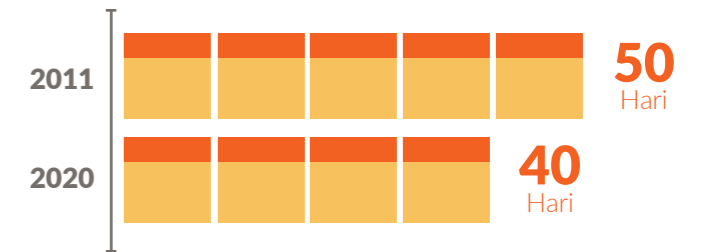


Efisiensi Internal

Persentase tender gagal

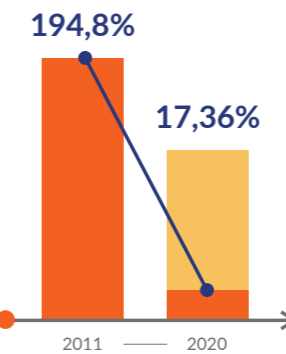


Durasi tender, terdapat peningkatan efisiensi dimana tender mengalami proses yang lebih cepat

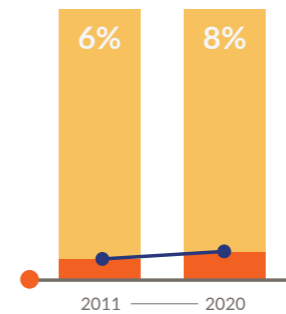


Nilai Manfaat Uang

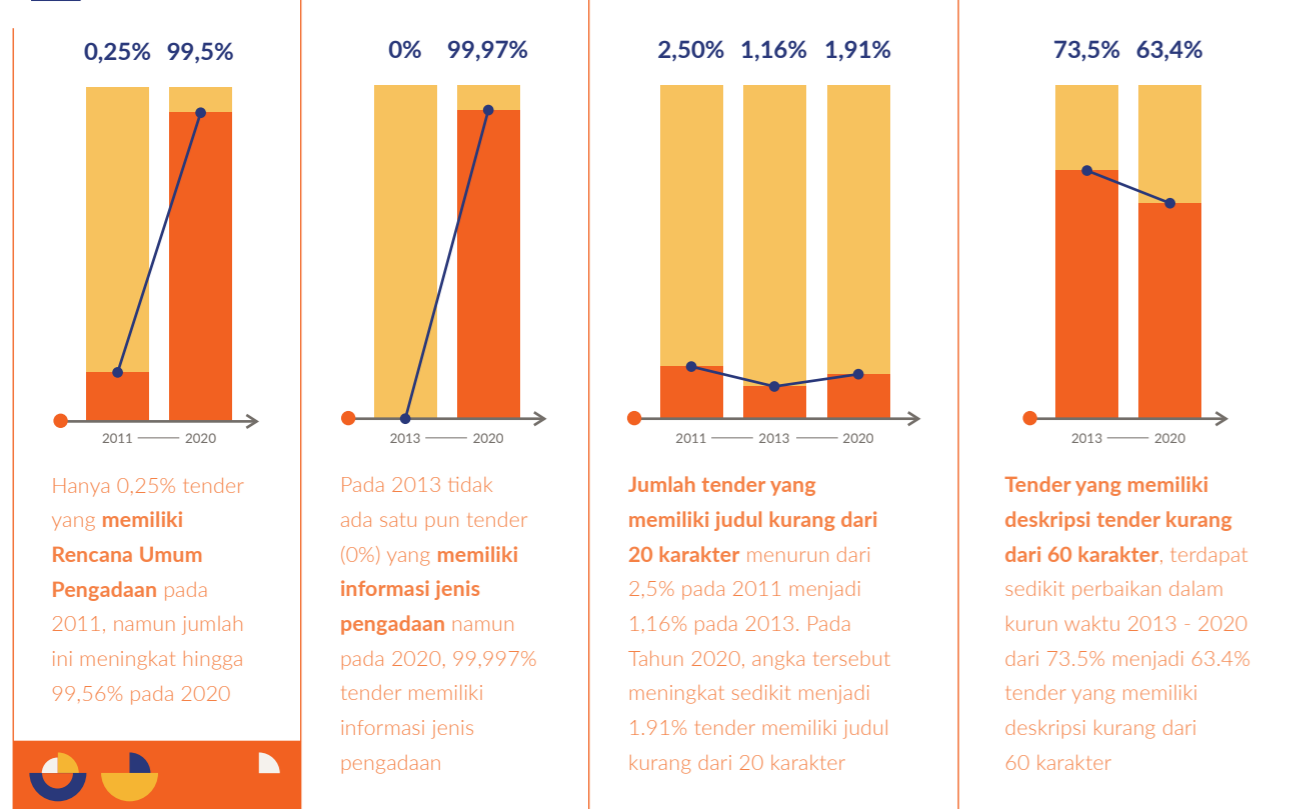
Rata - rata persentase nilai kontrak yang **melebihi HPS**



Rata - rata persentase nilai kontrak **dibawah HPS**



Integritas Publik



Red Flag

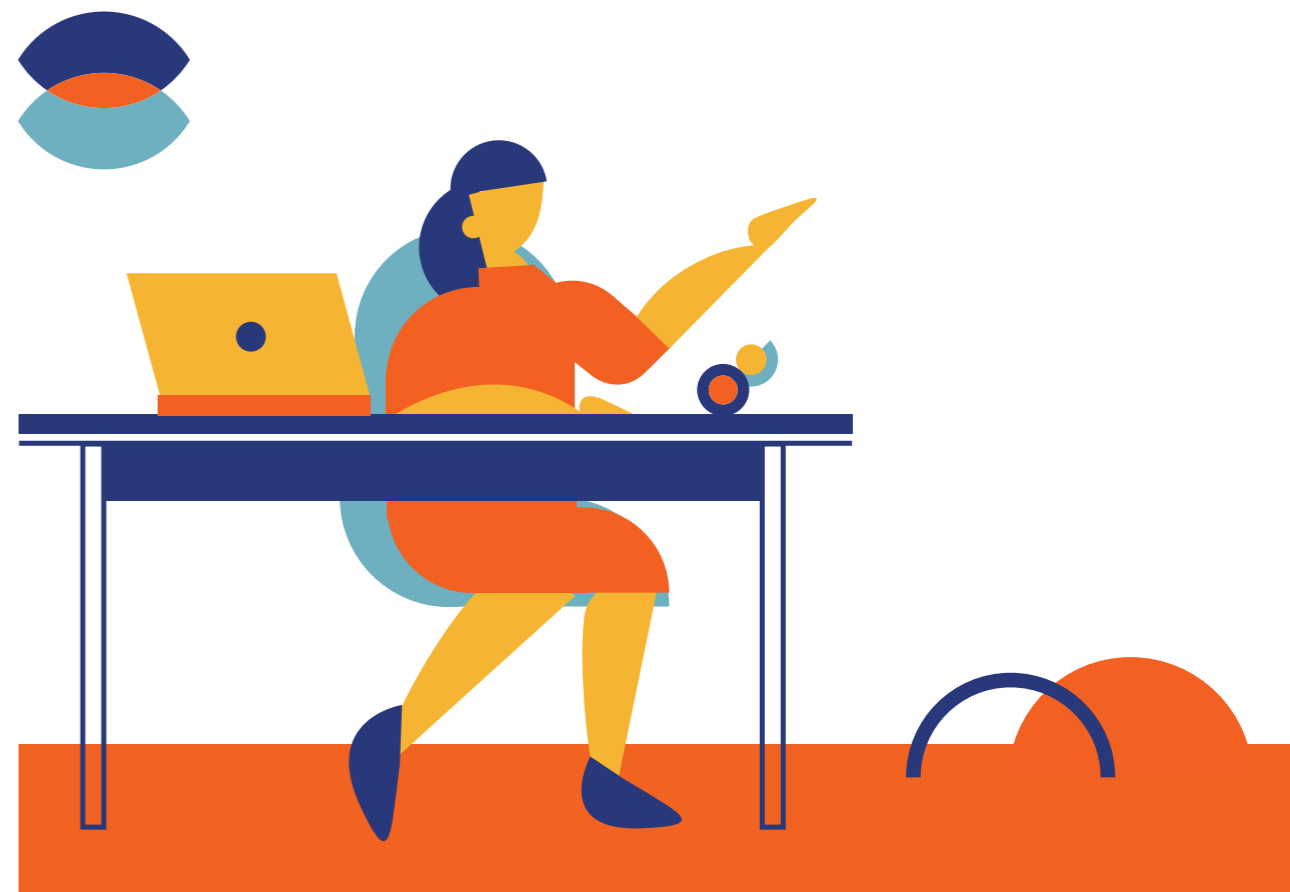


Ducid et lam est in rest quam vendam atem. Nequi ut liquae min nos invenim incturi oreptatur sin nestibus duntistium

Pemanfaatan Data Opentender

Pemanfaatan Data Opentender

<p>Akademisi Opentender sebagai bahan ajar dan bahan penelitian</p>	<p>Jurnalis Opentender untuk menggali ide bahan liputan dan menjadikannya sebagai titik awal dalam liputan investigasi</p>
<p>Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Opentender sebagai bahan peningkatan kapasitas internal dan jaringan, bahan advokasi dalam proses pemantauan layanan publik serta bagian dari kolaborasi multipihak termasuk dengan jurnalis, pemerintah dan universitas</p>	<p>Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Opentender sebagai bahan referensi materi post audit dan probity audit untuk meningkatkan efektifitas dalam mengidentifikasi pekerjaan PBJ yang hendak diaudit.</p>



Ringkasan Eksekutif

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2016, 2017, 2018, dan 2019 rata – rata 40% kasus korupsi di Indonesia setiap tahun terkait dengan pengadaan barang dan jasa (PBJ). Bahkan pada 2019 jumlahnya mencapai 64%.

Sebagai bagian dari upaya advokasi untuk terus memperbaiki implementasi pengawasan publik dan keterbukaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) di Indonesia, ICW melakukan analisa terhadap 10 tahun data tender (2011-2020) yang bersumber dari 679 sistem pengadaan elektronik di tingkat pusat maupun daerah yang dihimpun melalui Opentender.net.

Laporan ini menyajikan data tren/pola pengadaan pemerintah yang dikaitkan dengan aspek-aspek kompetisi, efisiensi, partisipasi, dan integritas, serta melihat kemanfaatan dari data pengadaan yang telah dibuka dan digunakan dalam platform Opentender.net. Hasil akhir kajian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan kebijakan, ketersediaan, aksesibilitas, integrasi data dan informasi

PBJ pemerintah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penyusunan strategi peningkatan pelibatan publik untuk menggunakan data dan informasi PBJ dalam mendukung transformasi pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data terkait pengadaan melalui metode pemilihan e-purchasing, pengadaan langsung, dan penunjukan langsung, tidak tersedia dan tidak masuk dalam kajian ini. Kedua, dari 5 proses tahapan pengadaan yang berlaku di Indonesia (perencanaan, proses pemilihan, penetapan pemenang, kontrak, dan Implementasi), peneliti tidak memiliki data kontrak dan implementasi. Sehingga, dimungkinkan terjadi perbedaan data antara perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang dengan yang berkontrak.

Temuan-temuan utama dari analisis kuantitatif dan kualitatif dijelaskan dalam poin di bawah ini





Temuan dari data pengadaan 2010 - 2020

Dalam hal **kompetisi dan kesempatan pasar**, tingkat konsentrasi pasar di tingkat nasional dan daerah, menunjukkan tren yang sama. Secara nasional penurunan tingkat konsentrasi pasar dalam proses tender sebesar 30% dari tahun 2011 sampai 2019 (dari 1.414 ke 977), namun meningkat di tahun 2020 sebesar 159% (dari 977 ke 2.535). Temuan ini menunjukkan kesempatan pasar di Indonesia yang semakin membaik dari tahun 2011 ke 2019, namun kembali memburuk di tahun 2020. Penurunan tingkat konsentrasi pasar pada 2011 ke 2019 dipengaruhi oleh beberapa kebijakan, yaitu penggunaan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) pada 2010, penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) pada 2012. Sedangkan peningkatan pada 2020, menjadi 2.535 dapat disebabkan oleh situasi pandemi Covid-19.

Berkaitan dengan **Top 10 penyedia** selama 10 tahun (2011-2020), penelitian ini menemukan secara nasional masih didominasi oleh BUMN. Sebanyak 3 dari 10 perusahaan yang paling banyak mendapatkan pengadaan dari tahun 2011-2020 berasal dari BUMN. Dalam periode waktu yang sama, 9 dari 10 tender dengan jumlah nilai kontrak paling banyak juga dimenangkan oleh BUMN, dan 1 BUMD di DKI Jakarta. Seluruh BUMN dan BUMD yang menjadi 10 penyedia tertinggi secara nasional merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi.

Penelitian mengerucutkan analisa atas **jumlah kontrak yang diberikan kepada Top 10 penyedia** di tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir (2016 - 2020) dan menemukan adanya indikasi peluang pasar yang lebih baik. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, persentase jumlah pengadaan di tingkat nasional yang diberikan kepada Top 10 berkurang 0,41% (dari 1,13% ke 0,72%).

Masih pada konteks kompetisi dan kesempatan pasar, pada 3 tahun pertama (2011-2013) terdapat tren peningkatan baik di tingkat nasional dan subnasional untuk **Jumlah penyedia baru** yang memenangkan tender. Di tingkat Nasional, peningkatan sebesar 139% dari 9.136 penyedia pada 2011 ke 21.883 penyedia pada 2013. Setelah tahun 2013 hingga 2020, tren tersebut mengalami penurunan di mana penyedia baru yang memenangkan tender menurun 71,2% (dari 21.883 ke 6.305). Sementara itu, dalam 10 tahun terakhir (2011-2020) terdapat tren penurunan di tingkat nasional dan subnasional untuk persentase penyedia baru dengan seluruh penyedia, dimana di tingkat Nasional sebesar 67,4% (dari 74,8% ke 7,36%). Lebih lanjut, terkait **pertumbuhan penyedia baru** juga mengalami penurunan secara

nasional sebesar 2,92% (dari 2,95% ke 0,03%). Peningkatan penyedia baru pada 2010 - 2013 merupakan efek dari penyesuaian pemerintah terhadap kebijakan pengadaan secara elektronik yang baru diterapkan. Sedangkan penurunan jumlah penyedia baru dalam kompetisi tender dapat disebabkan oleh munculnya metode pengadaan lain yang berkembang.

Dalam hal **efisiensi internal**, sepanjang 2011 sampai 2020, persentase **tender gagal** secara nasional menurun dari 31% di 2011 menjadi 18% di 2017 kemudian meningkat sedikit sebesar 22% di 2020. Tren yang sama ditemukan di instansi tingkat pusat (Kementerian dan Lembaga) dan daerah (kota, kabupaten, provinsi). Namun dalam kurun waktu yang sama, Lembaga menjadi instansi dengan penurunan persentase tender gagal paling tinggi yaitu 20% (dari 35% ke 15%). Penurunan persentase tender gagal menunjukkan perbaikan dalam efisiensi internal. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan kapasitas panitia pengadaan dalam menyusun perencanaan yang terus diasah melalui serangkaian pelatihan yang diselenggarakan oleh LKPP. Sedangkan peningkatan persentase tender gagal pada 2020 merupakan dampak dari pandemi Covid-19 dimana pemerintah melakukan refocusing anggaran untuk memitigasi dampak pandemi, sehingga sebagian tender ada yang dihentikan hingga dibatalkan. Sedangkan dari sisi **durasi tender**, terdapat peningkatan efisiensi dimana tender mengalami proses yang lebih cepat dari 50 hari (2011) ke 40 hari (2020). Perbaikan ini dapat terjadi salah satunya didukung oleh pembentukan unit khusus pengadaan (ULP atau sekarang UKPBJ) yang didedikasikan untuk mengelola pengadaan di masing - masing instansi.

Dilihat dari **nilai manfaat uang**, dalam kurun waktu 10 tahun, terjadi penurunan rata - rata **persentase nilai kontrak yang melebihi HPS** baik secara nasional dari 194,87% pada 2011 menjadi 17,36% pada 2020 (grafik 3.33). Tren serupa juga terjadi di masing - masing jenis instansi (grafik 3.34). Beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berkontribusi positif terhadap capaian ini, seperti Keputusan Presiden No 80/ 2003, dan Perpres 16/ 2018 yang tidak memperbolehkan penawaran diatas HPS. Sementara itu, **rata - rata persentase nilai kontrak dibawah HPS** mengalami tren peningkatan dalam 5 tahun terakhir (2016-2020) secara nasional dari 6% menjadi 8% (grafik 3.37). Kementerian merupakan instansi yang menunjukan rata - rata persentase penghematan lebih tinggi sepanjang 2011 - 2020, yaitu antara 10-12% jika dibandingkan dengan kabupaten, kota, provinsi, dan lembaga (grafik 3.38).

lhwal **integritas publik**, terdapat perubahan signifikan dalam kurun waktu 2011-2020 terkait **persentase jumlah tender dengan RUP**, dan **persentase jumlah tender tanpa jenis pengadaan**, baik secara nasional maupun di masing-masing jenis instansi. Secara nasional, tender yang memiliki RUP pada 2011 sebanyak 0,25% menjadi 99,56% pada 2020. Lebih lanjut, pada 2013 tidak ada satu pun tender (0%) yang memiliki informasi jenis pengadaan sedangkan pada 2020 mencapai 99,997% tender. Perbaikan didorong oleh beberapa hal, yaitu, kebijakan yang mengharuskan semua instansi pemerintah untuk mulai mempublikasi RUP mereka pada tahun 2011 yang salah satu informasinya mengenai kode jenis pengadaan, pada 2013 Sistem Informasi Rencana Pengadaan (SiRUP) terintegrasi dengan SPSE yang mengharuskan pemerintah menginput RUP sebelum proses tender dimulai. Terkait judul dan deskripsi pengadaan, ditemukan perbaikan yang tidak terlalu signifikan sepanjang 2011 hingga 2020. Secara nasional, **jumlah tender yang memiliki judul kurang dari 20 karakter** menurun dari 2,5% pada 2011 menjadi 1,16% pada 2013, kemudian meningkat sedikit menjadi 1,91% pada 2020 (grafik 3.45). Berdasarkan **deskripsi tender kurang dari 60 karakter**, terdapat perbaikan secara nasional dalam kurun waktu 2013 - 2020 dari 73.5% menjadi 63.4% (grafik 3.49). Artinya ada perbaikan dari segi transparansi karena informasi yang disampaikan sedikit lebih lengkap meskipun tidak signifikan.

Lebih lanjut, perihal **red flag**, dalam kurun waktu 2011 - 2020, **pengadaan dengan nilai kontrak terbesar** didominasi oleh pekerjaan konstruksi dengan 6 dari 10 penyedia yang mendapatkan kontrak merupakan BUMN. Di sisi lain, **pengadaan di kuartal 4** secara nasional sepanjang tahun 2011-2020, didominasi oleh pengadaan barang (58%) dan pekerjaan konstruksi (25%), dan mengalami peningkatan sebesar 279%, dari 1.435 pada 2011 menjadi 3.755 pada 2020. Pengadaan barang mendominasi di kuartal empat karena cenderung lebih mudah melakukan pembelian barang dalam upaya penghabisan anggaran. Selain itu, Pandemi global COVID-19 berkontribusi terhadap peningkatan pengadaan di kuartal 4 pada 2020 di mana seluruh instansi pemerintah fokus pada penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan refocusing anggaran dan memperbolehkan setiap instansi untuk menghentikan maupun menunda pengadaan yang sedang berjalan atau telah direncanakan.



Temuan Pemanfaatan Opentender

Terkait dengan penggunaan data Opentender, **Akademisi** menggunakan Opentender sebagai bahan ajar dan bahan penelitian. Setidaknya 480 orang mahasiswa/i yang terpapar informasi dan data Opentender sepanjang 2016-2018, di mana setengahnya menghasilkan tugas/laporan berdasarkan data Opentender. **Jurnalis** memanfaatkan data dalam Opentender untuk menggali ide bahan liputan dan menjadikannya sebagai titik awal dalam liputan investigasi. Menurut para jurnalis, informasi dalam Opentender membantu untuk memangkas waktu yang dibutuhkan untuk menulis sekaligus mengubah kebiasaan menulis menjadi lebih berbasis data.

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) memakai data dalam Opentender sebagai bahan peningkatan kapasitas internal dan jaringan, bahan advokasi dalam proses pemantauan layanan publik serta bagian dari kolaborasi multipihak termasuk dengan jurnalis, pemerintah dan universitas. Temuan dan rekomendasi yang disampaikan OMS kepada pemerintah pun banyak yang ditindaklanjuti, baik dengan memperbaiki proses, mengubah kebijakan, menjalin kerjasama pemantauan, maupun dengan mengambil tindakan hukum. Untuk **Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)** menggunakan data Opentender sebagai bahan referensi materi post audit dan probity audit. Informan menyebutkan bahwa 100% dari sampling data yang diambil berdasarkan nilai skor Opentender menghasilkan temuan yang dapat ditindaklanjuti dengan proses audit. Selain itu, dengan menggunakan Opentender, dalam 20 hari yang semula memperoleh 10 temuan menjadi 20-30 temuan administrasi dan pengambilan sampel semula membutuhkan waktu beberapa hari menjadi 15-30 menit.

Menurut survey kepada empat kelompok pengguna hingga tahun 2020, fitur di Opentender yang paling sering dikunjungi oleh pengguna adalah Top 10 dan database red flag. Mengacu data Google Analytics, pengunjung opentender mayoritas ada dalam kelompok usia 18-34 tahun dan 51% mengakses via desktop, sedangkan sisanya menggunakan handphone/tablet. Peta pengguna Opentender 2014-2020, ada pada wilayah subnasional di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, khususnya Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur. Sementara pada 3 bulan terakhir tahun 2020, peta pengguna opentender dapat ditemukan pada pulau-pulau besar di Indonesia, khususnya Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua.



Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal, pertama, dari aspek **kebijakan**, Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) perlu menerbitkan surat keputusan bersama atau peraturan bersama untuk memperkuat sistem pemantauan kinerja Penyedia dengan mengintegrasikan data kinerja Penyedia dengan data pemilik manfaat (beneficial owners) yang dapat diakses oleh publik. Selain itu, untuk mencegah terjadinya konsentrasi pasar, Kementerian Koperasi dan UKM, perlu memberi perhatian khusus pada pemulihan ekonomi perusahaan terdampak COVID-19, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi. Hal ini juga sejalan dengan komitmen pembangunan ekonomi yang inklusif. Lebih lanjut, dengan banyaknya jumlah kontrak pengadaan yang dimenangkan oleh BUMN dan masuk ke dalam top 10 penyedia, Kementerian BUMN perlu mendorong kebijakan transparansi **proses anggaran termasuk proses pengadaan BUMN** di Indonesia sebagai badan publik.

Kedua, aspek **perbaikan ketersediaan data**¹, penelitian ini mendorong pemerintah untuk membuka data pengadaan lainnya, seperti data peserta tender, proses berkontrak dan implementasi pengadaan, status usaha mikro, kecil atau koperasi yang memenangkan pengadaan pemerintah, serta membuat klasifikasi sektor pada data pengadaan seperti pendidikan dan kesehatan.

Ketiga, aspek **aksesibilitas data**², penelitian ini mendorong agar akses data terhadap metode pengadaan selain tender, juga dibuka ke publik yakni epurchasing, penunjukkan langsung dan pengadaan langsung. Selain itu, data kinerja penyedia yang tersedia dalam SIKAP juga perlu dibuka agar publik dapat mengetahui kinerja penyedia yang menerima anggaran negara.

Keempat, penelitian ini juga merekomendasikan perlunya **peningkatan kualitas data**³ seperti mempublikasikan data status badan usaha terpilah, termasuk secara eksplisit status usaha mikro, kecil, atau koperasi, yang memenangkan pengadaan pemerintah, memberikan kode atau *tagging* khusus (*identifier*) untuk menghubungkan antara pekerjaan konstruksi dan

konsultansi dalam rangkaian pengadaan konstruksi yang sama, menyediakan klasifikasi sektor dalam dokumen pengadaan, memperinci informasi mengenai judul dan deskripsi pengadaan. Selain itu, pemerintah perlu mempublikasi data dalam format terbuka yang terstandarisasi. Salah satu contoh standar yang dapat dijadikan acuan misalnya dengan format Open Contracting Data Standard (OCDS). Hal ini agar dapat meningkatkan interoperabilitas antar sistem pemerintah dengan menggunakan data PBJ dan meningkatkan upaya pelaksanaan pembangunan dengan basis data yang terintegrasi, serta lebih membuka ruang partisipasi bagi calon penyedia maupun masyarakat luas,



¹ ketersediaan dalam konteks ini memiliki arti bahwa data belum tersedia / pemerintah belum mengagregat, mengolah, dan mempublikasikan data.

² aksesibilitas data dalam konteks ini memiliki arti pemerintah telah memiliki data namun belum membukanya ke publik

³ peningkatan kualitas data dalam konteks ini memiliki arti bahwa data sudah tersedia namun belum memiliki kualitas yang cukup baik untuk dapat dilakukan analisis mendalam

BAB

1.

Pendahuluan



1.1 Latar Belakang

Sejak 2011 dan secara bertahap lebih sistematis di tahun 2014, 2018 hingga 2020, Indonesia Corruption Watch menginisiasi serangkaian advokasi untuk mendorong implementasi pengawasan publik dan keterbukaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) di Indonesia. Hal ini didasari dari hasil pemantauan ICW atas sektor pengadaan barang dan jasa yang rawan korupsi. Berdasarkan data ICW pada 2016⁴, 2017⁵, 2018⁶, dan 2019⁷ rata-rata 40% kasus korupsi tiap tahun terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Bahkan pada 2019 jumlahnya mencapai 64%.

Meskipun banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan, khususnya korupsi di sektor PBJ, namun salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan adalah kurangnya partisipasi dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa karena terbatasnya informasi pengadaan yang dapat diakses oleh publik.

Dalam hal ini, keterbukaan informasi PBJ menjadi salah satu jalan keluar untuk menekan berbagai potensi kecurangan maupun korupsi. Membuka informasi PBJ kepada publik berarti membuka ruang-ruang partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat melakukan pengawasan. Lebih jauh, membuka informasi dan data pengadaan barang dan jasa dapat berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, efisiensi, serta kompetisi yang adil antar perusahaan swasta.

Untuk mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan dan akuntabel, ICW telah menyediakan platform Opendender.net⁸ yang dapat membantu masyarakat dalam mengarahkan pengadaan yang akan dipantau. Selain itu, ICW melakukan pelibatan publik melalui agenda pemantauan bersama antara OMS dan jurnalis lokal⁹.

⁴ ICW. 2016. Tren Penindakan Kasus Korupsi 2016. <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2016> diakses pada 13 Januari 2021.

⁵ ICW. 2017. Tren Penindakan Kasus Korupsi 2017. <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2017> diakses pada 13 Januari 2021.

⁶ ICW. 2018. Tren Penindakan Kasus Korupsi 2018. <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2018> diakses pada 13 Januari 2021.

⁷ ICW. 2019. Tren Penindakan Kasus Korupsi 2019. <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2019> diakses pada 13 Januari 2021.

⁸ red- www.opendender.net adalah tool yang dikembangkan oleh Indonesia Corruption Watch, berbasis website yang menyediakan analisis potensi kecurangan dari setiap pengadaan barang dan jasa di seluruh Indonesia. Data yang dimiliki bersumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

⁹ ICW. 2019. [Monitoring Governments Procurement Project with Open Tender](#). ICW. 2020. [Investigating Procurement Allegations Fraud using Open Tender](#)

Sejak pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang PBJ Pemerintah yang didalamnya mengatur penerapan sistem pengadaan elektronik (e-procurement), hingga saat ini sudah ada jutaan data pengadaan tersedia dan berbagai perbaikan telah dilakukan, baik dari sisi regulasi maupun sistem yang digunakan. Namun penelitian yang membahas PBJ di Indonesia masih sangat terbatas. Oleh karena itu ICW melakukan kajian terkait data dan informasi PBJ, serta pemanfaatannya oleh akademisi, jurnalis, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan pemerintah khususnya inspektorat. Hal ini untuk memperkaya diskursus publik mengenai isu PBJ.

Laporan ini menyajikan data tren/pola pengadaan pemerintah yang dikaitkan dengan aspek-aspek kompetisi, efisiensi, partisipasi, dan integritas, serta melihat kemanfaatan dari data pengadaan yang telah dibuka dan digunakan dalam platform Opendender.net¹⁰. Hasil akhir kajian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan kebijakan, ketersediaan, aksesibilitas, integrasi data dan informasi PBJ pemerintah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penyusunan strategi peningkatan pelibatan publik untuk menggunakan data dan informasi PBJ dalam mendukung transformasi pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu:

1. Bagaimana dampak dari keterbukaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dari sisi kompetisi, efisiensi, partisipasi dan integritas?
2. Apa saja potensi peningkatan pemanfaatan data pengadaan pemerintah yang dipublikasi melalui Opendender.net?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur dampak dari pendekatan keterbukaan data pengadaan barang dan jasa serta memetakan potensi peningkatan penggunaan data tersebut. Penelitian ini menyediakan bukti – bukti tentang bagaimana data pengadaan yang terbuka dapat berdampak pada kompetisi yang lebih adil, efisiensi, partisipasi, serta integritas. Tujuan lain dari penelitian ini juga untuk menyusun rekomendasi

¹⁰ Opendender.net menyediakan data Tender yang telah diberikan sor potensi kecurangan berdasarkan 5 indikator yaitu, efisiensi, partisipasi, monopoli, nilai kontrak, dan waktu pengadaan.

untuk strategi pengembangan Opentender.net yang lebih ramah-pengguna dan menjawab kebutuhan publik dalam mengawasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

1.4 Jangka Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 9 bulan, mulai Januari sampai September 2021.

1.5 Metode Penelitian

Kajian Ini menggunakan metodologi campuran (*mixed methodology*) dengan menggabungkan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data pengadaan dalam rentang waktu 10 tahun, mulai 2011 hingga 2020 untuk melihat transformasi kuantitas dan kualitas data pengadaan barang/jasa pemerintah. Pendekatan kualitatif digunakan untuk melihat seperti apa dan bagaimana data pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tersedia di Opentender.net tersebut dimanfaatkan lebih lanjut oleh Jurnalis, Organisasi Masyarakat Sipil, Akademisi, dan Instansi Pemerintah.

1.6 Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini, tahapan yang dilakukan, yaitu:

1.6.1. Pengumpulan Data

Tahapan ini menitikberatkan pada analisa kuantitatif. Tim peneliti mengumpulkan data pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari LKPP dari tahun anggaran 2011 hingga 2020.

Peneliti kemudian memeriksa kualitas data, melakukan pembersihan data (*data cleaning*) dan mengkonfirmasi ulang kepada LKPP terkait data yang telah dibersihkan tersebut.

1.6.2. Studi Dokumen

Untuk memberikan konteks pada 10 tahun data PBJ Pemerintah, tim peneliti menganalisis perubahan kebijakan yang terjadi pada tahun 2011-2020 yang berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa

pemerintah. Tim peneliti juga mencoba mengaitkan kondisi sosial politik yang mempengaruhi pengadaan dan gerakan transparansi dan anti-korupsi dalam kurun waktu tersebut.

1.6.3. Diskusi Kelompok Terfokus/*Focused Group Discussion* (FGD)

Sebagai bagian dari analisa kualitatif, tim peneliti melakukan FGD dengan kelompok jurnalis dan organisasi masyarakat sipil yang telah menggunakan platform Opentender.net sejak tahun 2014.

Tim peneliti menggali pengalaman 15 informan yang berasal dari 8 wilayah (Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kabupaten Bojonegoro dan Blitar di Jawa Timur) yang terdiri dari 8 Jurnalis dari 8 media dan 7 perwakilan organisasi masyarakat sipil.

1.6.4. Wawancara

Untuk melengkapi data kualitatif, peneliti melakukan wawancara individu dengan akademisi dan aparat pengawas internal pemerintah yang telah menggunakan OpenTender.net di 2 wilayah di Indonesia sejak 2016.

1.6.5. Analisis Data

Analisis data dibedakan menjadi dua bagian, yaitu, analisis kuantitatif untuk data pengadaan pemerintah dalam rentang waktu 2011 sampai 2020 yang menggunakan metode tender.

Sedangkan analisis kualitatif dilakukan untuk menggali pemanfaatan data pengadaan oleh Jurnalis, Organisasi Masyarakat Sipil, Akademisi, dan Instansi Pemerintah serta mengkonfirmasi hasil temuan dari analisis data kuantitatif yang telah dilakukan.

1.6.6. Verifikasi dan Validasi Data

Verifikasi dan validasi dilakukan kepada setiap pihak yang menjadi sumber data/ rujukan maupun dalam rangka mengkonfirmasi hasil temuan.

Dalam proses validasi analisa kuantitatif, peneliti melakukan validasi terhadap LKPP sebagai pemilik data terkait data hasil temuan.

Dalam proses validasi temuan kualitatif, peneliti mengirimkan kembali lembar konfirmasi kepada informan untuk diperiksa dan dikonfirmasi dengan penandatanganan informasi yang diberikan.

1.6.7. Penyusunan dan Perbaikan Laporan

Laporan disusun dan diperbaiki berdasarkan data dan informasi yang telah divalidasi.

1.6.8. Pemberian Umpan Balik

Peneliti melakukan konfirmasi dengan meminta umpan balik kepada pihak LKPP selaku pemilik data utama. Tujuannya untuk memastikan informasi yang digali dan temuan yang didapatkan sudah tepat.

1.6.9. Penyusunan Laporan Final

Peneliti melakukan konfirmasi dengan meminta umpan balik kepada pihak LKPP selaku pemilik data utama. Tujuannya untuk memastikan informasi yang digali dan temuan yang didapatkan sudah tepat.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian dan Limitasi

Ruang Lingkup

Kajian ini berfokus pada data pengadaan barang dan jasa pada tahun 2011-2020 yang terdokumentasi dalam Opentender.net dengan sumber data pengadaan dari LKPP. Unit yang dianalisis adalah pengadaan di tingkat nasional, berdasarkan jenis instansi (Kementerian, Lembaga, Provinsi, Kabupaten, Kota), serta secara spesifik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI), Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Data pada tingkat nasional didapatkan dari 679 sistem pengadaan elektronik di tingkat pusat maupun daerah.

Dari lima (5) metode pemilihan penyedia yang ada di Indonesia (E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukkan Langsung, Tender Cepat, dan Tender/Seleksi)¹¹, kajian ini hanya menganalisis pengadaan yang menggunakan metode tender dan tender cepat untuk pengadaan barang atau konstruksi, juga seleksi dalam pengadaan jasa konsultansi atau jasa lainnya.

Dari 5 proses tahapan pengadaan (perencanaan, proses pemilihan, penetapan pemenang, kontrak, implementasi)¹², penelitian ini akan berfokus pada 3 tahapan pertama dari proses pengadaan tersebut; perencanaan (*planning*), proses pemilihan (*tendering*), dan penetapan pemenang (*award*).

Dalam analisa kualitatif, informan dalam penelitian ini merupakan pengguna Opentender.net sejak tahun 2014 yang berasal dari kelompok jurnalis, masyarakat sipil, akademisi, dan pemerintah khususnya inspektorat.

Limitasi penelitian

Penelitian ini memiliki batasan bahwa tidak semua data pengadaan barang/ jasa tersedia. Data terkait pengadaan melalui metode pemilihan *e-purchasing*, pengadaan langsung, dan penunjukan langsung, tidak tersedia dan tidak masuk dalam kajian ini.

Data pengadaan barang/jasa yang digunakan dalam kajian ini adalah data tender dan tender cepat. Keduanya disimpan dalam dataset yang sama dan dibedakan dengan keterangan pada isian metode pemilihan. Dalam proses tender cepat, instansi pemerintah tidak lagi mengadakan tender terbuka. Sistem akan mengirimkan undangan secara otomatis kepada para penyedia yang memenuhi kriteria tender dan telah terdaftar dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP), yaitu *vendor management system* yang dibangun dan dikelola oleh LKPP.

Proses pemilihan penyedia dalam tender cepat ditentukan secara otomatis atau by-system tanpa evaluasi penawaran secara manual, sehingga berpengaruh kepada salah satu indikator yang mengukur dampak PBJ dalam kajian ini, yaitu durasi antara tanggal pengumuman tender hingga tanggal penetapan pemenang. Karena adanya perbedaan yang cukup tajam antara tender biasa dan tender cepat dalam indikator ini, maka analisis durasi tersebut dipisahkan menurut jenis tender.

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pasal 38 dan 41

¹² Open Contracting Partnership, The Contracting Process, https://standard.open-contracting.org/latest/en/getting_started/contracting_process/ diakses pada 2 Januari 2021



Dari 5 proses tahapan pengadaan yang berlaku di Indonesia, Opendender.net tidak memiliki data dari 2 proses tahapan terakhir; kontrak dan implementasi. Sehingga, dimungkinkan terjadi perbedaan data antara perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang dengan yang berkontrak. Dalam kajian ini, peneliti menggunakan basis data mulai perencanaan hingga penetapan pemenang.



Dalam penggalian data informan, tim peneliti hanya melakukan FGD dengan kelompok jurnalis dan masyarakat sipil namun menggunakan wawancara mendalam dengan akademisi dan instansi pemerintah. Wawancara mendalam ini dipilih atas dasar keterbatasan peta pengguna dari kedua kelompok tersebut saat penelitian dilakukan.

1.8 Teknis Analisis Data

1.8.1 Kuantitatif

Data yang digunakan adalah data pengadaan dari rentang waktu 1 Januari 2011 - 31 Desember 2020 yang bersumber dari LKPP, yaitu:

1. data rencana umum pengadaan (*planning*).
2. data pengumuman (*tendering*).
3. data tender selesai (*award*).

Ketiga data di atas kemudian dianalisis menggunakan panduan dari *Open Contracting Data Standard (OCDS): Redflags to OCDS Mapping*¹³, *Use case guide: Indicators linked to OCDS*¹⁴, dan *Indicators procurement market*¹⁵. Dari ketiga panduan tersebut, tim peneliti menemukan 5 dimensi dan 16 indikator yang dapat dianalisa menggunakan data yang tersedia. Indikator tersebut adalah:

Tabel 1.1 Dimensi dan Indikator Penelitian

No	Dimensi	Indikator
1	Kompetisi dan kesempatan pasar	Konsentrasi Pasar
		10 Penyedia dengan Nilai Kontrak Terbesar
		Persentase Jumlah Kontrak yang Diberikan kepada Top 10 Penyedia
		Jumlah Penyedia yang Baru Pertama Kali Memenangkan Kontrak (Penyedia Baru)
		Perbandingan antara Penyedia Baru dengan Seluruh Penyedia
2	Efisiensi Internal	Persentase Pertumbuhan Penyedia Baru di Setiap K/L/PD
		Persentase Jumlah Tender Gagal
		Durasi antara Tanggal Pengumuman Tender dan Tanggal Penetapan Pemenang

¹³ Open Contracting Partnership. Redflags to OCDS Mapping. <https://www.open-contracting.org/resources/red-flags-integrity-giving-green-light-open-data-solutions/> diakses pada 2 Januari 2021.

¹⁴ Open Contracting Partnership. Use case guide: Indicators linked to OCDS. <https://www.open-contracting.org/resources/using-it/> diakses pada 2 Januari 2021.

¹⁵ Open Contracting Partnership. Indicator to Diagnose the Performance of a Procurement Market. <https://www.open-contracting.org/resources/indicators-to-diagnose-the-performance-of-a-procurement-market/> diakses pada 2 Januari 2021.

No	Dimensi	Indikator
3	Nilai Manfaat Uang	Persentase Nilai Kontrak di Atas HPS
		Persentase Nilai Kontrak di Bawah HPS (Penghematan)
4	Integritas Publik	Persentase Jumlah Tender dengan Informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)
		Persentase Jumlah Tender dengan Judul kurang dari 20 Karakter
		Persentase Jumlah Tender dengan Keterangan kurang dari 60 Karakter
		Persentase Jumlah Tender tanpa Informasi Jenis Pengadaan
5	Red Flag	Pengadaan dengan Nilai Kontrak Tertinggi
		Pengadaan di Kuartal ke-4

1.8.2 Kualitatif

Data yang digunakan dalam pendekatan kualitatif berasal dari dokumen laporan dan pelatihan ICW terkait investigasi dan penggunaan Opentender.net serta FGD dan wawancara. FGD dilakukan untuk menggali informasi dari kelompok OMS dan Jurnalis, sedangkan wawancara dilakukan kepada perwakilan kelompok akademisi dan instansi pemerintah, khususnya inspektorat. Kemudian hasil dari kegiatan ini diketik dan diklaster berdasarkan kategori informan. lalu peneliti melakukan penafsiran atas data yang tersedia dan terakhir mengkonfirmasi lagi data tersebut kepada informan.

1.9 Validasi dan Triangulasi

Untuk memvalidasi riset ini, dilakukan validasi terpisah pada masing-masing data, yaitu:

1.9.1. Kuantitatif

Proses validasi data pengadaan dilakukan dengan memeriksa pola data dan melakukan konfirmasi kepada LKPP. Setelah data dianggap cukup solid, maka penelitian melanjutkan ke tahapan analisis. Setelah itu, peneliti juga melakukan konfirmasi atas hasil analisis kepada LKPP dan instansi lainnya yang terkait.

1.9.2. Kualitatif

Proses validasi untuk data informan kualitatif dilakukan dengan menyusun transkrip wawancara untuk informan akademisi, APIP dan ICW. Peneliti kemudian meminta informan tersebut memeriksa hasil wawancara dan menandatangani lembar persetujuan. Untuk informan kelompok OMS dan jurnalis yang terlibat dalam Focus Group Discussion, validasi dilakukan dengan mengirimkan transkrip Focus Group Discussion dan meminta informan yang hadir memeriksa informasi yang disampaikan dalam Focus Group Discussion telah terdokumentasi dengan tepat dan menandatangani lembar konsen.

1.10 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penelitian ini dibagi menjadi empat bagian, dengan rincian sebagai berikut:

-
- Bab I. Pendahuluan**, bab ini berisi uraian latar belakang alasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, tahapan penelitian, metode penelitian, ruang lingkup penelitian dan limitasi, jenis dan sumber data, teknik analisis data, validasi dan triangulasi, sistematika penulisan dan profil responden/informan.
-
- Bab II. Gambaran Umum**, bab ini berisi peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, bentuk pengadaan barang/jasa pemerintah, jenis pengadaan barang/jasa pemerintah, metode pengadaan barang/jasa pemerintah, juga penjelasan mengenai opentender.
-
- Bab III. Analisa Temuan**, bab ini berisi gambaran umum, analisa teknis atas data kuantitatif menggunakan 5 dimensi: kompetisi dan kesempatan pasar, efisiensi internal, value for money, Integritas publik, red flag. Selain itu, bab ini juga berisi analisa dampak manfaat kegunaan data serta studi kasus keterlibatan pengguna data.
-
- Bab IV. Kesimpulan dan Rekomendasi**, bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian dampak opentender untuk 1) perbaikan pada aspek kebijakan, implementasi, dan pemanfaatan data bagi pemerintah khususnya LKPP, dan 2) perbaikan pada aspek presentasi / visualisasi data serta pelibatan warga dalam menggunakan opentender.net untuk terlibat dalam pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah.
-

BAB

2.

Gambaran Umum



2.1 Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang - undang khusus yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa. Sehingga aturan pengadaan pemerintah merujuk pada Keputusan Presiden yang kemudian diganti menjadi Peraturan Presiden (Perpres).

Gambar 2.1 Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Sumber:
Berbagai Sumber,
Olahan Penulis



Aturan tersendiri mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah pertama kali dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, melalui Keppres No 18 Tahun 2000¹⁶. Peraturan ini diubah, hingga pada 2010 merujuk pada Perpres 54/ 2010¹⁷, yang kemudian diubah beberapa kali mulai dari perubahan kesatu melalui Perpres 35/ 2011¹⁸, perubahan kedua melalui Perpres 70/2012¹⁹, perubahan ketiga melalui Perpres 172/ 2014²⁰, dan perubahan keempat melalui Perpres 4/2015²¹. Pada 2018, kemudian Pemerintah mengeluarkan Perpres 16/ 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah²² yang merupakan aturan baru yang akan dijadikan acuan bagi pengadaan pemerintah kedepannya. Berbeda dari aturan sebelumnya, yang membahas secara terperinci proses pengadaan pemerintah, Perpres ini menjelaskan secara umum konsep pengadaan pemerintah sedangkan aturan lebih rinci diatur dalam peraturan turunan melalui Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah²³. Kemudian pada Februari 2021, pemerintah mengeluarkan Perpres 12/ 2021²⁴ tentang Perubahan atas Perpres 16/2018.

Berdasarkan Perpres 16/ 2018, pengadaan pemerintah bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia²⁵. Untuk mencapai hal itu, proses pengadaan wajib menerapkan serangkaian prinsip, yaitu: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel²⁶.

¹⁶ Keputusan Presiden No 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/57747/keppres-no-18-tahun-2000#:~:text=KEPPRES%20No.%2018%20Tahun%202000,Instansi%20Pemerintah%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D> diakses pada 11 Februari 2021

¹⁷ Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-54-tahun-2010> diakses pada 11 Februari 2021

¹⁸ JDIH LKPP. Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-35-tahun-2011> diakses pada 11 Februari 2021

¹⁹ JDIH LKPP. Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-70-tahun-2012> diakses pada 11 Februari 2021

²⁰ JDIH LKPP. Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-172-tahun-2014> diakses pada 11 Februari 2021

²¹ JDIH LKPP. Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-4-tahun-2015> diakses pada 11 Februari 2021

²² JDIH LKPP. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018> diakses pada 10 Februari 2021

²³ JDIH LKPP. Index Kategori Produk Hukum. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/index>. Diakses pada 10 Februari 2021.

²⁴ JDIH LKPP. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 mengenai pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-12-tahun-2021> diakses pada 1 Maret 2021

²⁵ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pasal 4 huruf a.

²⁶ Ibid. Pasal 6

Lebih lanjut, dalam Perpres 16/ 2018 dijelaskan bahwa Pengadaan adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan²⁷.

Dalam peraturan tersebut yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan²⁸.
2. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya²⁹.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah³⁰.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom³¹.

Mengacu pada Perpres 16/2018, lingkup pengadaan yang dimaksud adalah³²:

1. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;
2. Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
3. Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

²⁷ Ibid. Pasal 1 ayat 1

²⁸ Ibid. Ayat 2

²⁹ Ibid. Ayat 3

³⁰ Ibid. Ayat 4

³¹ Ibid. Ayat 5

³² Ibid. Pasal 2

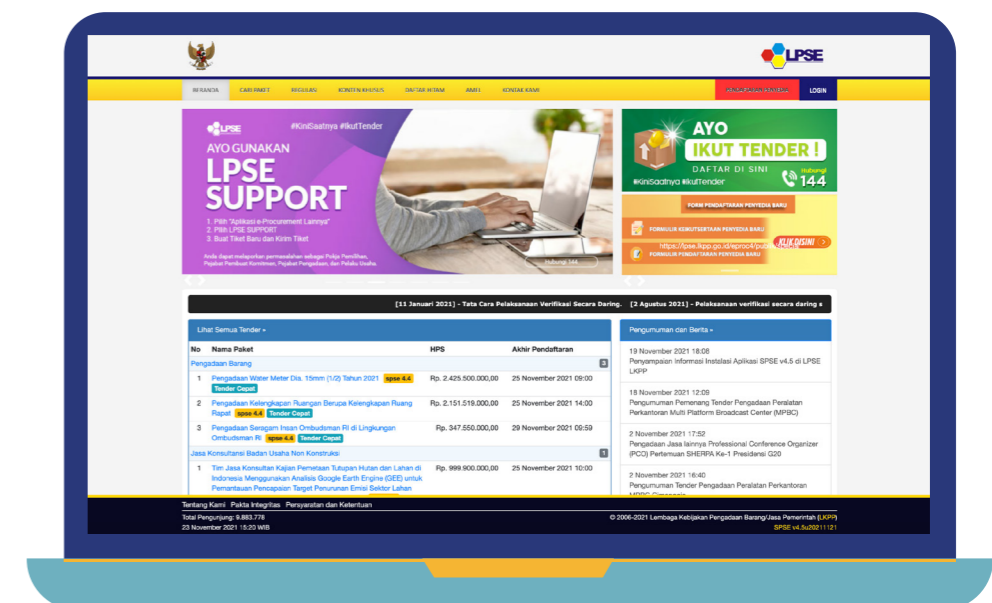
Berdasarkan definisi di atas, maka pengadaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tidak mengacu mekanisme pengadaan sesuai Perpres.

Perubahan-perubahan aturan di atas menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mendorong proses pengadaan yang lebih efektif, efisien, akuntabel dan transparan dengan detail sebagai berikut:

1. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Sistem ini dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa - Bappenas pada tahun 2006 sesuai Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi³³.

Pada 2007, pemerintah mulai mengembangkan PBJ secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Bappenas dan Departemen Pendidikan Nasional. Ketika itu baru terdapat satu server LPSE yang berada di Jakarta dengan alamat www.pengadaannasional-bappenas.go.id yang dikelola oleh Bappenas³⁴. Sistem ini yang menjadi cikal bakal layanan pengadaan secara elektronik yang digunakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah saat ini.



³³ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/802> diakses pada 22 Feb 2021

³⁴ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/802> diakses pada 22 Feb 2021

2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah atau LKPP secara resmi lahir pada Desember 2007³⁵. LKPP merupakan transformasi Pusat Pengembangan Kebijakan pengadaan Barang dan Jasa Publik yang sebelumnya ada di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional Republik Indonesia (KemennPPN/BAPPENAS RI)³⁶. Saat ini, LKPP aktif dalam pengembangan, perumusan dan penetapan kebijakan pengadaan pemerintah³⁷. Termasuk mengelola dan memperbaharui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

3. Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Dalam Keppres 80/2003, pihak yang melaksanakan pengadaan disebut panitia pengadaan yang berkedudukan dibawah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)³⁸. Fungsi pengadaan masih ditangani secara ad-hoc oleh panitia yang dibentuk dan bekerja secara temporer (tidak permanen)³⁹.

Model seperti ini memiliki banyak kelemahan dan berakibat pada rendahnya kinerja Pengadaan Barang/Jasa di instansi pemerintah pusat/ daerah. Kelemahan-kelemahan dari organisasi pengadaan yang masih ad-hoc adalah⁴⁰: (1) rawan pengaruh kepentingan dan intervensi; (2) kemampuan dan kompetensi pelaksana pengadaan sangat bervariasi; (3) profesionalitas tidak terjamin dan tidak terukur; (4) pelaksanaan kurang fokus karena pelaksana masih merangkap jabatan/kegiatan lain; (5) akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana tidak efektif; (6) tidak ada jaminan peningkatan karier di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; (7) pengelolaan arsip, dokumentasi serta informasi tidak dapat dilakukan dengan baik.

³⁵ JDIH LKPP, Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-106-tahun-2007> diakses pada 20 Februari 2021

³⁶ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/802> diakses pada 22 Feb 2021

³⁷ JDIH LKPP, Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pasal 3. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-106-tahun-2007> diakses pada 22 Feb 2021

³⁸ Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

³⁹ LKPP, Kajian Akademis Unit Layanan Pengadaan hal. 1. http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/5_WyeeJHqVeXfZSfWhu pCsBlSvYzdzdKFv.pdf diakses pada 20 februari 2021

⁴⁰ LKPP, Kajian Akademis Unit Layanan Pengadaan hal. 1. http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/5_WyeeJHqVeXfZSfWhu pCsBlSvYzdzdKFv.pdf diakses pada 20 februari 2021

Untuk mengatasi masalah tersebut, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) mengamanatkan dibentuknya Unit Layanan Pengadaan yang permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada⁴¹.

Sejak tahun 2018, pemerintah memperkenalkan istilah Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (selanjutnya disebut "UKBJ") sebagai pengganti ULP⁴². UKPBJ merupakan unit kerja di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan PBJ⁴³. Unit ini merupakan gabungan dari fungsi ULP serta Layanan Pengadaan Secara Elektronik (selanjutnya disebut "LPSE") yang disertai dengan fungsi pendukung lainnya. Fungsi UKPBJ meliputi: pengelolaan pengadaan, pengelolaan LPSE, pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan, serta sebagai agen pengadaan dan pelaksanaan konsolidasi pengadaan⁴⁴.

4. E-tendering

Sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat 1 Perpres 54/ 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah bahwa K/L/D/I wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2011. Ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 Tentang e-Tendering, Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik⁴⁵.

E-Tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik⁴⁶.

⁴¹ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pasal 14

⁴² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pasal 75

⁴³ Ibid. Pasal 1 ayat 11

⁴⁴ Ibid. Pasal 75 ayat 2

⁴⁵ LKPP. <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/799> diakses pada 20 Februari 2021

⁴⁶ Ibid

Metode E-Tendering terdiri dari⁴⁷:

1. E-Lelang untuk pemilihan Penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
2. E-Lelang Cepat untuk pemilihan Penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
3. E-Seleksi untuk pemilihan Penyedia jasa konsultasi; dan
4. E-Seleksi Cepat untuk pemilihan Penyedia jasa konsultasi

Ruang lingkup e-Tendering meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang⁴⁸. Metode ini dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik⁴⁹.

5. E-purchasing dan E-katalog

Selain E-tendering, pengadaan secara elektronik juga dapat menggunakan metode E-purchasing. Metode ini adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik (E-katalog)⁵⁰.

Tujuan dari penggunaan metode E-purchasing adalah⁵¹:

1. terciptanya proses pemilihan barang/jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih barang/jasa pada pilihan terbaik; dan
2. efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan pengguna

Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa⁵².

⁴⁷ LKPP. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah No 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering. Pasal 3 http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/5_KqHqRSuGxMyLFdUzOvIUyQTMbBiJzIta.pdf diakses pada 20 Februari 2021

⁴⁸ LKPP. <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/799> diakses pada 20 Februari 2021

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Ibid

⁵² JDIH LKPP. Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No 11/2018 tentang Katalog Elektronik. Pasal 1 ayat 3 <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-11-tahun-2018> diakses pada 20 februari 2021

6. Penerapan Sanksi Daftar Hitam

Penerapan sanksi daftar hitam sudah dilakukan sejak 2011⁵³. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/ penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu⁵⁴.

Sanksi daftar hitam diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia apabila⁵⁵:

1. peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/ tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
2. peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
3. peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia;
4. peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan;
5. peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog;
6. pemenang Pemilihan yang telah menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK;
7. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau
8. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.

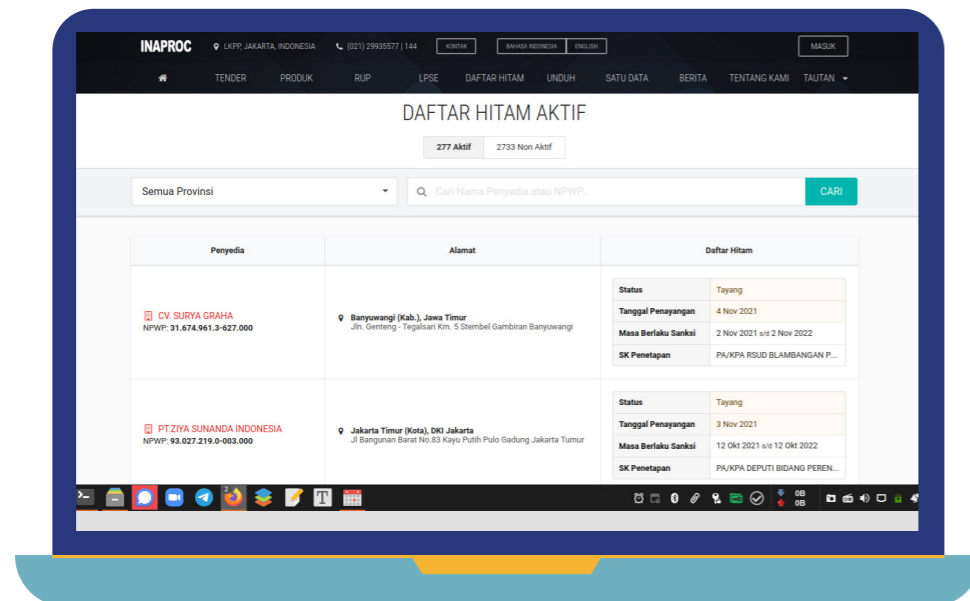
⁵³ JDIH LKPP. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-kepala-lkpp/peraturan-kepala-lkpp-nomor-7-tahun-2011> diakses pada 20 Februari 2021

⁵⁴ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pasal 1 ayat 49

⁵⁵ JDIH LKPP. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 3. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-17-tahun-2018> diakses pada 20 Februari 2021

Mekanisme pengenaan sanksi daftar hitam dilakukan sebagai berikut⁵⁶:

1. Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor pusat perusahaan berlaku juga untuk seluruh kantor cabang/perwakilan perusahaan.
2. Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor cabang/perwakilan perusahaan berlaku juga untuk kantor cabang/perwakilan lainnya dan kantor pusat perusahaan.
3. Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada perusahaan induk tidak berlaku untuk anak perusahaan.
4. Sanksi Daftar Hitam yang dikenakan kepada anak perusahaan tidak berlaku untuk perusahaan induk



7. Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah daftar rencana Pengadaan Barang/ Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah^{57 58}. Untuk mempublikasi RUP, LKPP menyediakan Sistem Informasi

⁵⁶ Ibid. Pasal 5

⁵⁷ Peraturan Presiden No 70/ 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No 54/2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, pasal 25, <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-70-tahun-2012> diakses pada 20 Februari 2021

⁵⁸ Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-kepala-lkpp/peraturan-kepala-lkpp-nomor-12-tahun-2011> diakses pada 20 Februari 2021

Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dapat digunakan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah⁵⁹.

Rencana Umum Pengadaan paling sedikit memuat hal - hal berikut⁶⁰:

Tabel 2.1 Informasi dalam Rencana Umum Pengadaan

RUP Swakelola	RUP Penyedia
1. nama dan alamat PA/KPA;	1. nama dan alamat PA/KPA;
2. nama paket Swakelola yang akan dilaksanakan;	2. nama paket Penyedia;
3. tipe Swakelola;	3. kebutuhan penggunaan produk dalam negeri;
4. nama Penyelenggara Swakelola;	4. peruntukkan paket untuk Usaha kecil atau non kecil;
5. uraian pekerjaan;	5. uraian pekerjaan;
6. volume pekerjaan;	6. volume pekerjaan;
7. lokasi pekerjaan;	7. lokasi Pekerjaan;
8. sumber dana;	8. sumber dana;
9. besarnya total perkiraan biaya Swakelola; dan	9. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;
10. perkiraan Jadwal Pengadaan Barang/Jasa.	10. spesifikasi teknis/KAK;
	11. metode pemilihan; dan
	12. perkiraan jadwal Pengadaan Barang/Jasa

Pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP dilakukan dengan ketentuan⁶¹ sebagai berikut:

- a. Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran.
- b. Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. RUP diumumkan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

⁵⁹ Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, pasal 6, <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-kepala-lkpp/peraturan-kepala-lkpp-nomor-13-tahun-2012> diakses pada 20 Februari 2021

⁶⁰ JDIH LKPP. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 28 ayat 2 dan 3 <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-7-tahun-2018> diakses pada 20 Februari 2021

⁶¹ Ibid, pasal 29

Di Indonesia, pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah dapat dikategorikan menjadi 4 bentuk, berikut ini⁶²:

- Barang, yaitu setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang
- Pekerjaan Konstruksi, yaitu keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan
- Jasa Konsultansi, yaitu jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Penyedia jasa konsultansi dapat berupa perorangan dan Badan Usaha⁶³.
- Jasa Lainnya, yaitu jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan

⁶² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pasal 3 ayat 3

⁶³ Ibid. Pasal 1 ayat 31

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dapat dilakukan dengan 2 cara⁶⁴:

Melalui Penyedia,



yaitu cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha⁶⁵.

Melalui Swakelola,



yaitu cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat⁶⁶.

⁶⁴ Ibid. Pasal 18 ayat 4

⁶⁵ Ibid. Pasal 1 ayat 26

⁶⁶ Ibid. Pasal 1 ayat 23

Tabel 2.2 Metode Pengadaan Melalui Penyedia

Metode	Kategori	Batasan Anggaran	Kriteria
E-purchasing	Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya	Tidak ada	Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik ⁶⁷
Pengadaan Langsung	Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya/ Jasa Konsultansi	Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ⁶⁸ Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) ⁶⁹	
Penunjukan Langsung	Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya/ Jasa Konsultansi	Tidak ada	Keadaan tertentu yang dimaksud mengacu pada pasal 38 ayat 5 dan pasal 41 ayat 5 Perpres 16/2018
Tender Cepat	Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya	Tidak ada	Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia ⁷⁰
Tender	Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya	Tidak ada	Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia lainnya ⁷¹
Seleksi	Jasa Konsultansi	Paling sedikit di atas Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) ⁷²	

⁶⁷ Ibid. Pasal 38 ayat 2⁶⁸ Ibid. Pasal 38 ayat 3⁶⁹ Ibid. Pasal 41 ayat 3⁷⁰ Ibid. Pasal 38 ayat 6⁷¹ Ibid. Pasal 38 ayat 7⁷² Ibid. Pasal 41 ayat 2

Sedangkan untuk pengadaan dengan cara Swakelola dibagi lagi menjadi 4 bentuk, yaitu⁷³:



Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;



Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;



Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau

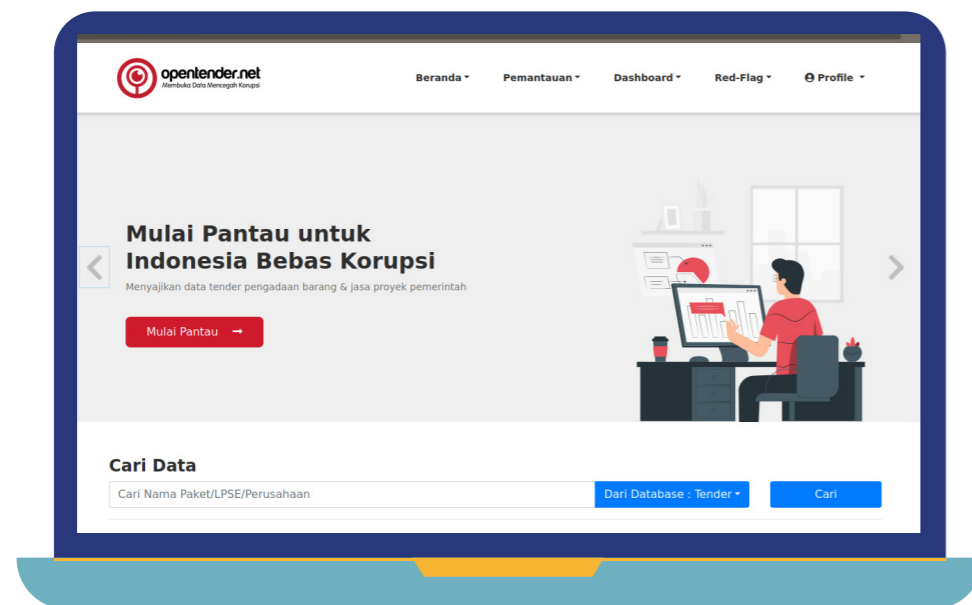


Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/ atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

2.2 Opentender.net

Opentender.net adalah platform yang dikembangkan oleh Indonesia Corruption Watch sejak 2010⁷⁴ ⁷⁵. Platform ini bertujuan untuk menyajikan data pengadaan barang dan jasa pemerintah serta potensi resiko kecurangannya.

Seluruh data yang tersedia di Opentender bersumber dari LKPP. Data tersebut, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan serangkaian indikator Potential Fraud Analysis (PFA) yang dikembangkan oleh ICW (lihat tabel di bawah ini). Dalam platform ini, ICW tidak mengubah data asli dari LKPP untuk menjaga integritas data, melainkan hanya menambah informasi mengenai nilai potensi resiko dalam tiap pengadaan menurut indikator PFA⁷⁶.



⁷³ Ibid. Pasal 18 ayat 6

⁷⁴ Informan 3. OMS. Wawancara Daring. 3 Februari 2021.

⁷⁵ ICW. Opentender.net. <https://www.opentender.net/#/apa-opentender> diakses pada 15 Februari 2021

⁷⁶ Ibid.

Tabel 2.3 Perkembangan Opentender.net

	Spreadsheet	Opentender V1	Opentender V2	Opentender V3
Rilis	2010	Maret 2013	Desember 2017	Desember 2019
Data yang tersedia	<ul style="list-style-type: none"> Tender Peserta Tender 	<ul style="list-style-type: none"> Tender Peserta Tender 	<ul style="list-style-type: none"> Tender Peserta Tender 	<ul style="list-style-type: none"> Tender Tender Cepat E-purchasing Peserta Tender
Indikator PFA	<ul style="list-style-type: none"> Nilai kontrak Jumlah kontrak pemenang 	<ul style="list-style-type: none"> Nilai kontrak Nilai kontrak berbanding HPS Jumlah kontrak pemenang Jumlah penawaran Pengadaan di kuartal 4 untuk Pekerjaan Konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> Nilai kontrak Nilai kontrak berbanding HPS Jumlah kontrak pemenang Jumlah penawaran Pengadaan di kuartal 4 untuk seluruh pengadaan 	<ul style="list-style-type: none"> Nilai kontrak Nilai kontrak berbanding HPS Jumlah kontrak pemenang Jumlah penawaran Pengadaan di kuartal 4 untuk seluruh pengadaan
Fitur	-	<ul style="list-style-type: none"> Top 10 Database Tender Chart Artikel 	<ul style="list-style-type: none"> Top 10 Database Tender Chart Pelaporan Artikel 	<ul style="list-style-type: none"> Top 10 Database tender dan e-purchasing Chart Fungsi pengguna Artikel
Fungsi	menggunakan formula excel	<ul style="list-style-type: none"> Ringkasan tabel Filter dan pencarian paket Sorting dan pagination Export to XLS 	<ul style="list-style-type: none"> Ringkasan tabel Filter dan pencarian paket Sorting dan pagination Export to open formats Geotagging OpenStreetMap API 	<ul style="list-style-type: none"> Ringkasan tabel Filter dan pencarian paket Sorting dan pagination Export to XLS User login untuk pelaporan, komentar, unggah foto pemantauan, up/down vote
Backend	-	PHP, Javascript dan Drupal	CodeIgniter framework	Django framework

Dalam menilai potensi risiko kecurangan, Opentender.net V1 hingga V3 menggunakan 5 indikator, yaitu⁷⁷:

1. nilai kontrak, di mana semakin tinggi nilai kontrak sebuah pengadaan berarti resikonya semakin besar
2. monopoli, yaitu berapa banyak pengadaan yang dimenangkan oleh perusahaan dalam satu tahun anggaran, semakin banyak proyek yang dimenangkan maka resikonya semakin besar
3. penghematan, yaitu perbandingan nilai kontrak dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); belajar dari hasil kajian ICW tentang pola kecurangan PBJ perbedaan yang semakin tipis kerap mengindikasikan terjadinya kolusi
4. partisipasi, yaitu jumlah penawaran yang masuk dalam suatu pengadaan; semakin sedikit jumlah perusahaan yang memberi penawaran maka resikonya semakin besar
5. waktu, yaitu resiko tinggi pada pengadaan yang dilakukan pada kuartal empat; pengadaan yang dilakukan menjelang akhir tahun kerap mengindikasikan upaya menghabiskan anggaran dengan proses yang terburu-buru.

Berdasarkan 5 indikator tersebut, ICW memberikan nilai resiko pada tiap pengadaan dengan rentang total antara 1 hingga 20, di mana nilai pengadaan dengan nilai PFA mendekati 20 berarti memiliki potensi kecurangan yang semakin tinggi⁷⁸.

2.3 Indikator Penilaian Kuantitatif

Untuk menelaah data pengadaan dari 2011 sampai 2020, peneliti menggunakan 5 dimensi yang terdiri dari 16 indikator yang merujuk dari Open Contracting Data Standard (OCDS): *Redflags to OCDS Mapping*⁷⁹, *Use case guide: Indicators linked to OCDS*⁸⁰, *Indicators procurement market*⁸¹, dan

⁷⁷ Opentender.net. <https://www.opentender.net/#/apa-opentender> diakses pada 10 Februari 2021

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Open Contracting Partnership. Redflags to OCDS Mapping. <https://www.open-contracting.org/resources/red-flags-integrity-giving-green-light-open-data-solutions/> diakses pada 2 Januari 2021

⁸⁰ Open Contracting Partnership. Use case guide: Indicators linked to OCDS. <https://www.open-contracting.org/resources/using-it/> diakses pada 2 Januari 2021.

⁸¹ Open Contracting Partnership. Indicator to Diagnose the Performance of a Procurement Market. <https://www.open-contracting.org/resources/indicators-to-diagnose-the-performance-of-a-procurement-market/> diakses pada 2 Januari 2021

*Opentender red flag*⁸². Mengenai 5 dimensi dan indikator dijabarkan sebagai berikut:

Kompetisi⁸³ dan Kesempatan Pasar⁸⁴

Dimensi ini digunakan untuk memahami tingkat kompetisi dalam pasar pengadaan di suatu institusi dan pasar yang memiliki konsentrasi tinggi⁸⁵. Dimensi ini terdiri dari:

1. Konsentrasi Pasar⁸⁶

Indikator ini digunakan untuk mengetahui konsentrasi penyedia di suatu pasar pengadaan. Rumus yang digunakan adalah Herfindahl-Hirschman Index (HHI) yang indikatornya antara 0 sampai 10.000, dimana nilai HHI kurang dari 1.500 diartikan pasar yang kompetitif, 1500 - 2.500 dikatakan pasar dengan konsentrasi sedang (cukup kompetitif), dan yang melebihi 2.500 mengindikasikan tingkat konsentrasi pasar yang tinggi (kurang kompetitif)⁸⁷.

rumus yang digunakan untuk menghitung HHI adalah

Untuk tiap pasar:

$$HHI = \sum MS^2 \quad MS = \frac{\text{Total value awarded for each firm}}{\text{Total value awarded in the market}} * 100$$

2. Top 10 Penyedia

Indikator ini digunakan untuk mengetahui siapa pemain terbesar dalam pasar pengadaan⁸⁸ berdasarkan 2 hal, yaitu:

- Top Penyedia dari segi jumlah pengadaan yang dimenangkan (10 Penyedia dengan jumlah pengadaan tertinggi)

⁸² Opentender.net. <https://www.opentender.net/#/apa-opentender> diakses pada 22 Februari 2021

⁸³ Open Contracting Partnership. Indicator to Diagnose the Performance of a Procurement Market. <https://www.open-contracting.org/resources/indicators-to-diagnose-the-performance-of-a-procurement-market/> diakses pada 2 Januari 2021

⁸⁴ Open Contracting Partnership. Use case guide: Indicators linked to OCDS. <https://www.open-contracting.org/resources/using-it/> diakses pada 2 Januari 2021

⁸⁵ Open Contracting Partnership. Indicator to Diagnose the Performance of a Procurement Market. <https://www.open-contracting.org/resources/indicators-to-diagnose-the-performance-of-a-procurement-market/> diakses pada 2 Januari 2021

⁸⁶ Investopedia. Herfindahl-Hirschman Index. <https://www.investopedia.com/terms/h/hhi.asp> diakses pada 18 Februari 2021

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Open Contracting Partnership. Use case guide: Indicators linked to OCDS. <https://www.open-contracting.org/resources/using-it/> diakses pada 2 Januari 2021

- Top Penyedia dari segi nilai kontraknya (10 Penyedia dengan jumlah nilai kontrak tertinggi)

Kalkulasi akan saling memperkaya dengan indikator berikutnya, yaitu persentase kontrak yang diberikan kepada Top 10 penyedia.

Untuk menghitung indikator ini, data yang diperlukan adalah data pemenang berdasarkan jumlah pengadaan dan jumlah nilai kontrak.

3. Persentase Jumlah Kontrak yang Diberikan kepada Top 10 Penyedia

Indikator ini memperlihatkan persentase jumlah kontrak yang dimenangkan oleh top 10 penyedia dibandingkan dengan jumlah pengadaan yang dilakukan. Persentase jumlah kontrak yang lebih tinggi yang diberikan kepada top 10 penyedia dapat menunjukkan peluang pasar yang lebih tertutup. Indikator ini juga dapat menjelaskan bagaimana konsentrasi kontrak pemerintah yang dihubungkan dengan seberapa inklusif dan kompetitif pasar secara keseluruhan⁸⁹.

4. Jumlah Penyedia yang Baru Pertama Kali Memenangkan Kontrak (Penyedia Baru)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak penyedia baru yang masuk ke dalam pasar pengadaan pemerintah. Jumlah penyedia baru (pertama kali) yang lebih tinggi dapat menunjukkan keterbukaan sistem yang lebih besar dan potensi persaingan. Penyedia baru juga dapat menunjukkan kepercayaan yang meningkat pada sistem pengadaan pemerintah⁹⁰.

Data yang dibutuhkan untuk menganalisis indikator ini adalah daftar perusahaan yang pernah memenangkan pengadaan pemerintah kemudian dilihat pada tahun berapa penyedia tersebut pertama kali memenangkan pengadaan pemerintah.

5. Perbandingan antara Penyedia Baru dengan Seluruh Penyedia

Persentase yang lebih tinggi dari penyedia baru (pertama kali) dapat menunjukkan keterbukaan sistem yang lebih besar dan potensi persaingan⁹¹.

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Ibid.

Data yang dibutuhkan untuk menghitung indikator ini adalah daftar perusahaan yang pernah memenangkan pengadaan pemerintah pertama kali dan data seluruh perusahaan yang memenangkan pengadaan pemerintah.

6. Persentase Pertumbuhan Penyedia Baru di Setiap K/L/PD

Jumlah penyedia baru (pertama kali) yang lebih tinggi dapat menunjukkan keterbukaan sistem yang lebih besar dan potensi persaingan. Penyedia baru juga dapat menunjukkan kepercayaan yang meningkat pada sistem kontrak pemerintah. Sebagai catatan, diperlukan informasi historis dari setidaknya dua periode untuk dapat melakukan analisa menggunakan indikator ini⁹². Pertumbuhan penyedia baru dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Penyedia Baru}_t = \frac{\text{Penyedia Baru}_t - \text{Penyedia Baru}_{t-1}}{\text{Penyedia Baru}_{t-1}} * 100$$

Internal Efisiensi

Dimensi ini digunakan untuk mengetahui institusi dengan waktu tender pendek dan panjang, serta institusi yang memiliki jumlah tender yang dibatalkan tertinggi.

1. Persentase Jumlah Tender Gagal

Indikator ini memperlihatkan persentase tender yang dibatalkan oleh pemerintah. Nilai yang besar pada indikator ini dapat menyiratkan adanya inefisiensi dalam pengadaan pemerintah. Data yang dipergunakan untuk melihat indikator ini adalah jumlah tender yang dibatalkan dibandingkan dengan seluruh tender kemudian dikali 100%⁹³.

2. Durasi antara Tanggal Pengumuman Tender dan Tanggal Penetapan Pemenang

Indikator ini ingin melihat durasi dari tiap tender pemerintah. Durasi tender yang sangat pendek dapat mengindikasikan waktu yang sempit

⁹² Ibid.

⁹³ Open Contracting Partnership, Indicator to Diagnose the Performance of a Procurement Market, <https://www.open-contracting.org/resources/indicators-to-diagnose-the-performance-of-a-procurement-market/> diakses pada 2 Januari 2021

untuk memasukkan penawaran dan dapat mengurangi kompetisi, sedangkan durasi yang terlalu panjang juga dapat mengindikasikan inefisiensi dalam sebuah proses pengadaan⁹⁴.

Data yang digunakan dalam menghitung hal ini adalah tanggal akhir tender dan tanggal pengumuman tender.

Nilai Manfaat Uang

1. Persentase Nilai Kontrak di Atas HPS

Persentase biaya yang lebih tinggi pada kontrak yang melebihi anggaran dapat menandakan proses kontrak yang tidak efisien dan memiliki nilai manfaat uang yang lebih rendah. Informasi tentang pembengkakan biaya penting untuk menganalisis efisiensi secara keseluruhan⁹⁵. Untuk menghitung indikator ini, diperlukan data harga perkiraan sendiri dan nilai kontrak. Persentase Nilai Kontrak di Atas HPS dirumuskan sebagai berikut:

Selisih = Nilai Kontrak - HPS

Jika Selisih > 0, maka sebuah kontrak tersebut nilainya melebihi HPS Kontrak yang selisihnya lebih dari nol dihitung Persentase kelebihan dengan HPS nya dengan rumus:

$$\text{Persentase Overruns} = \frac{\text{Nilai Kontrak} - \text{HPS}}{\text{HPS}} * 100$$

2. Persentase Nilai Kontrak di Bawah HPS (Penghematan)

Persentase penghematan yang lebih tinggi dapat menunjukkan nilai uang yang lebih baik. Nilai uang semakin baik ketika pemerintah dapat membeli barang/jasa berkualitas yang dibutuhkan dengan harga lebih rendah dan dengan demikian menghasilkan penghematan. Umumnya, semakin tinggi persaingan, semakin rendah harga, dan semakin tinggi nilai uang⁹⁶. Untuk menghitung indikator ini, diperlukan data harga perkiraan sendiri dan nilai kontrak.

⁹⁴ Ibid

⁹⁵ Ibid

Selisih = Nilai Kontrak - HPS

Jika Selisih < 0, maka sebuah kontrak tersebut nilainya kurang dari HPS atau Penghematan Kontrak yang mengalami penghematan kemudian dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Penghematan} = \frac{\text{HPS} - \text{Kontrak}}{\text{HPS}} * 100$$

Integritas Publik

1. Persentase Jumlah Tender dengan Informasi RUP

Persentase yang lebih tinggi dari pengadaan yang memiliki rencana pengadaan mencerminkan transparansi yang dapat meningkatkan integritas proses pengadaan. Informasi perencanaan seperti rencana pengadaan memberikan visi yang lebih kuat tentang proses kontrak yang dimaksudkan, dan oleh karena itu merupakan bagian penting dari transparansi di seluruh proses kontrak⁹⁷. Data yang diperlukan untuk menghitung indikator ini adalah kode rencana umum pengadaan.

2. Persentase Jumlah Tender dengan Judul kurang dari 20 Karakter

Persentase tender dengan judul yang kurang jelas dapat menandakan kurangnya integritas. Judul tender yang pendek atau tidak deskriptif mengurangi kesempatan bagi calon penawar untuk menemukan dan memahami pengumuman tersebut. Hal ini dapat menyebabkan lebih sedikit calon penawar yang memilih untuk menawar⁹⁸. Data yang digunakan adalah judul tender.

3. Persentase Jumlah Tender dengan Keterangan kurang dari 60 Karakter

Persentase tender tanpa deskripsi jelas yang lebih tinggi dapat menandakan kurangnya integritas. Deskripsi tender yang singkat atau tidak deskriptif mengurangi kesempatan calon penawar untuk menemukan dan memahami pengumuman tersebut. Hal ini dapat menyebabkan lebih sedikit calon penawar yang memilih untuk menawar⁹⁹. Data yang digunakan adalah deskripsi tender yang tersedia di database rencana pengadaan.

⁹⁶ Open Contracting Partnership. Use case guide: Indicators linked to OCDS. <https://www.open-contracting.org/resources/using-it/> diakses pada 2 Januari 2021

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Ibid.

4. Persentase Jumlah Tender tanpa Informasi Jenis Pengadaan

Persentase tender yang tidak memiliki informasi jenis pengadaan lebih tinggi, dapat menandakan kurangnya integritas. Informasi mengenai jenis pengadaan yang tidak tersedia mengurangi kesempatan bagi calon penawar untuk menemukan dan memahami pengumuman tersebut. Hal ini dapat menyebabkan lebih sedikit calon penawar yang memilih untuk menawar¹⁰⁰. Jenis pengadaan yang dimaksud dalam konteks Indonesia adalah apakah pengadaan berupa barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi atau jasa lainnya¹⁰¹.

Red Flag

1. Pengadaan dengan Nilai Kontrak Tertinggi

Berdasarkan kajian atas pengadaan barang dan jasa yang pernah dilakukan oleh ICW, pengadaan dengan nilai besar cenderung memiliki potensi kecurangan yang lebih tinggi¹⁰². Data yang digunakan dalam perhitungan ini adalah Nilai Kontrak.

2. Pengadaan di Kuartal ke-4

Pengadaan di kuartal keempat dengan tahun anggaran tunggal, memiliki potensi penyimpangan yang lebih besar¹⁰³. Untuk menganalisis indikator ini, peneliti terlebih dahulu memilah data dan tidak mengikutsertakan pengadaan dengan kriteria berikut:

1. Pengadaan dengan tahun jamak
2. Pengadaan yang dilakukan mendahului tahun anggaran

Sehingga data yang dipergunakan adalah pengadaan di kuartal empat dengan tahun tunggal.

Indikator ini digunakan berdasarkan hasil kajian ICW dan pemantauan pengadaan yang dilakukan. Seringkali pengadaan di kuartal empat dikaitkan dengan menghabiskan anggaran dan cenderung pengadaannya tidak memiliki perencanaan¹⁰⁴. Data yang digunakan adalah tanggal pengumuman tender.

¹⁰⁰ Ibid.

¹⁰¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pasal 3 ayat 1

¹⁰² Opentender.net, <https://www.opentender.net/#/apa-opentender> diakses pada 22 Februari 2021

¹⁰³ Ibid.

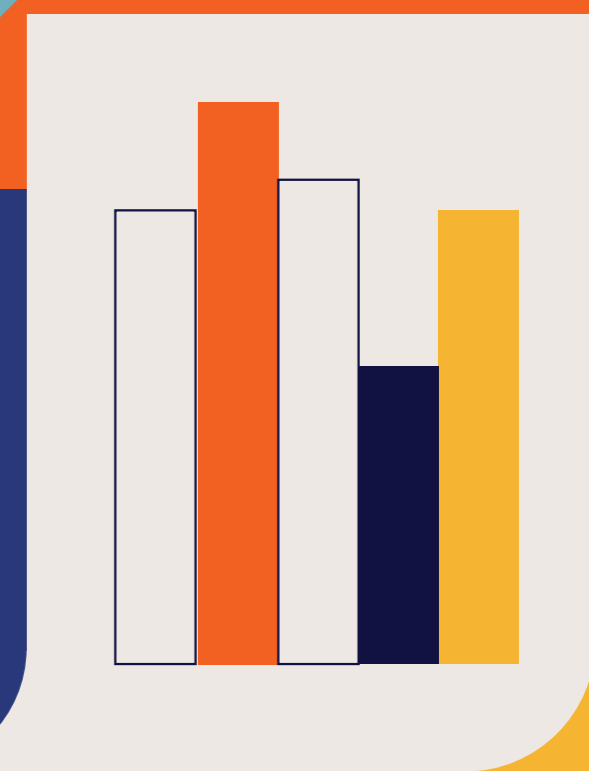
¹⁰⁴ Ibid.



BAB

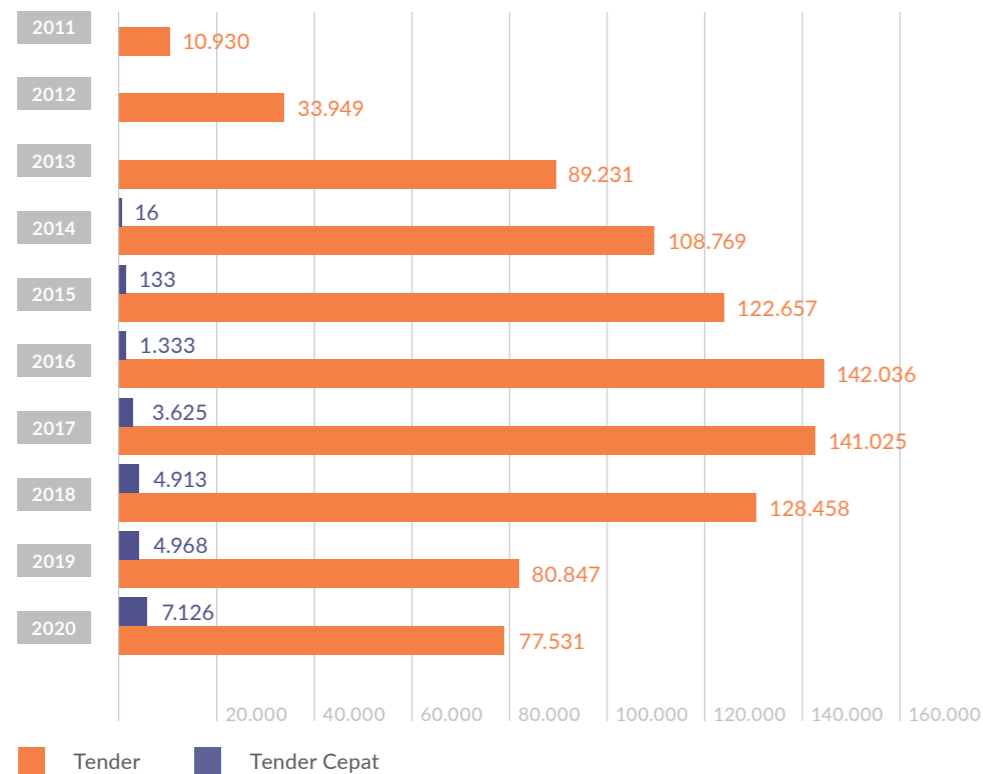
3.

Analisis



3.1 Gambaran Umum

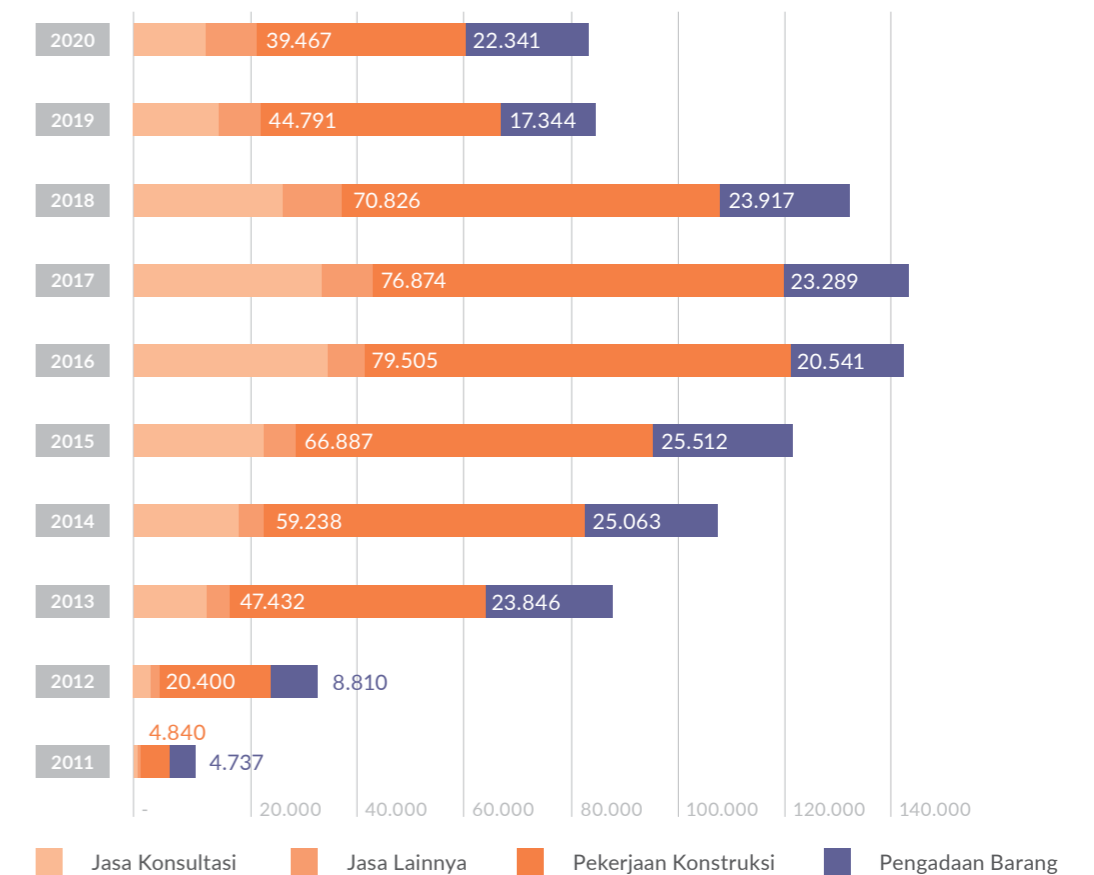
Grafik 3.2 Jumlah Tender Selesai Secara Nasional 2011-2020



Pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan metode tender semakin berkurang jumlahnya (grafik 3.2). Hal ini terjadi karena ada pengembangan metode pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya E-purchasing dan Tender Cepat.

Untuk Tender Cepat, perusahaan yang diundang adalah perusahaan yang sudah terdaftar di Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) dan pekerjaannya bersifat sederhana. Metode penilaiannya pun langsung menggunakan metode harga terendah. Sehingga secara komputerisasi akan langsung dipilih perusahaan yang memberikan penawaran paling rendah. Hal ini menyebabkan jumlah pengadaan yang menggunakan tender cepat tidak terlalu banyak.

Grafik 3.3 Jumlah Tender Selesai Berdasarkan Jenis Pengadaan Secara Nasional 2011-2020



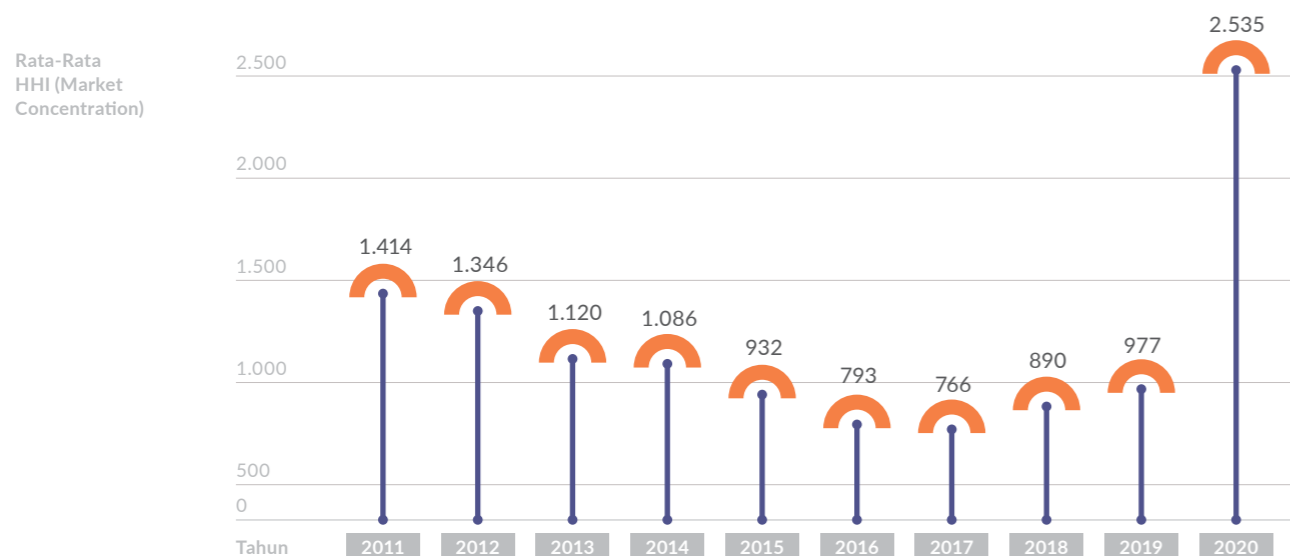
Data diatas menggambarkan jumlah pengadaan berdasarkan jenisnya menggunakan metode tender dan tender cepat. Untuk seterusnya dalam kajian ini, data tender yang digunakan adalah gabungan dari tender cepat dan tender, kecuali untuk analisis yang terkait dengan durasi tender.

Grafik 3.3 memperlihatkan bahwa sebagian besar pengadaan di tiap tahun, berdasarkan jumlah pengadaannya, terkait dengan pekerjaan konstruksi yaitu rata - rata 53,3% per tahun. Kemudian diikuti oleh jasa Konsultansi dengan rata - rata 19,8% per tahun. hal ini disebabkan seringkali pekerjaan konstruksi juga diikuti dengan tender konsultan sebagai pengawas atau mungkin untuk riset awal. sayangnya di Indonesia belum ada kode atau parameter yang menggabungkan antara pekerjaan konstruksi dengan konsultansi di satu ranah pengadaan yang sama.

3.2 Kompetisi dan Kesempatan pasar

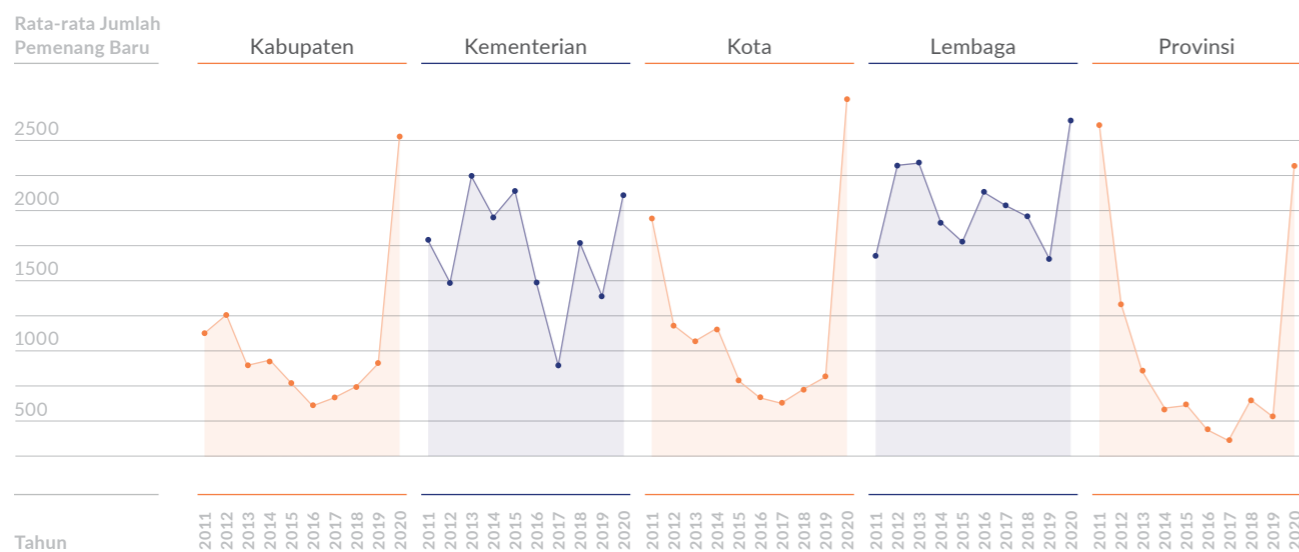
3.2.1 Konsentrasi Pasar

Grafik 3.5 Rata - Rata Tingkat Konsentrasi Pasar Secara Nasional 2011 - 2020



Grafik 3.5 menunjukkan bahwa secara nasional, konsentrasi pasar memiliki tren penurunan dari tahun 2011 sampai 2019, namun mengalami peningkatan signifikan di tahun 2020. Artinya, tingkat kompetisi semakin baik pada 2011-2019, namun rendah di tahun 2020 dengan nilai HHI¹⁰⁵ mencapai 2.535.

Grafik 3.6 Rata - Rata Tingkat Konsentrasi Pasar Berdasarkan Jenis K/L/PD



¹⁰⁵ Nilai HHI yang semakin tinggi memiliki arti bahwa PBJ terkonsentrasi di beberapa perusahaan. Misalnya, jika nilai HHI 10,000 (maksimal) berarti 1 perusahaan. Jika nilai HHI mendekati 0 berarti tingkat kompetisi tinggi (tidak ada konsentrasi).

Sedangkan grafik 3.6 menunjukkan Kabupaten dan Kota cenderung memiliki tingkat kompetisi yang tinggi, sebab dalam rentang waktu 2011 - 2019, nilai HHI berkisar antara 500 - 1000. Walaupun, serupa dengan pola Nasional, mengalami peningkatan pada 2020 dengan nilai HHI lebih dari 2500. Meskipun pada 2010-2020 memiliki tingkat kompetisi yang tinggi, namun ada beberapa Kabupaten dan Kota yang memiliki tingkat kompetisi yang sangat rendah, misalnya pada 2020 terdapat 61 Kabupaten/ Kota dengan index HHI mencapai 10.000 atau maksimal.

Penurunan index HHI pada 2011 sampai 2019 di tataran nasional (chart 3.5) maupun di masing-masing jenis instansi (chart 3.6), mengindikasikan rendahnya konsentrasi pasar. Artinya, pasar pengadaan barang/ jasa pemerintah semakin kompetitif. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa kebijakan pemerintah di pengadaan yang membuat pengadaan semakin terbuka dan mudah diakses oleh dunia usaha, misalnya dengan penerapan sejumlah sistem. Pada 2010, pemerintah memperkenalkan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dan membuat target tahunan bagi entitas pengadaan untuk menerapkan sistem e-procurement dalam 4 tahun ke depan (hingga 2014). Konsentrasi pasar mungkin tinggi di tahun-tahun awal karena penyedia tidak mengetahui sistem baru. Pada 2011, LKPP membuat peraturan khusus tentang Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang harus dibuat oleh semua instansi pemerintah sebelum melakukan tender. Kemudian pada 2012, pemerintah mewajibkan untuk mempublikasi RUP ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) di mana perusahaan dapat menemukan peluang pengadaan publik yang akan datang atau yang direncanakan. Dengan demikian, memungkinkan lebih banyak waktu persiapan bagi penyedia untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan publik

Di sisi lain, peningkatan index HHI pada 2020 secara nasional (grafik 3.5) maupun per masing - masing jenis instansi (grafik 3.6) artinya pasar semakin kurang kompetitif. Hal ini mungkin salah satu dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020, 8,76% perusahaan berhenti beroperasi dan 24,31% beroperasi dengan mengurangi kapasitas¹⁰⁶. Survei lain yang dilakukan oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) kepada Konsultan, menunjukkan bahwa 27% perusahaan tutup akibat dampak Covid-19¹⁰⁷. Akibat kondisi seperti ini, hanya perusahaan dengan modal besar yang mampu bertahan untuk menjadi calon penyedia di tengah pandemi.

¹⁰⁶ BPS. Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha. <https://www.bps.go.id/publication/2020/09/15/9efe2fbda7d674c09ffd0978/analisis-hasil-survei-dampak-covid-19-terhadap-pelaku-usaha.html> diakses pada 25 Februari 2021

¹⁰⁷ INKINDO. Survei Dampak Covid-19 Terhadap Konsultan. <https://www.inkindo.org/informasi-publik/survei-covid-19> diakses pada 25 Februari 2021

Lebih lanjut, peneliti juga mencoba melihat beberapa contoh K/L/PD yang memiliki HHI rendah, artinya sangat kompetitif, diantaranya:

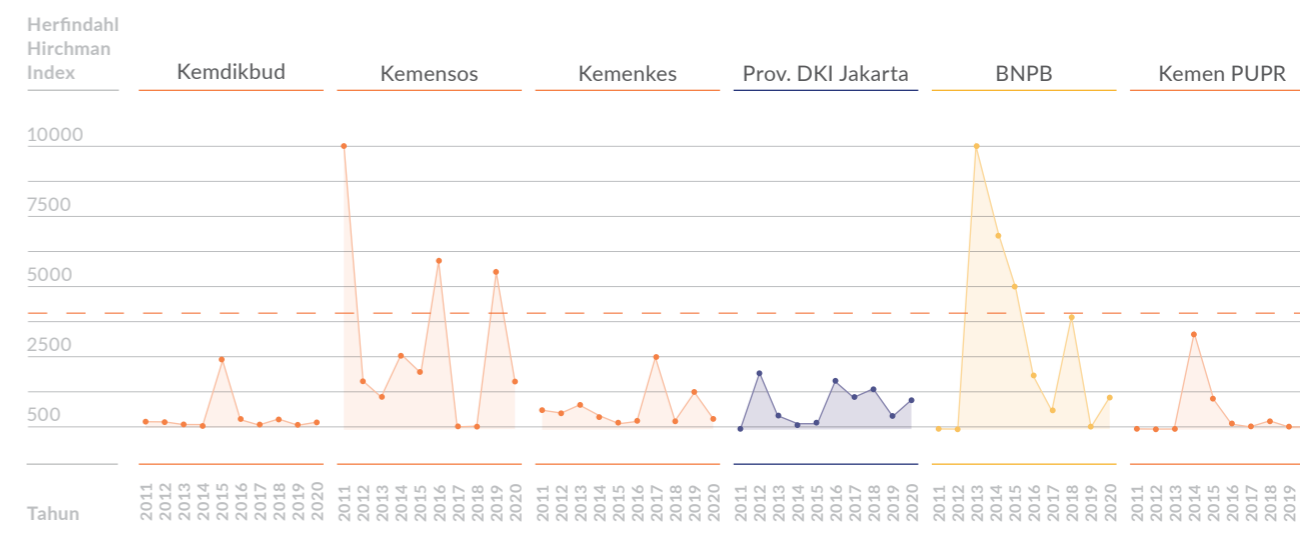
Tabel 3.1 Instansi dengan Rata - Rata Tingkat Konsentrasi Pasar Rendah

Nama Instansi	Tahun	HHI	Jenis K/L/PD	Jumlah Paket
Provinsi Sumatera Utara	2011	78,30	Provinsi	208
Arsip Nasional Republik Indonesia	2012	27,48	Lembaga	2.313
Kementerian Perhubungan	2013	66,76	Kementerian	1.160
Arsip Nasional Republik Indonesia	2014	43,95	Lembaga	2.612
Arsip Nasional Republik Indonesia	2015	54,979	Lembaga	2.249
Kota Medan	2016	50,81	Kota	384
Kementerian Perhubungan	2017	36,04	Kementerian	3.739
Kementerian Pertahanan	2018	42,53	Kementerian	964
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019	86,02	Kementerian	816
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2020	19,17	Kementerian	5.147

Dari tabel diatas (tabel 3.1), Provinsi Sumatera Utara pada 2011 memiliki tingkat kompetisi yang tinggi ditunjukkan dengan nilai HHI yang rendah. Namun hal ini tidak sejalan dengan fenomena kasus korupsi yang terjadi di Sumatera Utara. Pada tahun yang sama, Provinsi Sumut masuk dalam 10 wilayah dengan kasus korupsi terbanyak dengan jumlah 23 kasus¹⁰⁸ sekalipun kasus tersebut tidak seluruhnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Hal ini mengindikasikan tidak ada hubungan langsung antara tingkat konsentrasi pasar dengan korupsi.

Secara lebih spesifik, jika dibandingkan di antara 6 K/L/PD dalam grafik di bawah ini, yakni Kemendikbud RI, Kemensos RI, Kemenkes RI, Provinsi DKI Jakarta, BNPB dan KemenPUPR RI, maka Kemensos RI dan BNPB memiliki kecenderungan kurang kompetitif di tahun - tahun tertentu.

Grafik 3.8 Rata - rata Tingkat Konsentrasi Pasar berdasarkan 6 K/L/PD



Atas temuan ini, peneliti mencoba melihat lebih jauh ke data pengadaan yang terdapat dalam 2 instansi tersebut. Hasilnya, jumlah pengadaan Kemensos sangat sedikit yang terdokumentasi. Dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, rata - rata pengadaan setiap tahunnya hanya 7 pengadaan. Hal ini kemungkinan terjadi karena, pertama, proses penarikan data yang dilakukan oleh LKPP tidak sempurna, sehingga ada kemungkinan data yang hilang. Kedua, Kementerian Sosial tidak melaporkan datanya ke dalam sistem. Sebagai Informasi, mulai tahun 2019, kementerian Sosial tidak menggunakan LPSE-nya sendiri, namun menumpang di LPSE Kementerian Keuangan. hal ini mengindikasikan kurangnya kapasitas dan sumber daya manusia untuk mengelola pengadaan secara mandiri.

Sedangkan untuk BNPB, data pengadaan baru tersedia sejak 2013. Jumlah pengadaan di tahun 2013 - 2015 hanya mencapai 11 pengadaan. Namun pada 2016 meningkat hingga 102, 2017 mencapai 449 pengadaan, kemudian menurun pada 2018 sebanyak 99 pengadaan, 2019 tidak ada data pengadaan dan 2020 sebanyak 20 pengadaan. Jumlah pengadaan yang relatif kecil di BNPB sangat berpengaruh pada nilai konsentrasi pasar. Selain itu, kegiatan pengadaan di BNPB belum berjalan optimal. hal ini terlihat dari jumlah pengadaan yang fluktuatif dari tahun ke tahun.

¹⁰⁸ ICW. 2011. Tren Penindakan Kasus Korupsi 2011. https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/trenkorupsiakhirtahun2011_0.pdf diakses pada 12 Maret 2021

3.2.2 Top 10 Penyedia

Tabel 3.2 Top 10 Penyedia Secara Nasional 2011 - 2020

Berdasarkan Jumlah Pengadaan			Berdasarkan Jumlah Nilai Kontrak		
Nama Penyedia	Jumlah	Total Nilai Kontrak (Milyar Rupiah)	Nama Penyedia	Jumlah	Total Nilai Kontrak (Triliun Rupiah)
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA . Tbk	664	5.173,16	PT. NINDYA KARYA (Persero)	196	25,08
PT. RAJAWALI NUSINDO	615	2.021,05	PT. Waskita Karya (Persero)	161	23,34
PT. ALOCITA MANDIRI	590	186,43	PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk	169	21,33
PT. INTIMULYA MULTIKENCANA	514	552,18	PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.	68	19,11
PT. Inasa Sakha Kirana	473	170,72	PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	95	16,01
PT. FASADE KOBETAMA INTERNASIONAL	461	184,15	PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)	86	14,21
PT. DAYA CIPTA DIANRANCANA	450	612,25	PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero)	106	13,85
PT. Indofarma Global Medika	441	4.160,50	PT Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk	24	9,62
PT. HEGAR DAYA	409	303,31	PT. Brantas Abipraya (Divisi 2)	15	6,85
PT PURA BARUTAMA	387	1.140,97	PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk	39	5,83

Tabel 3.2 memperlihatkan:

- 3 dari 10 perusahaan yang paling banyak mendapatkan pengadaan berasal dari Badan usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Telekomunikasi Indonesia, PT Rajawali Nusindo, dan PT Indofarma Global Medika. Sedangkan 7 lainnya merupakan perusahaan swasta.
- 9 dari 10 dengan jumlah nilai kontrak paling banyak merupakan BUMN, dan 1 perusahaan merupakan BUMD DKI Jakarta yang seluruhnya bergerak di bidang jasa konstruksi. Untuk PT Pembangunan Perumahan

dan PT Brantas Abipraya, masing-masing tercantum dua kali dalam daftar ini karena keduanya menggunakan NPWP yang berbeda, sehingga dihitung sebagai entitas yang berbeda.

- Menurut penjelasan Ichwan Makmur Nasution, Kepala Subdit Dukungan Penegakan Hukum, memang banyak perusahaan konstruksi BUMN yang mengikuti tender dibandingkan dengan konstruksi swasta besar. Meskipun ada perusahaan konstruksi swasta, namun bukan saingan BUMN. Hal ini menurutnya juga perlu diteliti lebih jauh, mengapa banyak perusahaan konstruksi swasta besar tidak mengikuti tender pemerintah¹⁰⁹.
- Hal serupa juga disampaikan oleh Fajar Adi Hemawan, Analis Kebijakan Madya pada Direktorat Pengembangan SPSE, mengapa swasta tidak mendominasi karena banyak yang mengikuti tender tapi bukan saingannya BUMN, sedangkan perusahaan pekerjaan konstruksi swasta yang sekelas BUMN enggan mengikuti tender¹¹⁰.
- Untuk memastikan pernyataan LKPP, salah satu yang dapat dilakukan peneliti adalah melakukan pengecekan data atas perusahaan yang pernah memberikan penawaran dalam tender pekerjaan konstruksi. Sayangnya, saat ini LKPP tidak memiliki data terkait perusahaan yang memberikan penawaran dalam proses tender. sehingga analisis lanjutan tidak dapat dilakukan.
- Jika dilihat dari jenis pengadaanya, maka:
 - Top 10 penyedia berdasarkan jumlah kontrak, di dominasi oleh jasa konsultansi yaitu sebesar 57,61%, diikuti pengadaan barang 27,04%, jasa lainnya 14,97% dan pekerjaan konstruksi 0,38%.
 - top 10 penyedia berdasarkan jumlah nilai kontrak didominasi dengan jenis pekerjaan konstruksi, yaitu sebesar 98,75%, sedangkan pengadaan barang hanya 1,15% dan jasa konsultansi 0,10%.

¹⁰⁹ Ichwan Makmur Nasution. Kepala Subdit Dukungan Penegakan Hukum. Diskusi daring dengan LKPP 2 Maret 2021

¹¹⁰ Fajar Adi Hemawan. Analis Kebijakan Madya pada Direktorat Pengembangan SPSE. Diskusi daring dengan LKPP 2 Maret 2021

Banyaknya perusahaan BUMN yang memenangkan pengadaan pemerintah, ternyata tidak serta merta membuat pengadaan yang dilakukan menjadi rendah potensi penyimpangannya. Beberapa BUMN tersebut juga terlibat dalam kasus korupsi, di antaranya:

1. PT Nindya Karya (persero) merupakan BUMN pertama yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi¹¹¹. PT Nindya Karya ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam korupsi pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai APBN 2006-2011 dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 313 miliar¹¹².
2. PT Waskita Karya melakukan tindak pidana korupsi dengan modus pengerjaan proyek-proyek fiktif yang terjadi di Divisi II PT Waskita Karya antara tahun 2009-2015¹¹³. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksaan Keuangan, total kerugian yang timbul akibat pekerjaan proyek-proyek fiktif itu mencapai Rp 202 miliar. tersangka dalam kasus ini adalah Mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/ Sipil/II PT Waskita Karya Fakhri Usman, eks Kepala Divisi II PT Waskita Karya Fathor Rachman, serta eks Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar
3. PT Adhi Karya terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau Tahun Anggaran 2015-2016. Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan, Adnan bersama dengan Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk I Ketut Suarbawa (IKS) sebagai tersangka. Adnan dan Ketut Suarbawa diduga kongkalikong dalam proyek Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang di Kabupaten Kampar tahun 2015-2016 yang menelan anggaran Rp 117,68 miliar. Akibat dugaan kongkalikong, negara menderita kerugian yang ditaksir mencapai Rp 39,2 miliar¹¹⁴.

¹¹¹ Detik.com. Nindya Karya BUMN Pertama yang Jadi Tersangka Korupsi. <https://news.detik.com/berita/d-3970436/nindya-karya-bumn-pertama-yang-jadi-tersangka-korupsi> diakses pada 8 Maret 2021

¹¹² Kompas.com. Kasus Dermaga Sabang, KPK Periksa Direksi PT Nindya Karya. <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/11/12210951/kasus-dermaga-sabang-kpk-periksa-direksi-pt-nindya-karya> diakses pada 8 Maret 2021

¹¹³ Kompas.com. KPK Sita Uang Rp 12 Miliar dalam Kasus Proyek Fiktif Waskita Karya. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/22/12150921/kpk-sita-uang-rp-12-miliar-dalam-kasus-proyek-fiktif-waskita-karya> diakses pada 8 Maret 2021.

¹¹⁴ JawaPos.com. Kasus Korupsi PT Adhi Karya. KPK Sita Proyek Waterfront City. <https://www.jawapos.com/nasional/politik/07/10/2019/kasus-korupsi-pt-adhi-karya-kpk-sita-proyek-waterfront-city/> diakses pada 8 Maret 2021.

4. PT Brantas Abipraya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan Sudi Wantoko, Direktur Keuangan PT Brantas, sebagai tersangka karena mencairkan anggaran yang penggunaannya tak bisa dipertanggungjawabkan untuk kepentingan pribadi seperti jalan - jalan dan main golf. Dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 6 miliar¹¹⁵.

Peneliti mencoba melihat Top 10 penyedia berdasarkan jenis pengadaannya (barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya).

Tabel 3.3 Top 10 Penyedia di Pengadaan Barang Secara Nasional 2011 - 2020

Berdasarkan Jumlah Pengadaan			Berdasarkan Jumlah Nilai Kontrak		
Nama Penyedia	Jumlah	Total Nilai Kontrak (Milyar Rupiah)	Nama Penyedia	Jumlah	Total Nilai Kontrak (Triliun Rupiah)
PT.RAJAWALI NUSINDO	613	2.015,51	PT. Indofarma Global Medika	441	4.160,57
PT. Indofarma Global Medika	441	4.160,57	PT. Sumberniaga Kharismanusa	40	3.247,48
PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION	271	1.685,84	PT. ARTHA ALAM LESTARI	45	2.577,75
PT. PUTRA KARYA SENTOSA	231	253,02	PT. LEN INDUSTRI (Persero)	54	2.118,05
CV. SOLUSI ARYA PRIMA	228	140,53	PT. TRUTAMA STAR	26	2.032,70
PT. ANUGRAH ARGON MEDICA	188	244,40	PT.RAJAWALI NUSINDO	613	2.015,51
PT PURA BARUTAMA	180	779,32	PT Karunia Cahaya Abadi	18	2.000,47
CV. Harrisma Computer	161	121,12	PT. MITRA SILATAMA SEJAHTERA	28	1.829,02
CV NUGARADA ABADI	159	111	PT. Ridho Agung Mitra Abadi	21	1.793,86
PT. ANZON AUTOPLAZA	158	98,85	PT. Artha Mas Sadhenna	13	1.762,10

Tabel 3.3 menunjukkan, 2 dari 3 perusahaan yang paling banyak mendapatkan kontrak pengadaan BUMN yang bergerak di sektor kesehatan

¹¹⁵ Detik.com. Eks Dirkeu PT Brantas Abipraya Ditetapkan Lagi Jadi Tersangka Korupsi. <https://news.detik.com/berita/d-3554932/eks-dirkeu-pt-brantas-abipraya-ditetapkan-lagi-jadi-tersangka-korupsi> diakses pada 8 Maret 2021

(Indofarma Global Medika & Kimia Farma). Jika mengacu pada jumlah nilai kontrak yang dimenangkan, Penyedia yang paling banyak mendapatkan jumlah nilai kontrak adalah PT Indofarma Global Medika dengan jumlah nilai kontrak Rp 4.160,57 Triliun yang merupakan BUMN di sektor kesehatan. Hal ini menunjukkan, penyedia barang yang banyak memenangkan pengadaan pemerintah masih didominasi oleh BUMN, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan dibidang farmasi.

Tabel 3.4 Top 10 Penyedia di Pekerjaan Konstruksi Secara Nasional 2011 - 2020

Berdasarkan Jumlah Pengadaan			Berdasarkan Jumlah Nilai Kontrak		
Nama Penyedia	Jumlah	Total Nilai Kontrak (Milyar Rupiah)	Nama Penyedia	Jumlah	Total Nilai Kontrak (Triliun Rupiah)
PT. NINDYA KARYA (Persero)	196	25.079,87	PT. NINDYA KARYA (Persero)	196	25.079,87
PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk	162	21.083,52	PT. Waskita Karya (Persero)	159	23.277,33
PT. Waskita Karya (Persero)	159	23.277,33	PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk	162	21.083,52
CV. RIAPRIMA PUTRI AMBAR	147	158,95	PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.	68	19.112,53
PT. NAMBUR MARLATA	129	139,64	PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	92	15.923,63
PT. ARMADA HADA GRAHA	116	1097,11	PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)	86	14.207,06
PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero)	106	13.852,95	PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero)	106	13.852,95
CV INSUN MEDAL LESTARI	96	83,70	PT Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk	24	9.616,30
PT. SANUR JAYA UTAMA	95	838,51	PT. Brantas Abipraya (Divisi 2)	15	6.850,40
PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	92	15.923,63	PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk	39	5.828,59

Tabel 3.4 memperlihatkan, setengah dari perusahaan yang mendapatkan kontrak terbanyak di Pekerjaan Konstruksi adalah BUMN (Nindya Karya, Adhi Karya, Waskita Karya, Brantas Abipraya, Pembangunan perumahan). Sedangkan sisanya adalah perusahaan swasta. Jika melihat dari jumlah nilai

kontraknya, maka 9 perusahaan penyedia adalah BUMN dan 1 penyedia adalah BUMD. Pola ini serupa dengan Top 10 secara nasional yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Hal ini memperlihatkan bahwa pengadaan konstruksi sangat didominasi oleh BUMN. padahal jika mengacu data Badan Pusat Statistik tahun 2020, setidaknya terdapat 1.541 perusahaan konstruksi dengan kategori besar¹¹⁶ yang sangat potensial menggarap pengadaan pemerintah. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengapa perusahaan kurang antusias untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.

Tabel 3.5 Top 10 Penyedia di Jasa Konsultansi Secara Nasional 2011 - 2020

Berdasarkan Jumlah Pengadaan			Berdasarkan Jumlah Nilai Kontrak		
Nama Penyedia	Jumlah	Total Nilai Kontrak (Milyar Rupiah)	Nama Penyedia	Jumlah	Total Nilai Kontrak (Triliun Rupiah)
PT. ALOCITA MANDIRI	589	185,89	PT. DAYA CIPTA DIANRANCANA	448	608,99
PT. INTIMULYA MULTIKENCANA	510	548,11	PT. INTIMULYA MULTIKENCANA	510	548,11
PT. Inasa Sakha Kirana	471	170,38	PT. Rayakonsult	148	535,62
PT. FASADE KOBETAMA INTERNASIONAL	449	169,05	PT. Virama Karya (Persero)	101	532,44
PT. DAYA CIPTA DIANRANCANA	448	608,99	PT. ANUGERAH KRIDAPRADANA	235	497,02
PT. HEGAR DAYA	406	296,44	PT. Indra Karya (Persero) Wilayah I	72	464,40
PT. Munasa Kreasi Nusantara	383	147,99	PT. PERENTJANA DJAJA	157	462,62
PT. Gumilang Sajati	357	119,40	PT INAKKO Internasional Konsulindo	141	447,53
PT. PURI DIMENSI	356	286,95	PT. YODYA KARYA (PERSERO)	131	410,04
PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT	333	85,74	PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan	152	356,95

¹¹⁵ Badan Pusat Statistik, Perusahaan Konstruksi di Indonesia, diakses pada 30 Agustus 2021, <https://www.bps.go.id/indicator/4/216/1/banyaknya-perusahaan-konstruksi.html>

Tabel 3.5 memperlihatkan bahwa PT Alocita Mandiri menjadi perusahaan yang paling banyak memenangkan pengadaan pemerintah, namun dari segi jumlah nilai kontrak, PT Daya Cipta Dianrancana menjadi yang paling banyak dengan nilai RP 608,99 Miliar.

Tabel diatas juga menunjukkan, seluruh perusahaan yang masuk ke dalam Top 10 adalah Jasa Konsultansi Badan Usaha untuk proyek konstruksi. Sayangnya, tender jasa konsultansi tidak memiliki kode unik untuk menghubungkannya dengan proyek konstruksi sesuai dengan definisi Open Contracting Data Standard (OCDS).

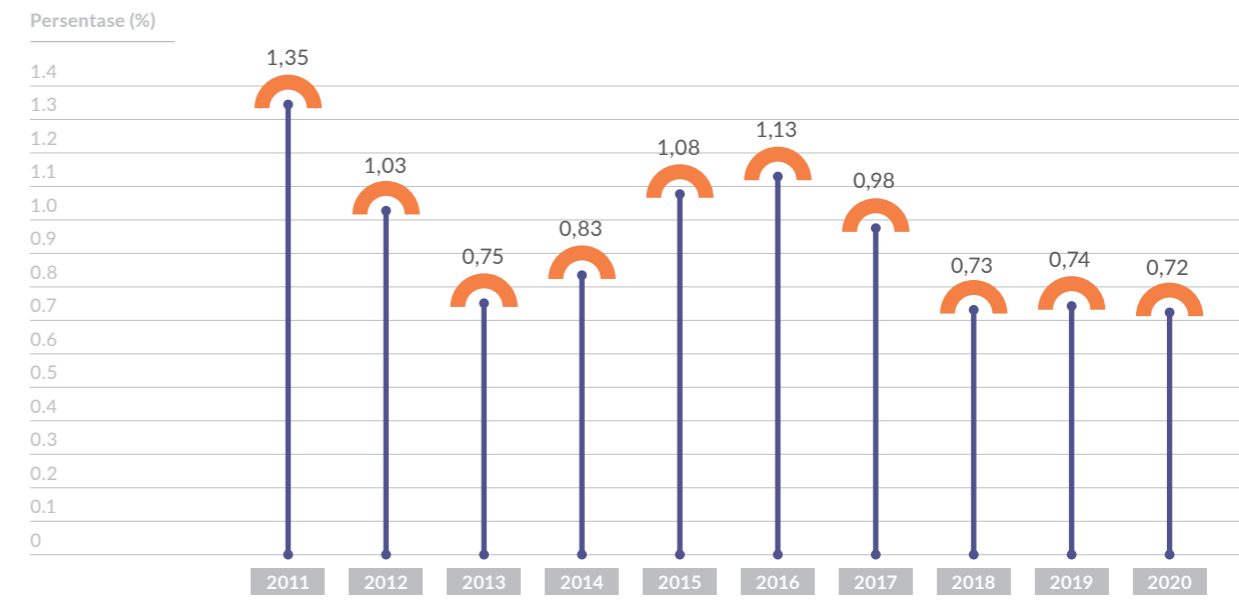
Tabel 3.6 Top 10 Penyedia di Jasa Lainnya

Berdasarkan Jumlah Pengadaan			Berdasarkan Jumlah Nilai Kontrak		
Nama Penyedia	Jumlah	Total Nilai Kontrak (Milyar Rupiah)	Nama Penyedia	Jumlah	Total Nilai Kontrak (Triliun Rupiah)
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA . Tbk	521	3.924,89	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA . Tbk	521	3.924,8
PT PURA BARUTAMA	207	361,64	PT. JASUINDO TIGA PERKASA TBK	148	3.697,80
PT. JASUINDO TIGA PERKASA TBK	148	3.697,80	PT. WAHYU KARTUMASINDO INTERNATIONAL	8	2.788,41
PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967	133	163,89	PT. ASI Pudjiastuti Aviation	128	1.355,77
UD. MONTECARLO	132	68,95	PT. Indoaluminium Intikarsa Industri	2	1.069,44
PT. ASI Pudjiastuti Aviation	128	1.355,77	PERUM PERURI (Perum Percetakan Uang RI)	27	1.039,59
Karsa Wira Utama	127	131,61	INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (INKOPPOL)	25	891,92
PT. KIMIA FARMA DIAGNOSTIKA	95	131,48	PT. (PERSERO) SUCOFINDO	38	663,70
PT.BAKRI KARYA SARANA	95	140,32	PT. SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)	35	587,72
PT. Baliwong Indonesia	94	67,08	PT. CITRABARU ADINUSANTARA	59	543,20

Berdasarkan tabel 3.6, PT Telekomunikasi Indonesia yang merupakan BUMN yang paling banyak mendapatkan kontrak dan paling besar nilai kontraknya dalam 10 tahun terakhir dengan jumlah 521 kontrak dan nilai Rp 3.924,89 Miliar. Hal ini tidak mengherankan, karena PT Telekomunikasi Indonesia merupakan BUMN yang memonopoli pasar jasa komunikasi di Indonesia.

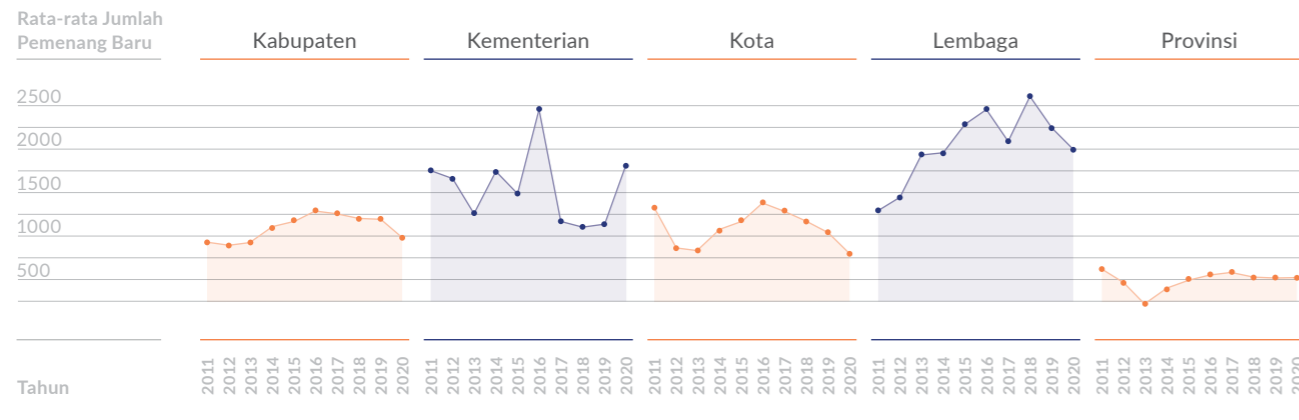
3.2.3 Persentase Jumlah Kontrak yang Diberikan kepada Top 10 Penyedia

Grafik 3.9 Persentase Jumlah Kontrak yang Diberikan kepada Top 10 Penyedia Secara Nasional 2011 - 2021



Grafik 3.9 menunjukkan secara Nasional dalam rentang waktu 10 tahun, persentase jumlah kontrak yang diberikan kepada Top 10 penyedia fluktuatif. Pada 2011 hingga 2013 menurun, 2014 hingga 2016 meningkat, dan 2017 hingga 2020 menurun (grafik 3.9). Artinya dalam 5 tahun terakhir (2016 - 2020) mengindikasikan adanya peluang pasar yang lebih baik karena persentase jumlah pengadaan yang diberikan kepada Top 10 berkurang, yaitu dari 1,13% ke 0,72%.

Grafik 3.10 Persentase Jumlah Kontrak yang Diberikan kepada Top 10 Penyedia berdasarkan Jenis K/L/PD 2011 - 2021



Sedangkan berdasarkan grafik 3.10, jika dibandingkan dengan persentase jumlah kontrak untuk TOP 10 Penyedia di Kabupaten/Kota yang berkisar 13-15%, Lembaga dan Kementerian memiliki tren persentase yang lebih tinggi dengan kisaran antara 17-30%. Artinya kedua jenis institusi di tingkat nasional memiliki kesempatan pasar yang lebih rendah ketimbang Kabupaten/ Kota.

Provinsi memiliki rata - rata persentase jumlah kontrak untuk Top 10 penyedia paling rendah diantara Kementerian, Lembaga, Kabupaten, dan Kota, yaitu sekitar 10%.

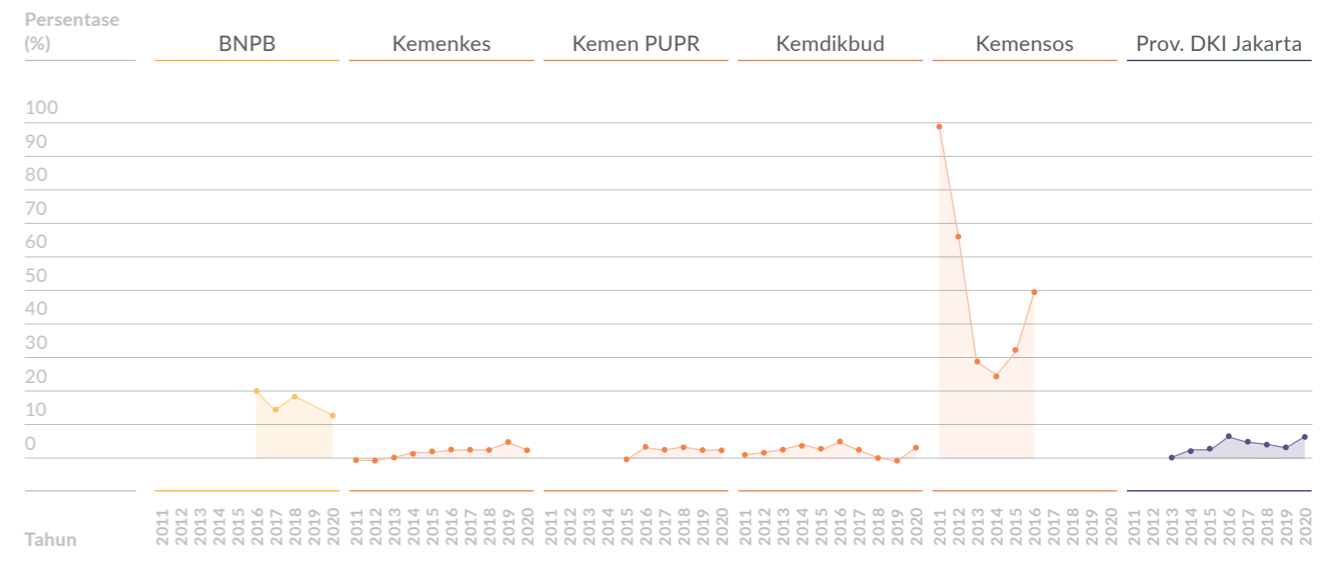
Kemudian peneliti mencoba melihat instansi-instansi mana saja yang memiliki rata - rata persentase jumlah kontrak Top 10 terendah, yaitu:

Tabel 3.7 K/L/PD dengan Persentase Jumlah Kontrak Top 10 Terendah

Nama Instansi	Tahun Anggaran	jumlah paket diberikan ke top 10	Total Jumlah Paket	Persentase Top 10 (%)
Kementerian Kesehatan	2011	2	866	0,23
Kementerian Kesehatan	2012	4	1.322	0,30
Kementerian Kesehatan	2013	7	1.472	0,48
Kabupaten Kolaka Timur	2014	1	108	0,93
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2015	1	129	0,78
Kabupaten Mojokerto	2016	1	65	1,54
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	2017	12	542	2,21

Nama Instansi	Tahun Anggaran	jumlah paket diberikan ke top 10	Total Jumlah Paket	Persentase Top 10 (%)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2018	4	527	0,76
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2019	1	414	0,24
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	2020	1	148	0,68

Grafik 3.12 Persentase Jumlah Nilai Kontrak yang Diberikan kepada Top 10 Penyedia di 6 K/L/PD 2011 - 2021



Berdasarkan 6 instansi diatas, Kemenkes, Kemen PUPR, Kemendikbud dan Provinsi DKI jakarta cenderung stabil di kisaran 3%, artinya peluang pasar cukup baik dan kompetitif.

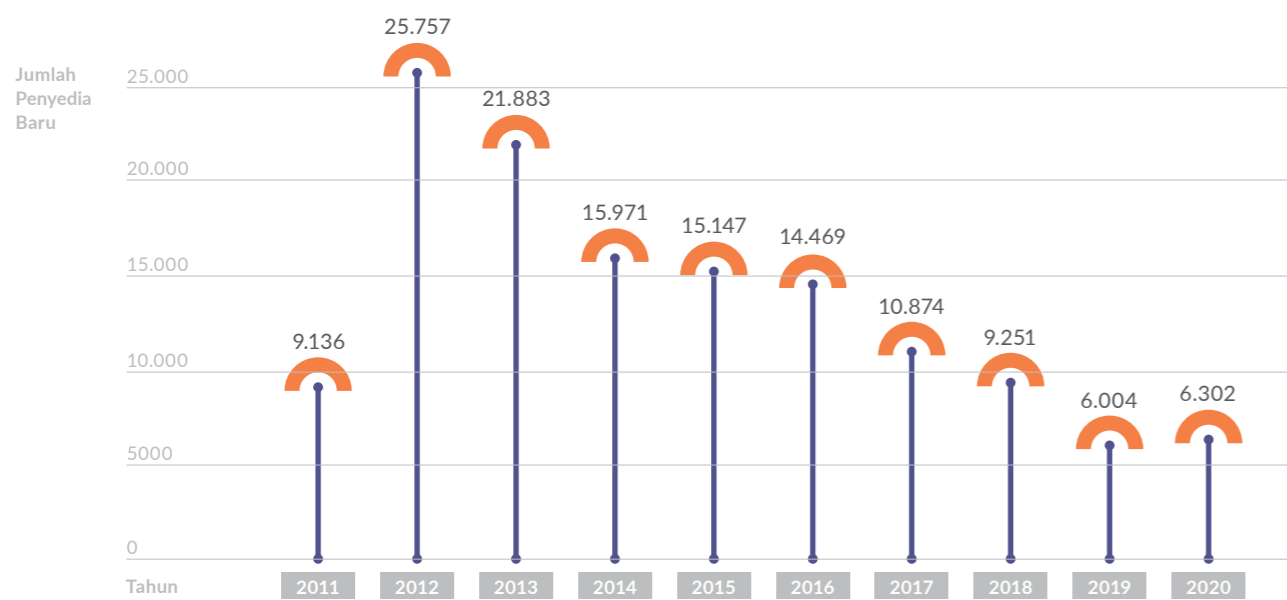
Sementara Kemensos memiliki pola fluktuatif dan sangat tinggi pada 2019, yaitu mencapai 100%. Ketika peneliti menelusuri database di Kemensos, ditemukan jumlah pengadaan yang sangat kecil yang terdokumentasi. Sehingga peneliti menyatakan bahwa Kemensos tidak cukup data untuk dianalisis lebih lanjut.

Sementara itu, data BNPB menunjukkan penurunan persentase pemberian kontrak kepada Top 10. artinya peluang pasar lebih baik dan kompetitif. Lebih lanjut, hal ini juga dipengaruhi oleh semakin banyaknya pengadaan yang dilakukan oleh BNPB pada 2016. Berdasarkan data yang dimiliki

peneliti, jumlah pengadaan di tahun 2013 - 2015 hanya mencapai 11 pengadaan. Namun pada 2016 meningkat hingga 102, 2017 mencapai 449 pengadaan, kemudian menurun pada 2018 sebanyak 99 pengadaan, 2019 tidak ada data pengadaan dan 2020 sebanyak 20 pengadaan.

3.2.4 Jumlah Penyedia yang Baru Pertama Kali Memenangkan Kontrak (Penyedia Baru)

Grafik 3.13 Jumlah Penyedia Baru Secara Nasional 2011 - 2020

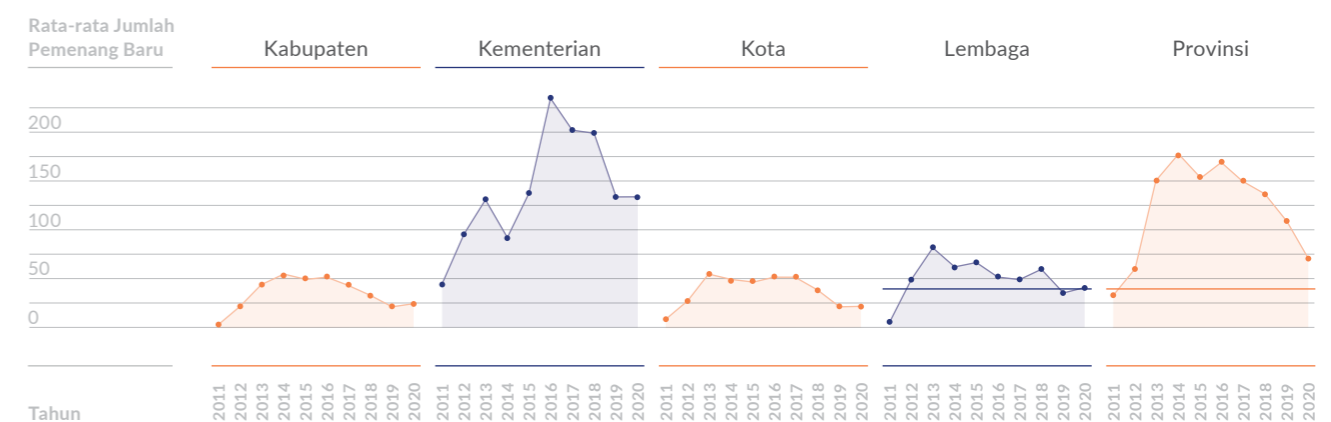


Jumlah peningkatan penyedia baru cukup banyak sepanjang 2010 - 2013 baik secara Nasional maupun per jenis instansi (grafik 3.13 dan 3.14). Di tingkat Nasional, peningkatan sebesar 139% dari 9.136 penyedia pada 2011 ke 21.883 penyedia pada 2013. Setelah tahun 2013 hingga 2020, tren tersebut mengalami penurunan di mana penyedia baru yang memenangkan tender menurun 71,2% (dari 21.883 ke 6.305). Peningkatan pada 2010 - 2013 dapat dipahami karena tahun ini adalah awal penerapan pengadaan secara elektronik¹¹⁷. Kebijakan nasional yang berlaku menyatakan bahwa K/L/D/I wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik

¹¹⁷ LKPP, <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/799> diakses pada 20 Februari 2021

untuk sebagian/ seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2011^{118 119 120 121 122}. Hal ini sesuai dengan Pasal 131 ayat 1 Perpres 54/2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa K/L/D/I wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/ seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2011. Ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 Tentang e-Tendering, Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik. Selain itu, LKPP juga rutin melakukan pelatihan bagi penyedia potensial agar memahami dan terlibat dalam pengadaan pemerintah¹²³.

Grafik 3.14 Jumlah Penyedia Baru berdasarkan Jenis K/L/PD



Mengacu pada grafik 3.14 berdasarkan jenis instansinya, Kementerian dan Provinsi memiliki tren menurun dengan rata - rata jumlah penyedia baru lebih tinggi tiap tahunnya dibandingkan instansi lainnya (Grafik 3.14). Jumlah penyedia baru terbanyak di Kementerian terjadi pada 2016 dengan jumlah sekitar 225 penyedia. Sedangkan di Provinsi pada 2014 dengan jumlah sekitar 175 penyedia.

¹¹⁸ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pasal 131 ayat 1

¹¹⁹ Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

¹²⁰ Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang e-Tendering

¹²¹ Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik

¹²² Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

¹²³ Haldi Yudi Yatna, Kepala Subdit Perencanaan di Direktorat Monitoring dan Evaluasi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dalam diskusi pada 15 Juli 2021 secara daring

Penurunan jumlah penyedia baru juga dapat dipahami karena perkembangan metode pengadaan yang diterapkan oleh Pemerintah: E-purchasing, mulai diperkenalkan pada 2015¹²⁴ ¹²⁵, dan Tender Cepat yang diperkenalkan pada 2015¹²⁶. Selain itu, pada Perpres 16/ 2018, juga disebutkan bahwa Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia lainnya¹²⁷. Artinya, metode Tender adalah pilihan terakhir dalam proses pengadaan.

Menurut Ichwan Nasution, Kepala Subdit Dukungan Penegakan Hukum, penurunan penyedia baru perlu diteliti lebih lanjut. Sebab selain adanya metode pengadaan lain, mungkin saja penyedia baru yang tertarik dengan pengadaan pemerintah hanya sebatas ini karena sudah sampai pada titik¹²⁸. Hal ini dikarenakan pengadaan pemerintah seringkali dipersepsikan dekat dengan korupsi dengan resiko kriminalisasi yang tinggi. Hal ini diamini oleh data Tren Penindakan kasus Korupsi yang dikeluarkan oleh ICW pada 2016¹²⁹, 2017¹³⁰, 2018¹³¹, dan 2019¹³² yang menyebutkan rata - rata 40% kasus korupsi tiap tahun terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Bahkan pada 2019 jumlahnya mencapai 64%

Peneliti kemudian mencoba melihat k/L/PD yang memiliki jumlah penyedia baru paling banyak. Diantaranya adalah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang memiliki penyedia baru terbanyak pada 2012 - 2015, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) berturut - turut dari 2016 - 2020 (4841, 2114, 1392, 1424, 804). Jumlah yang tinggi untuk Kemen PUPR dapat dipahami karena pada 2016 adalah awal mula penggunaan sistem SPSE yang sebelumnya menggunakan sistem tersendiri.

¹²⁴ JDIH LKPP, Peraturan Presiden Nomor No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-4-tahun-2015> diakses pada 26 Februari 2021

¹²⁵ LKPP, LKPP Sosialisasikan Perpres Pengadaan Terbaru, <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/3125> diakses pada 25 Februari 2021

¹²⁶ Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

¹²⁷ Ibid. Pasal 38 ayat 7

¹²⁸ Ichwan Makmur Nasution, Kepala Subdit Dukungan Penegakan Hukum, diskusi daring dengan LKPP pada 2 Maret 2021

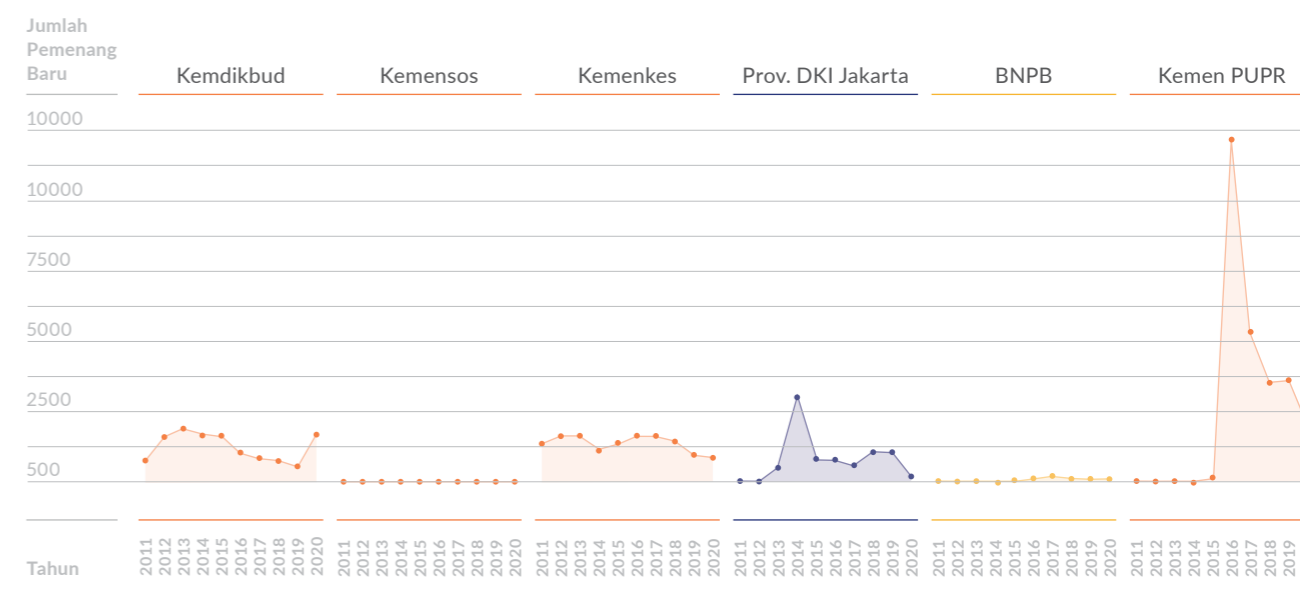
¹²⁹ ICW. 2016. Trends of Corruption Prosecution 2016. <https://antikorupsi.org/index.php/en/article/trends-corruption-prosecution-2016> diakses pada 13 Januari 2021.

¹³⁰ ICW. 2017. Trends of Corruption Prosecution 2017. <https://antikorupsi.org/index.php/en/article/trends-corruption-prosecution-2017> diakses pada 13 Januari 2021.

¹³¹ ICW. 2018. Trends of Corruption Prosecution 2018. <https://antikorupsi.org/index.php/en/article/trends-corruption-prosecution-2018> diakses pada 13 Januari 2021.

¹³² ICW. 2019. Trends of Corruption Prosecution 2019. <https://antikorupsi.org/index.php/en/article/trends-corruption-prosecution-2019> diakses pada 13 Januari 2021.

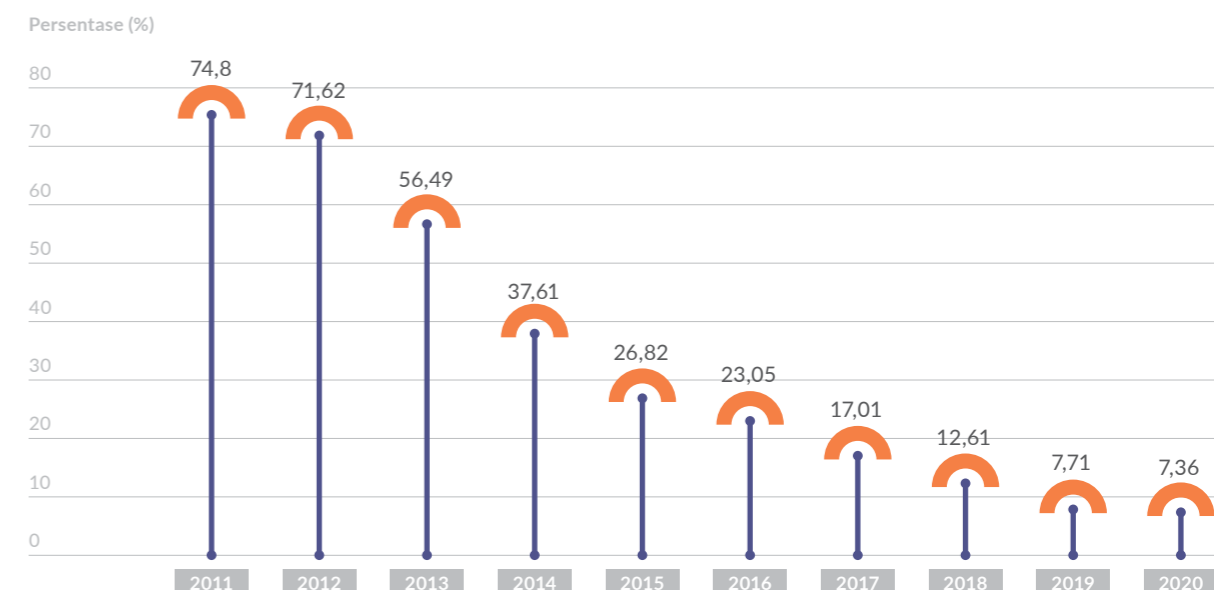
Grafik 3.16 Jumlah Penyedia Baru di 6 K/L/PD



Melihat pada 6 instansi secara spesifik pada grafik 3.16 di atas, BNPB adalah instansi yang paling rendah penyedia barunya jika dibandingkan dengan 5 instansi lainnya. Sedangkan KemenPUPR menjadi instansi dengan jumlah penyedia baru terbanyak karena antara 2015 - 2016 adalah tahun awal penggunaan SPSE. Untuk data pengadaan di Kemensos tidak tersedia sehingga tidak dapat dianalisa tingkat partisipasi penyedia baru di instansi tersebut.

3.2.5 Perbandingan antara Penyedia Baru dengan Seluruh Penyedia

Grafik 3.17 Persentase Penyedia Baru terhadap Seluruh Penyedia secara Nasional 2011 - 2020

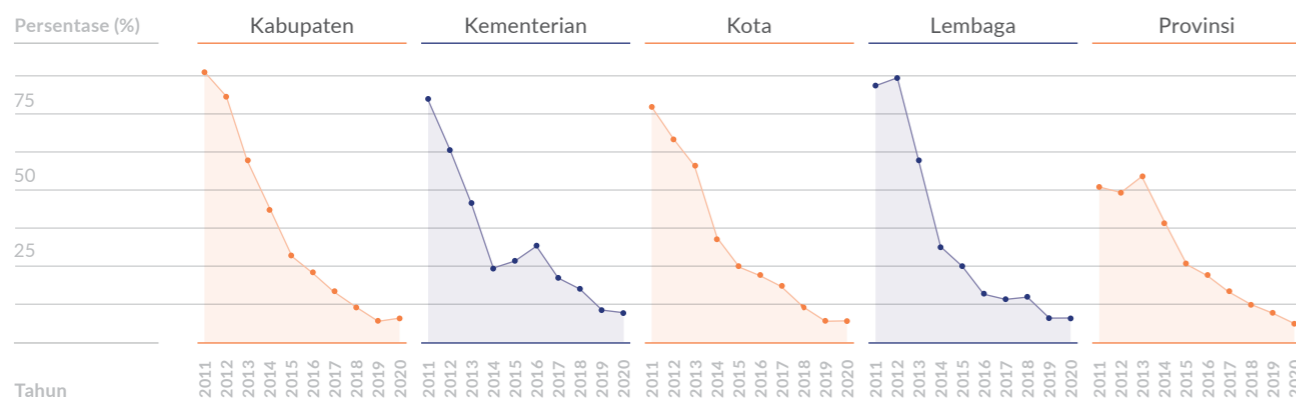


Persentase penyedia baru terhadap seluruh penyedia memiliki pola yang sama dengan jumlah penyedia baru tiap tahunnya, yaitu mengalami penurunan sebesar 67,4%, dari 74,8% pada 2011 ke 7,36% pada 2020 (Grafik 3.17).

Tahun 2011 menjadi tahun dengan tingkat persentase penyedia baru dibandingkan dengan dengan seluruh penyedia tertinggi, yaitu 74,8%. Tingginya persentase penyedia baru dibandingkan seluruh penyedia pada 2011 - 2013 dikarenakan pemerintah memperkenalkan sistem baru sehingga sebagian besar penyedia baru mengikuti tender.

Sedangkan dalam 2 tahun terakhir (2019-2020) persentasenya cenderung stabil dengan nilai rata - rata sekitar 7,5% (grafik 3.17). Meskipun persentase penyedia baru terhadap seluruh penyedia semakin berkurang, hal ini tetap mencerminkan adanya kesempatan bagi penyedia baru untuk masuk ke dalam pasar pengadaan pemerintah.

Grafik 3.18 Persentase Penyedia Baru terhadap Seluruh Penyedia berdasarkan Jenis K/L/PD 2011 - 2020



Tren penurunan juga terjadi di tiap jenis instansi, yaitu Kabupaten, Kota, Provinsi, Kementerian dan Lembaga. Hal ini berarti pasar pengadaan bagi penyedia baru semakin berkurang dari tahun ke tahun.

Peneliti kemudian mencoba melihat instansi dengan persentase pemenang baru terbanyak, sebagai berikut:

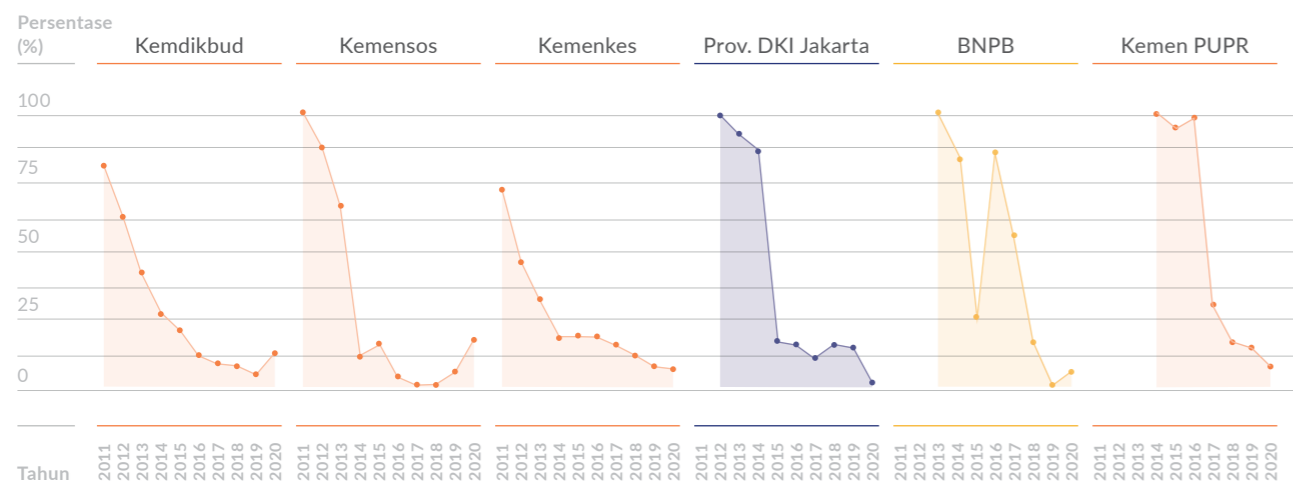
Tabel 3.8 K/L/PD dengan Persentase Pemenang Baru Terbanyak Tahun 2011-2020

Nama Instansi	Tahun Anggaran	Penyedia Baru	Total Penyedia	Persentase
Kota Depok	2011	264	290	91.03
Kementerian Kelautan Dan Perikanan	2012	258	269	95.91
Mahkamah Agung	2013	291	311	93.57
Kabupaten Lampung Selatan	2014	159	175	90.86
Kota Jambi	2015	182	199	91.46
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2016	4.841	4.927	98.25
Kabupaten Lampung Timur	2017	193	207	93.24
Badan Pengawas Pemilihan Umum	2018	31	42	73.81
Kabupaten Lombok Utara	2019	77	142	54.23
Kementerian Perdagangan	2020	128	264	48.48

Tabel 3.8 di atas menunjukkan instansi dengan persentase terbanyak di tiap tahun. Hasilnya mulai dari Kabupaten, Kota, Lembaga dan Kementerian masuk dalam daftar. Hal ini dapat diartikan pada instansi - instansi tersebut memiliki keterbukaan pasar dan persaingan yang baik. Pada 3 tahun pertama (2011 - 2013) merupakan tahun awal penerapan pengadaan secara elektronik menggunakan SPSE, sehingga jumlah penyedia yang cukup banyak pada tahun ini disebabkan sebagian besar penyedia baru mendaftar dan mengikuti pengadaan pemerintah.

Hal serupa juga terjadi pada Kementerian PUPR yang mencatat jumlah penyedia baru tertinggi 2016 yaitu 4.841 penyedia. Hal ini disebabkan karena 2016 merupakan awal mulai penggunaan SPSE.

Grafik 3.20 Persentase Penyedia Baru terhadap Seluruh Penyedia di 6 K/L/PD 2011 - 2020



Grafik 3.20 memperlihatkan bahwa, pada 2015, BNPB mengalami penurunan dari 75% menjadi 25%. Namun di tahun berikutnya, BNPB mengalami peningkatan kembali ke 87%. Hal ini juga dipengaruhi oleh jumlah data pengadaan yang baru tersedia sejak 2013. Jumlah pengadaan di tahun 2013 - 2015 hanya mencapai 11 pengadaan. Namun pada 2016 meningkat hingga 102, 2017 mencapai 449 pengadaan, kemudian menurun pada 2018 sebanyak 99 pengadaan, dan 2020 sebanyak 20 pengadaan.

Sedangkan DKI Jakarta, pada 2015, mengalami penurunan persentase dari 87% menjadi 18% dan terus menurun. Artinya, keterbukaan pasar pengadaan dan persaingan di DKI Jakarta semakin rendah.

Serupa dengan temuan pada indikator sebelumnya (Jumlah Penyedia Baru), penurunan persentase penyedia baru juga dapat dipahami karena perkembangan metode pengadaan yang diterapkan oleh Pemerintah, yaitu E-purchasing dan Tender Cepat yang mulai diperkenalkan pada 2015¹³³. Selain itu, pada Perpres 16/ 2018, juga disebutkan bahwa Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia lainnya¹³⁴. Artinya, metode Tender adalah pilihan terakhir dalam proses pengadaan.

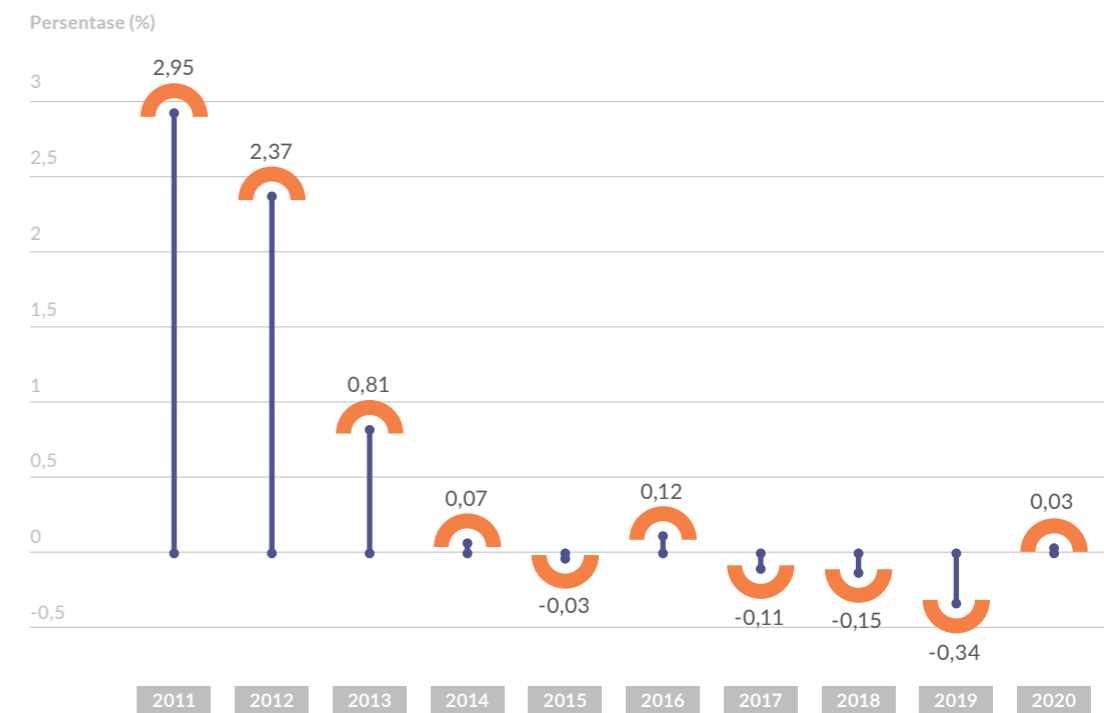
Kemensos tidak dianalisis lebih jauh karena keterbatasan data yang tersedia.

¹³³ JDIH LKPP, Peraturan Presiden Nomor No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-4-tahun-2015> diakses pada 26 Februari 2021

¹³⁴ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pasal 38 ayat 7

3.2.6 Persentase Pertumbuhan Penyedia Baru di setiap K/L/PD

Grafik 3.21 Persentase Pertumbuhan Penyedia Baru Secara Nasional 2011 - 2020



Secara Nasional (Grafik 3.21) persentase pertumbuhan penyedia baru dalam sistem pengadaan pemerintah mengalami penurunan, bahkan minus pada 2017 - 2019. Sepanjang 2011 - 2020 penurunan persentase pertumbuhan penyedia baru sebesar 2,92%, dari 2,95% pada 2011 ke 0,03% pada 2020. Penurunan ini dapat dipahami karena perkembangan metode pengadaan yang diterapkan oleh Pemerintah: E-purchasing, mulai diperkenalkan pada 2015¹³⁵ ¹³⁶, dan Tender Cepat yang diperkenalkan pada 2015¹³⁷. Selain itu, pada Perpres 16/ 2018, juga disebutkan bahwa Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia lainnya¹³⁸. Artinya, metode Tender adalah pilihan terakhir dalam proses pengadaan.

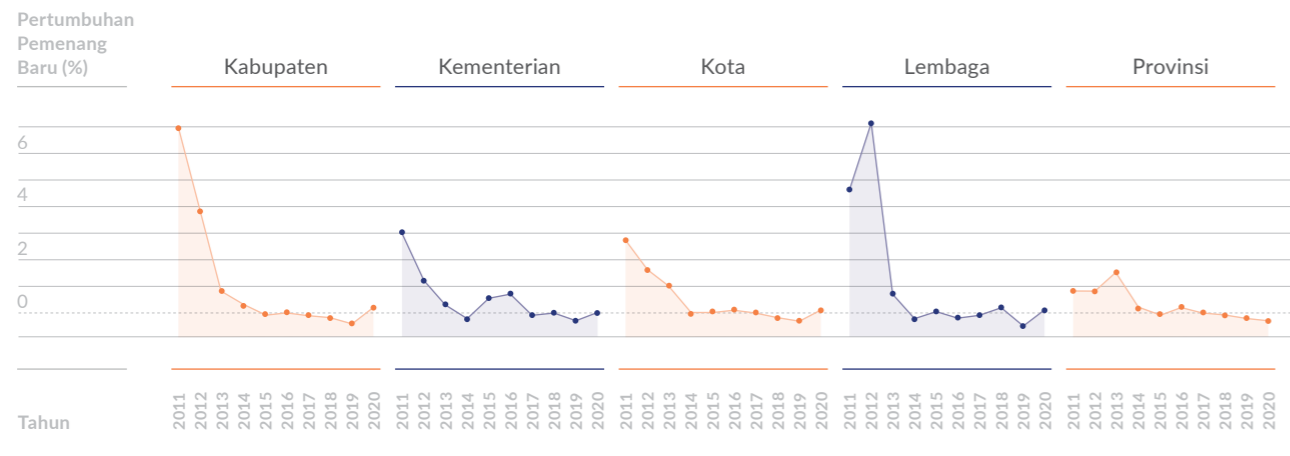
¹³⁵ JDIH LKPP, Peraturan Presiden Nomor No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-4-tahun-2015> diakses pada 26 Februari 2021

¹³⁶ LKPP, LKPP Sosialisasikan Perpres Pengadaan Terbaru, <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/3125> diakses pada 25 Februari 2021

¹³⁷ Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

¹³⁸ Ibid. Pasal 38 ayat 7

Grafik 3.22 Persentase Pertumbuhan Penyedia Baru berdasarkan Jenis K/L/PD 2011 - 2020



Pola penurunan serupa juga terjadi di tiap jenis instansi (Grafik 3.22). Kabupaten, Kota Provinsi, Lembaga dan Kementerian juga memiliki persentase pertumbuhan penyedia baru semakin kecil.

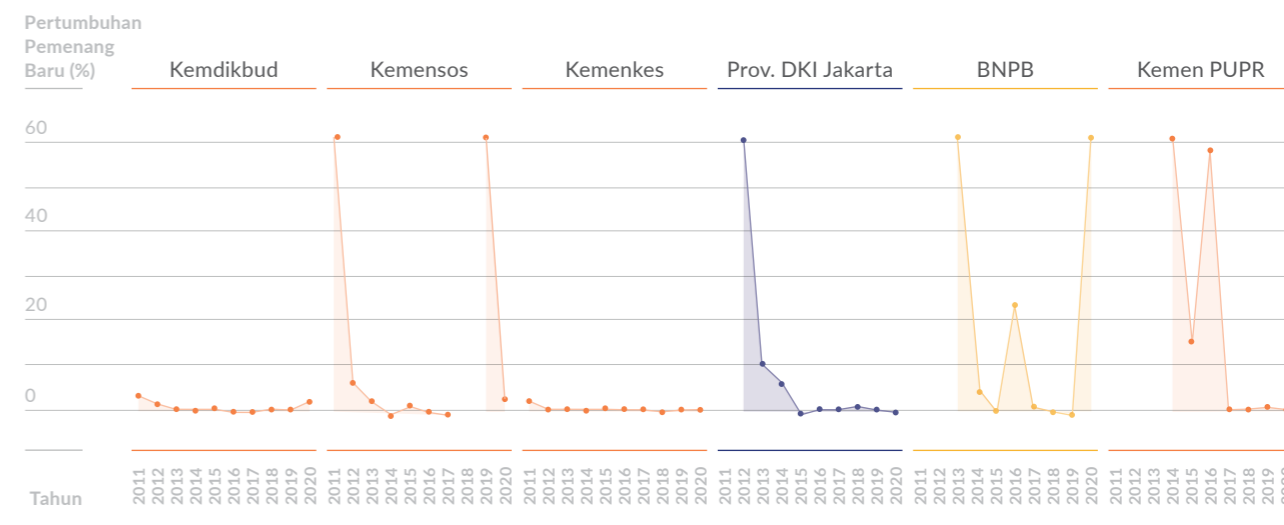
Berdasarkan Grafik 3.23, peneliti mencoba melihat instansi dengan persentase pertumbuhan penyedia baru yang tinggi, berdasarkan data yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel 3.9 KLPD dengan Pertumbuhan Penyedia Baru Tertinggi tahun 2016-2020

K/L/PD	Tahun	Persentase
Kabupaten Jembrana	2016	129,00
Kota Semarang	2017	90,67
Kementerian Agama	2018	67,43
Kabupaten Mamberamo Tengah	2019	41,00
Kementerian Pertanian	2020	43,83

Tabel 3.9 memperlihatkan bahwa Kabupaten Jembrana memiliki persentase pertumbuhan penyedia baru tertinggi pada 2016 - 2020 dengan persentase 129%, kemudian diikuti oleh Kota Semarang, Kementerian Agama, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kementerian Pertanian.

Grafik 3.24 Persentase Pertumbuhan penyedia Baru di 6 K/L/PD



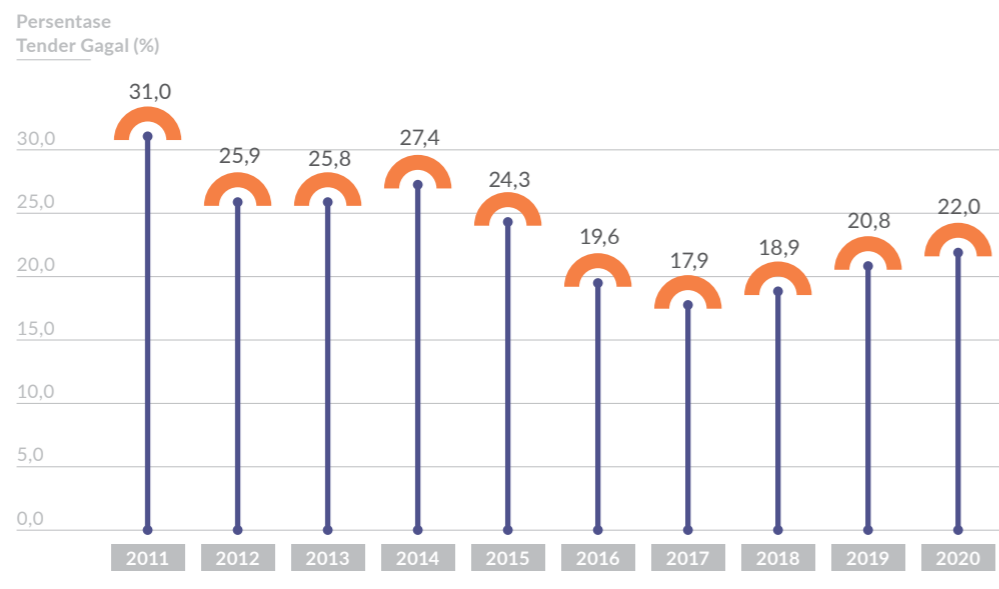
Sedangkan jika melihat pada 6 K/L/PD berikut (Grafik 3.24) seluruh instansi cenderung mengalami pola yang sama, yaitu penurunan. Namun khusus BNPB, pada 2020 meningkat sangat tinggi hingga 60%. Hal itu juga dipengaruhi oleh jumlah data pengadaan yang baru tersedia sejak 2013. Jumlah pengadaan di tahun 2013 - 2015 hanya mencapai 11 pengadaan. Namun pada 2016 meningkat hingga 102, 2017 mencapai 449 pengadaan, kemudian menurun pada 2018 sebanyak 99 pengadaan, pada 2019 tidak ada data dan 2020 sebanyak 20 pengadaan. hal ini yang mengakibatkan jumlah pertumbuhannya terkesan sangat tinggi di 2020.



3.3 Efisiensi Internal

3.3.1 Persentase Jumlah Tender Gagal

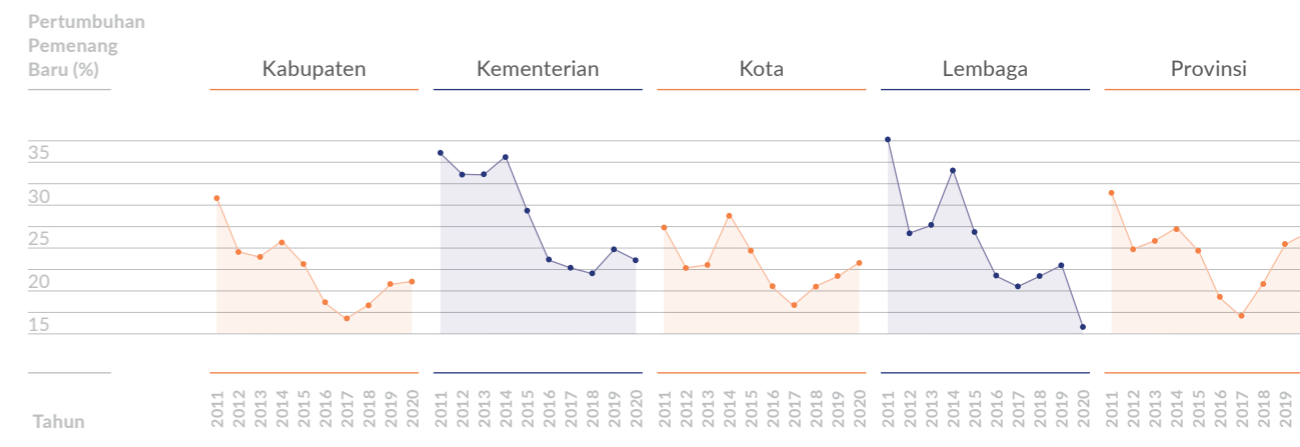
Grafik 3.25 Persentase Jumlah Tender Gagal Secara Nasional 2011 - 2020



Secara Nasional, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, persentase tender yang gagal menurun dari 31% di 2011 menjadi 17,9% di 2017, dan meningkat sedikit sebesar 22% di 2020 (Grafik 3.25). Peningkatan tender gagal pada 2020 merupakan dampak dari pandemi Covid-19 dimana pemerintah melakukan refocusing anggaran untuk memitigasi dampak pandemi.

Tender gagal dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah: tidak ada penyedia yang memberikan penawaran, refocusing anggaran dan perubahan anggaran tangan tahun (APBN-P dan APBD-P), perubahan dokumen perencanaan dan spesifikasi, dan tidak ada penyedia yang memenuhi kualifikasi. berdasarkan informasi dari LKPP, tender gagal juga dapat dikaitkan dengan kapasitas panitia pengadaan, sehingga upaya meningkatkan kemampuan dan sertifikasi juga terus dilakukan sampai saat ini.

Grafik 3.26 Persentase Jumlah Tender Gagal Berdasarkan Jenis K/L/PD 2011 - 2020



Grafik 3.26 memperlihatkan sepanjang 10 tahun, 2011 sampai 2020, instansi di tingkat pusat (Kementerian dan Lembaga) cenderung terus menurun tender gagalnya. Sedangkan untuk instansi di tingkat lokal (kota, kabupaten, dan provinsi) memiliki tren menurun hingga 2017, dan meningkat sedikit sejak 2018 hingga 2020.

Peneliti kemudian menganalisa perubahan persentase tender gagal per instansi selama 10 tahun pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10a Persentase Tender Gagal Instansi Pemerintah Tahun 2011-2020

Jenis K/L/PD	Tahun 2011	Tahun 2020	Penurunan dalam 10 tahun
Kabupaten	30%	20%	10%
Kota	27%	23%	4%
Provinsi	33%	28%	5%
Lembaga	35%	15%	20%
Kementerian	35%	23%	12%

Sumber: Olahan penulis

Lembaga di tingkat nasional memiliki penurunan tender gagal yang cukup signifikan dalam 10 tahun terakhir, dari 35% menjadi 15%. hal ini mungkin dikarenakan panitia pengadaan yang memiliki kualifikasi baik dan biasanya jumlah pengadaan di Lembaga cenderung lebih sedikit dibandingkan instansi lainnya sehingga panitia pengadaan bisa lebih fokus dan rinci dalam proses tender.

Peneliti kemudian mencoba melihat instansi yang memiliki persentase tender batal tertinggi. Berarti instansi ini dapat dikatakan paling tidak efisien. Instansi tersebut adalah:

Tabel 3.10b KLPD dengan Persentase Tender Gagal Terbesar Tahun 2020

Nama Instansi	Tahun	Paket Batal	Paket Total	Persentase
Kabupaten Malaka	2020	8	11	72,73
Kabupaten Buleleng	2020	54	87	62,07
Kementerian Perdagangan	2019	155	229	67,69
Kabupaten Nabire	2019	36	60	60
Kabupaten Ngada	2018	72	132	54,55
Kabupaten Minahasa Utara	2018	69	118	58,47

Pola peningkatan persentase tender yang dibatalkan pada 2020 dapat dikaitkan dengan keadaan pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan paparan LKPP, dalam keadaan pandemi, pemerintah dapat melakukan 3 hal atas pengadaan yang tidak berkaitan dengan penanganan Covid-19, yaitu ditunda pelaksanaannya, dilanjutkan, atau dibatalkan. Pembatalan beberapa Tender juga dapat dikaitkan dengan kebijakan refocusing anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Akibatnya sebagian Tender yang sudah direncanakan mungkin untuk dibatalkan¹³⁹.

Lebih lanjut, peneliti juga melihat instansi dengan persentase tender gagal terkecil (grafik 3.11). Artinya, instansi berikut adalah instansi yang paling efisien dibandingkan dengan instansi lainnya di Indonesia. Instansi tersebut adalah:

Tabel 3.11a KLPD dengan Persentase Tender Gagal Terkecil 2011-2020

Nama Instansi	Tahun	Tender Gagal	Total Tender	Persentase
Kabupaten Bengkulu Tengah	2017	2	94	1,06
Kabupaten Bireuen	2018	2	59	1,69
Kabupaten Mandailing Natal	2019	1	71	1,41
Kabupaten Tulang Bawang Barat	2020	2	154	1,3

¹³⁹ Kompas.com. Jokowi Minta Seluruh Pemda serta Kementerian dan Lembaga Pangkas Belanja Tak Penting <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/14/11275031/jokowi-minta-seluruh-pemda-serta-kementerian-dan-lembaga-pangkas-belanja-tak-dipublikasi-pada-14-april-2021>, diakses pada 23 Februari 2021

Diantara instansi yang memiliki jumlah tender gagal sedikit adalah Kabupaten Bengkulu Tengah (2017), Bireuen (2018), Mandailing Natal (2019) dan Tulang Bawang Barat (2020). kemudian peneliti mencoba melihat pola tender gagal di keempat instansi ini pada 2017 - 2020.

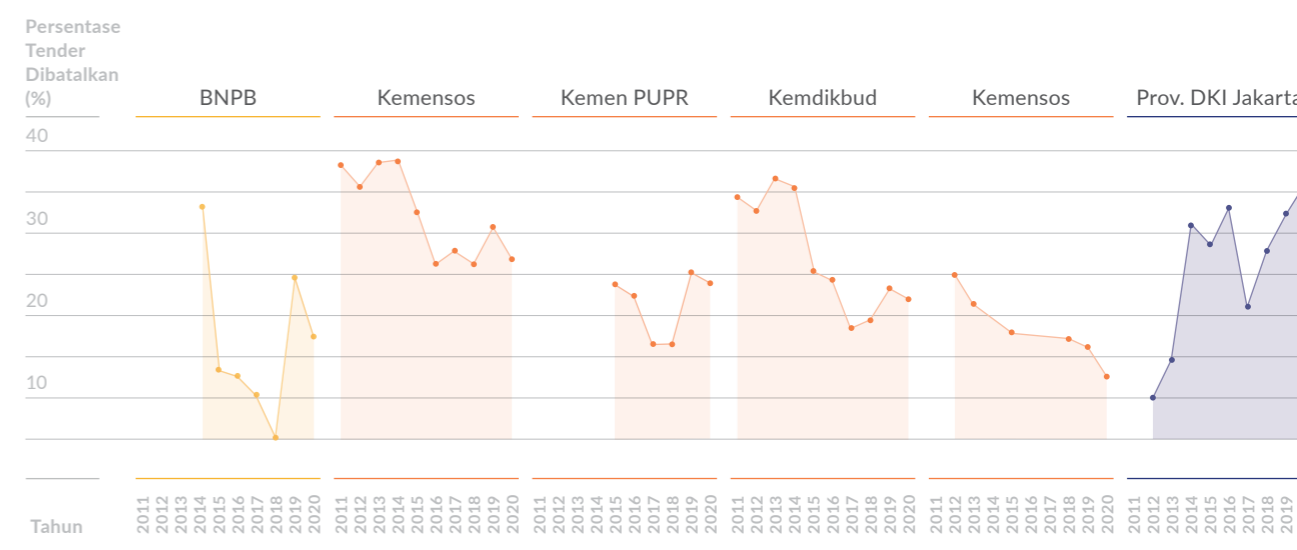
Tabel 3.11b Jumlah Tender Gagal pada 4 KLPD pada 2017 - 2020

Nama Instansi / Jumlah Tender Gagal	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Bengkulu Tengah	2	28	20	5
Kabupaten Bireuen	44	2	44	9
Kabupaten Mandailing Natal	42	28	1	18
Kabupaten Tulang Bawang Barat	10	26	30	2

Ternyata jika diperhatikan di dalam empat tahun terakhir, keempat instansi tersebut tidak selalu sedikit tender gagal. Namun cukup fluktuatif, terkadang sedikit, sementara ditahun lain cukup tinggi angka tender gagal.

Kemudian, menelisik lebih jauh ke 6 instansi, yakni BNPB, Kemenkes, Kemen PUPR, Kemendikbud, Kemensos, dan Provinsi DKI Jakarta. Persentase tender yang dibatalkan dalam kurang waktu 10 tahun sangat fluktuatif.

Grafik 3.28 Persentase Jumlah Tender Gagal di 6 K/L/PD 2011 - 2020

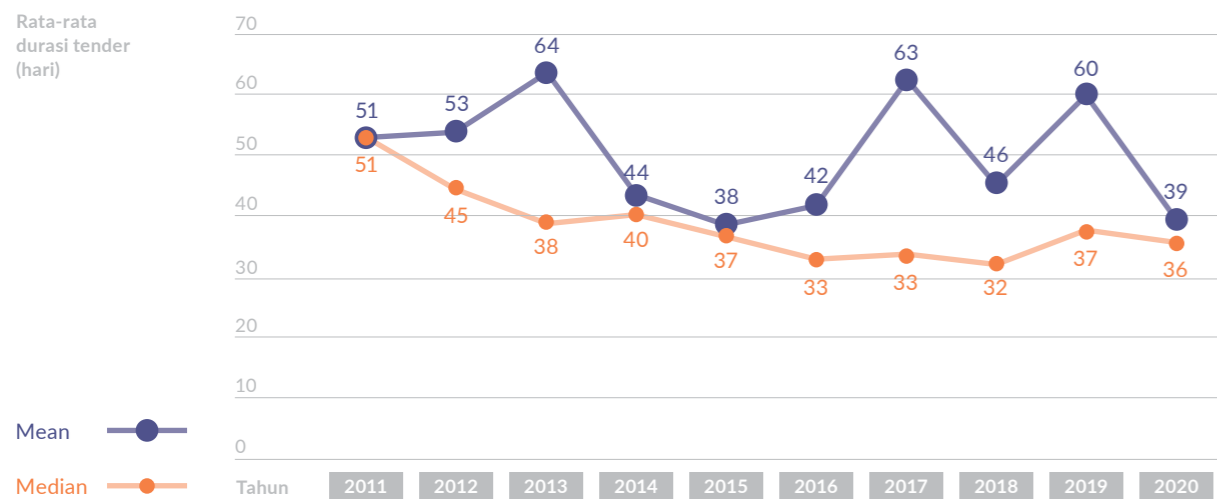


grafik 3.28 memperlihatkan, Provinsi DKI Jakarta ada pola peningkatan Tender yang dibatalkan mulai 2018 - 2020. Pada akhir 2017, DKI Jakarta memiliki Gubernur Baru, Anies Baswedan¹⁴⁰ menggantikan Basuki Tjahaja Purnama. Pada Awal pemerintahannya, Anies tidak dapat langsung mengeksekusi anggaran kerjanya, sebab anggaran yang berjalan pada tahun 2018 masih merupakan anggaran yang disusun oleh Gubernur sebelumnya¹⁴¹. Oleh karena itu, **mungkin** pembatalan beberapa tender dilakukan karena dianggap tidak sejalan dengan program Gubernur baru. Peningkatan persentase Tender yang dibatalkan hingga 2020, dapat diartikan bahwa pemerintahan DKI Jakarta kurang efisien dalam mengelola pengadaanya.

Untuk Kemensos tidak dilakukan analisis lanjutan karena keterbatasan data yang tersedia.

3.3.2 Durasi antara Tanggal Pengumuman Tender dan Tanggal Penetapan Pemenang (Durasi Tender)

Grafik 3.29 Rata - Rata Durasi Tender Secara Nasional 2011 - 2020



Dalam analisis ini, peneliti telah memisahkan data antara tender cepat dan tender. Sehingga informasi yang tersaji hanya berkaitan dengan durasi pengadaan yang menggunakan metode tender. Sedangkan untuk data tender cepat tidak dapat dianalisis lebih jauh karena datanya masih sangat terbatas dan perlu konfirmasi lebih lanjut kepada LKPP.

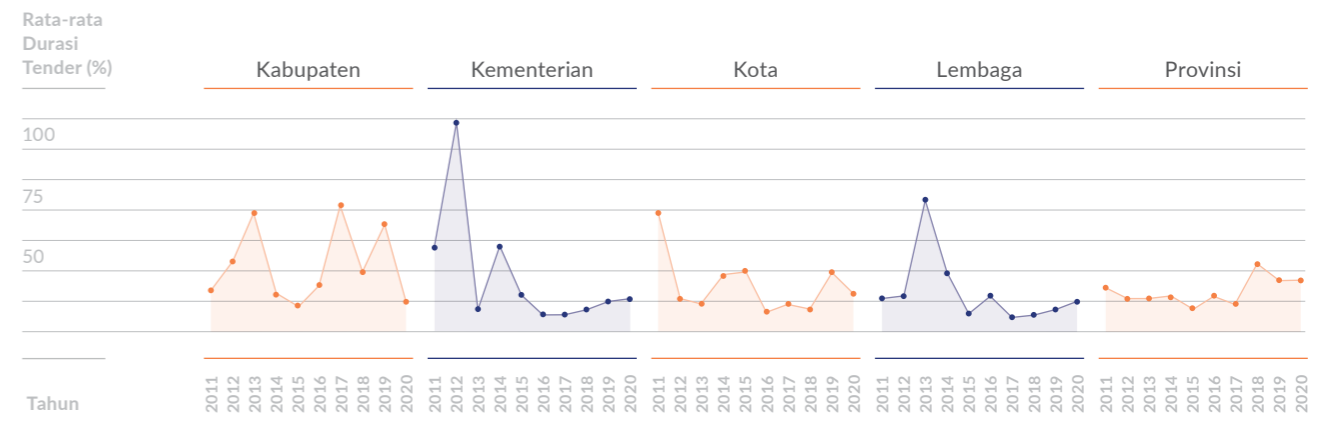
¹⁴⁰ BBC.com. Pelantikan Anies-Sandi, kehadiran Prabowo, dan absennya Djarot. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41634801> di publikasi pada 18 Oktober 2017, diakses pada 23 Februari 2021

¹⁴¹ BPKP. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah. <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Gambaran%20Umum%20Pengelolaan%20Keuangan%20Daerah-BPKP.pdf> diakses pada 23 Februari 2021

Mengacu pada chart 3.29, secara nasional, tahun 2011-2015, durasi tender mengalami peningkatan menjadi 13 hari lebih cepat dari rata - rata 51 hari menjadi 38 hari. Hal ini mungkin disebabkan panitia pengadaan sudah lebih handal dalam menjalankan proses tender. LKPP di sisi lain juga melakukan serangkaian peningkatan kapasitas, membuka kanal konsultasi dan sertifikasi untuk mendorong kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.

Kemudian pada 2017 durasi tender meningkat menjadi rata - rata 63 hari dan kembali menurun pada 2020 menjadi 39 hari. Penurunan durasi tender mengindikasikan adanya efisiensi yang lebih baik.

Grafik 3.30 Rata - Rata Durasi Tender Berdasarkan Jenis K/L/PD 2011 - 2020



Berdasarkan chart 3.30, Provinsi memiliki rata - rata durasi tender yang cenderung stabil dari 2011 - 2017, yaitu berkisar di 25 hari. Namun terjadi peningkatan pada 2018 - 2020 (grafik 3.30) menjadi rata - rata 48 hari. Hal ini kemungkinan dikarenakan sejak Perpres 16/2018 ada perubahan cara menghitung batas waktu dalam proses tender, yang sebelumnya mengacu hari kalender menjadi hari kerja. Sementara perhitungan yang dilakukan pada riset ini semuanya berbasis haari kalender.

Kemudian peneliti mencoba melihat instansi dengan durasi Tender terlama.

Tabel 3.12 Instansi dengan Rata - Rata Durasi Tender Terlama

Nama Instansi	Tahun	Durasi (hari)	Jumlah Tender
Kota Subulussalam	2020	175,31	70
Kabupaten Kepulauan Yapen	2020	131,23	13
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2019	82,01	4804
Provinsi Bali	2019	68,97	174
Provinsi Jawa Barat	2018	52,06	513
Kabupaten Cilacap	2018	37,47	444

Berdasarkan data diatas (tabel 3.12) durasi yang terlalu panjang juga dapat mengindikasikan inefisiensi dalam sebuah proses pengadaan. Atas temuan ini, Peneliti merasa perlu mengecek lebih jauh terkait pengadaan yang dilakukan di masing - masing instansi.

Kemudian, untuk instansi dengan durasi Tender tercepat adalah

Tabel 3.13 Instansi dengan Rata - Rata Durasi Tender Tercepat

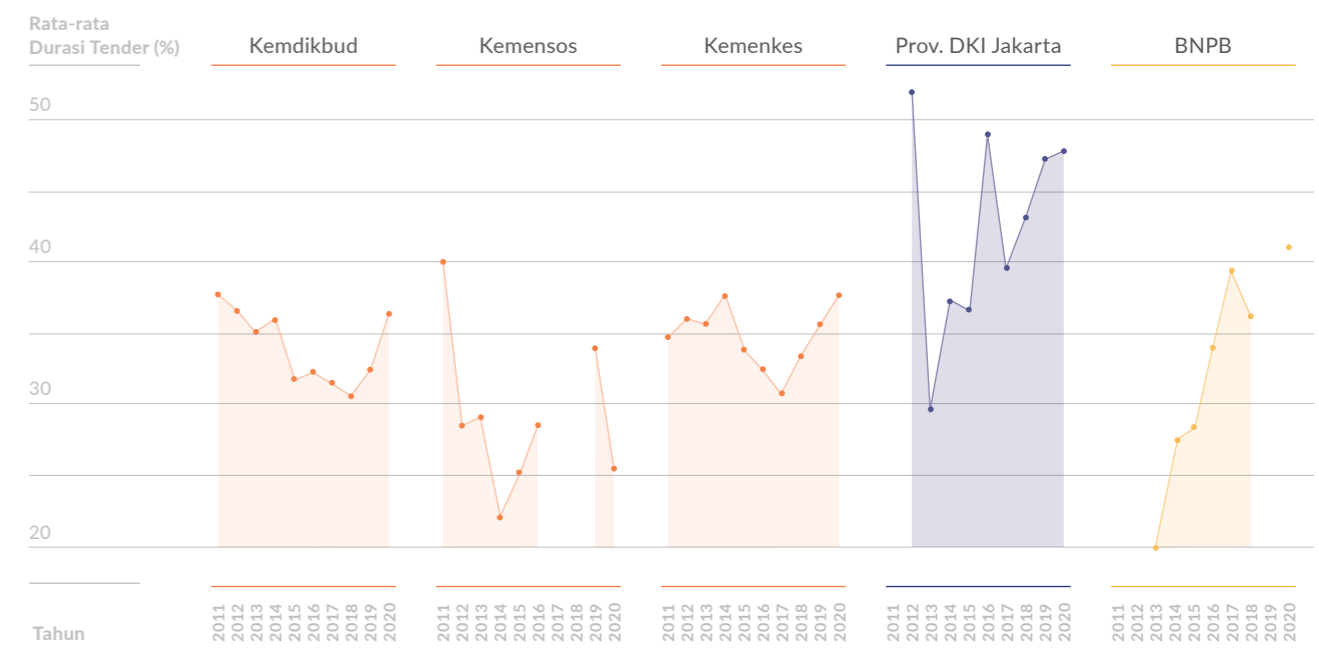
Nama Instansi	Tahun	Durasi (hari)	Jumlah Tender
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	2011	19	1
Kabupaten Aceh Selatan	2012	15	2
Kabupaten Nabire	2013	11	1
Lembaga Administrasi Negara	2014	15	1
Kabupaten Pegunungan Bintang	2015	11	1
Kabupaten Sorong Selatan	2016	4,5	2
Kabupaten Pulau Morotai	2017	12,03	75
Kabupaten Maluku Tenggara	2018	12,45	122
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	2019	15	1
Kabupaten Seram Bagian Timur	2020	13,71	17

Berdasarkan tabel 3.13 diatas, Kabupaten Sorong adalah Instansi yang memiliki durasi tender tercepat. Durasi tender yang sangat pendek dapat mengindikasikan waktu yang sempit untuk memasukkan penawaran.

Jika melihat kurun waktu 2011 - 2020, terdapat perubahan peraturan pengadaan barang dan jasa, salah satunya Perpres 16/2018 yang berkaitan dengan perubahan cara menghitung batas waktu dalam proses tender, yang sebelumnya mengacu hari kalender menjadi hari kerja. Sementara perhitungan yang dilakukan pada riset ini semuanya berbasis haari kalender, sehingga dalam 3 tahun terakhir (2018 - 2020) ada kecenderungan bertambahnya durasi tender.

Pada 2020 dengan adanya Pandemi Covid-19, di kuartal pertama hingga kedua, pengadaan pemerintah sangat dipengaruhi kondisi ini, Namun dengan dikeluarkannya Peraturan LKPP no 4 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi Pada Pemilihan Penyedia dalam Masa Wabah Virus Corona (COVID-19), seharusnya durasi pengadaan tidak menjadi lebih lama, karena proses pembuktian kualifikasi perusahaan yang memberikan penawaran dalam tender dapat dilakukan secara online.

Grafik 3.32 Rata-Rata Durasi Tender di 6 Instansi



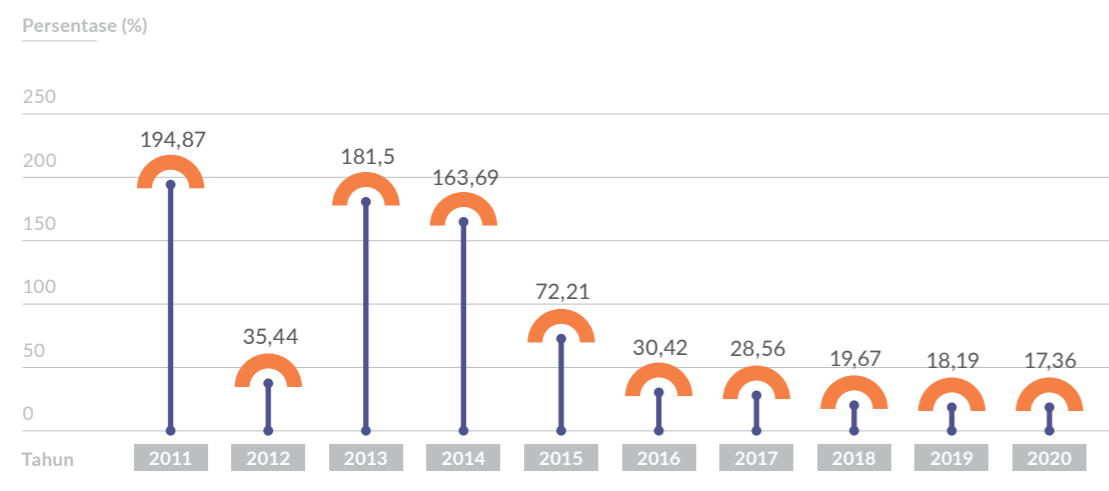
Provinsi DKI Jakarta memiliki rata - rata durasi tender yang lebih lama dibandingkan dengan 4 instansi lainnya, yaitu Kemdikbud, Kemenkes, BNPB, dan Kemensos. Kemensos tidak dianalisis lebih lanjut karena ketidakterediaan data.

3.4 Nilai Manfaat Uang

3.4.1 Persentase Nilai Kontrak di atas Nilai HPS

Grafik 3.33, 3.34, 3.36 memperlihatkan, persentase nilai kontrak di atas nilai HPS. Indikator ini diambil dari rata - rata tender yang nilai kontraknya di atas nilai HPS. Sedangkan untuk tender yang nilai kontraknya dibawah HPS, tidak dimasukkan dalam data diatas.

Grafik 3.33 Rata - rata Persentase Nilai Kontrak diatas HPS Secara Nasional 2011 - 2020



Berdasarkan grafik 3.33, dalam kurun waktu 10 tahun, terjadi penurunan rata - rata persentase nilai kontrak yang melebihi HPS. Jika pada 2011 nilai kontrak yang melebihi nilai HPS bisa mencapai 194,87%, maka pada 2020, rata - rata persentase nilai kontrak diatas nilai HPS mencapai sekitar 17,36%. Hal ini salah satunya dipengaruhi peraturan pengadaan barang dan jasa, mulai dari Keputusan Presiden No 80/ 2003 sampai peraturan yang terbaru Perpres 16/ 2018 yang tidak memperbolehkan penawaran diatas HPS.

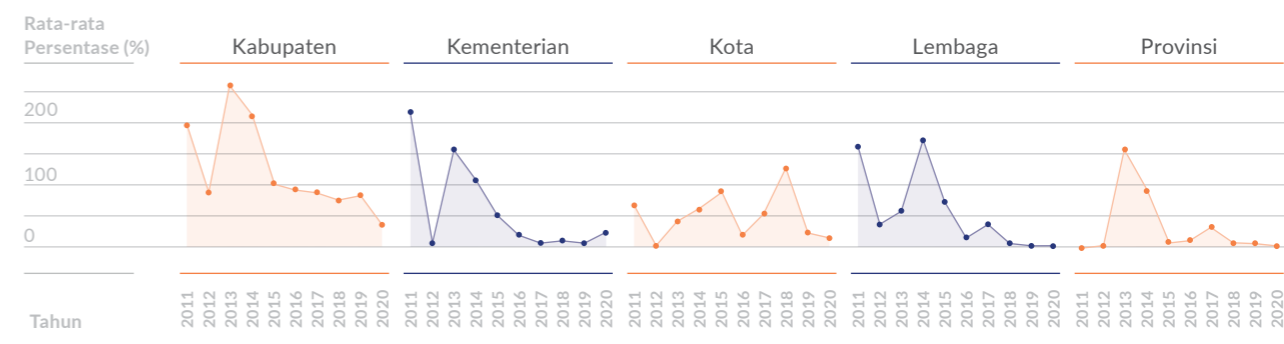
Penurunan persentase nilai kontrak di atas HPS secara signifikan terjadi pada 2015 dan 2016, hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)^{142 143} atau Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang bertanggungjawab untuk mengelola pengadaan barang

¹⁴² Peraturan Presiden No 54/ 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pasal 14

¹⁴³ Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa No 5/ 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP)

dan jasa yang harus dibentuk paling lama pada 2014. Pejabat khusus yang bertanggung jawab atas pengadaan kemungkinan besar dapat berkontribusi pada perubahan positif ini. Selain itu, LKPP juga terus meningkatkan kapasitas panitia pengadaan terkait penyusunan HPS. Panitia Pengadaan yang dilatih oleh LKPP merupakan bagian dari Unit Layanan Pengadaan yang bertugas khusus dalam proses tender.

Grafik 3.34 Rata - Rata Persentase Nilai Kontrak di atas Nilai HPS berdasarkan Jenis K/L/PD 2011 - 2020



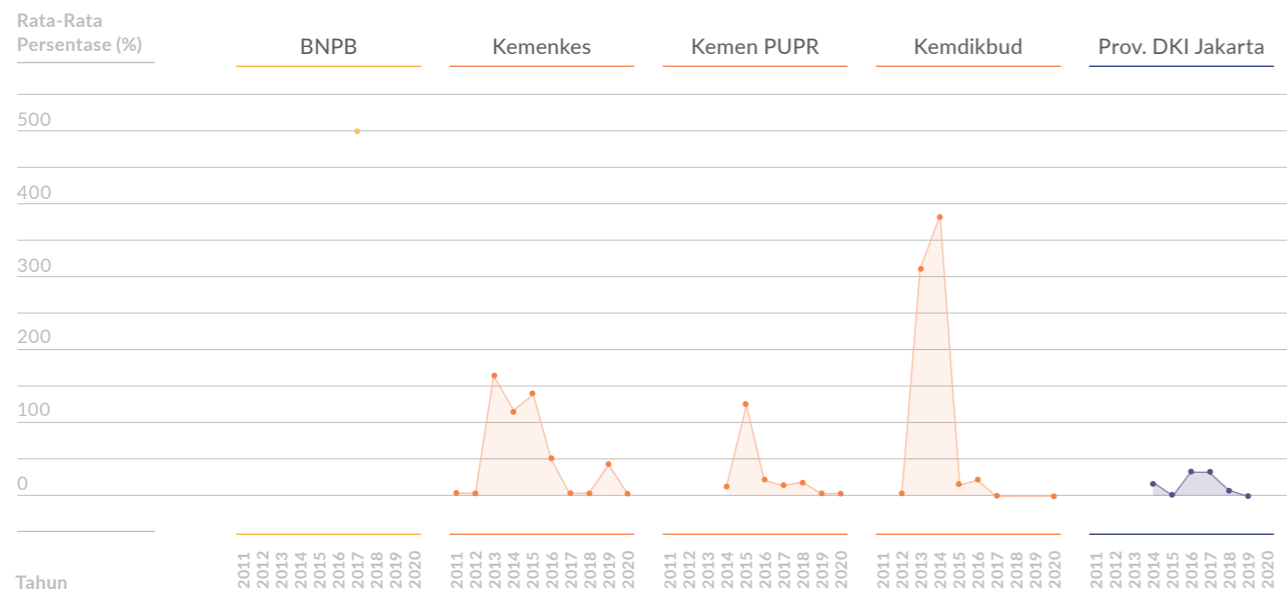
Grafik 3.34 menunjukkan rata - rata persentase nilai kontrak diatas nilai HPS pada 2011 - 2020 berdasarkan jenis K/L/P/D. Secara umum, di tiap jenis K/L/P/D memiliki tren penurunan dari 2011 - 2020. Hal ini serupa dengan tren secara nasional.

Artinya, semua tingkat pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah, mengalami perbaikan dalam hal menurunnya nilai kontrak di atas HPS selama periode 10 tahun.

Lebih lanjut, peneliti mencoba melihat instansi yang seluruh pengadaanya tidak ada yang melebihi nilai HPS, diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada 2017, 2018 dan 2020¹⁴⁴.

¹⁴⁴ Opentender.net data download per 20 Februari 2021.

Grafik 3.36 Rata - rata Persentase Nilai Kontrak di atas Nilai HPS berdasarkan 6 K/L/PD



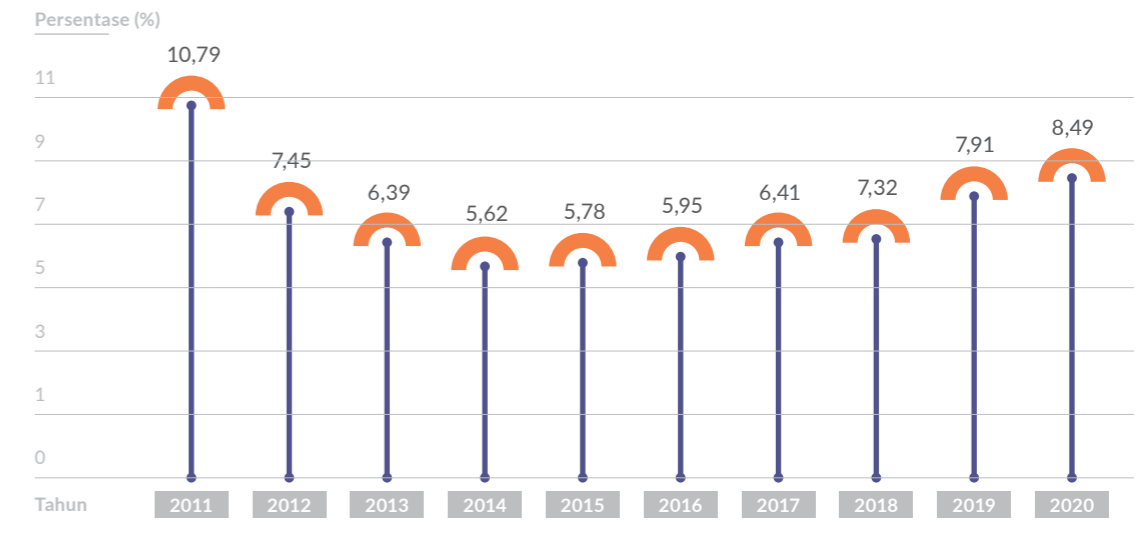
Berdasarkan grafik 3.36, BNPB hanya mengalami nilai kontrak yang melebihi nilai HPS pada 2017 yang mencapai 500%. Persentase yang tinggi pada 2017, dikarenakan BNPB melakukan pengadaan “Pembangunan Kapal BNPB” dengan anggaran Rp 30 Miliar dan HPS sebesar Rp 27,5 Miliar sedangkan nilai kontraknya mencapai Rp 165 Miliar yang dimenangkan oleh PT Citra Shipyar¹⁴⁵. Padahal dalam proses evaluasi harga penawaran telah disebutkan bahwa penawaran melebihi HPS dan Pagu, namun kontrak tetap dilaksanakan.

Sedangkan untuk Kemenkes, Kemen PUPR, Kemdikbud dan Prov DKI Jakarta, mengalami penurunan rata - rata persentase nilai kontrak di atas nilai HPS dalam 10 tahun terakhir. Hal ini mungkin dikarenakan pelatihan yang terus menerus dilakukan oleh LKPP kepada panitia pengadaan dalam penyusunan HPS.

3.4.2 Persentase Nilai Kontrak di bawah Nilai HPS (Penghematan)

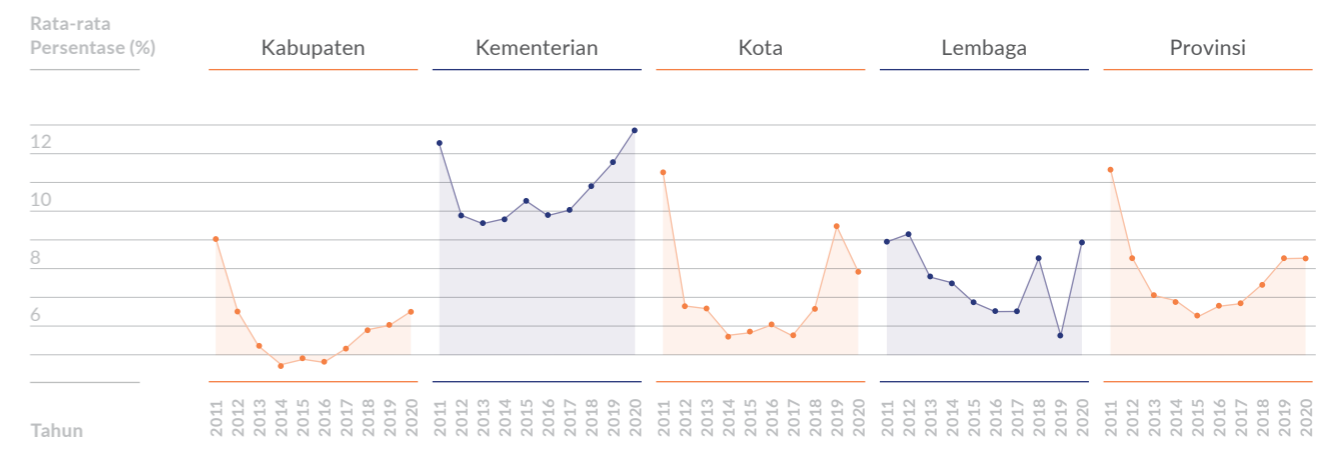
Grafik 3.37 dan 3.38, menunjukan persentase nilai kontrak dibawah nilai HPS. Indikator ini diambil dari rata - rata tender yang nilai kontraknya dibawah nilai HPS. Sedangkan untuk tender yang nilai kontraknya diatas HPS, tidak dimasukkan dalam data diatas.

Grafik 3.37 Rata-rata Persentase Penghematan Secara Nasional 2011 - 2020



Berdasarkan grafik 3.37, secara nasional, tren persentase penghematan dalam 5 tahun terakhir (2016 - 2020) menunjukkan sedikit meningkat, dari 5,95% menjadi 8,49%. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh perencanaan dan penganggaran yang lebih baik sehingga penyusunan anggaran menjadi lebih realistis dan memenuhi harapan pasar.

Grafik 3.38 Rata - rata Persentase Penghematan berdasarkan jenis K/L/PD 2011 - 2020



Grafik 3.38 menunjukkan, dari seluruh instansi pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah, kementerian memiliki rata - rata persentase penghematan lebih tinggi, yaitu antara 10-12%.

¹⁴⁵ LPSE BNPB, <http://lpse.bnppb.go.id/eproc4/lelang/707382/pengumumanlelang> diakses 25 August 2021

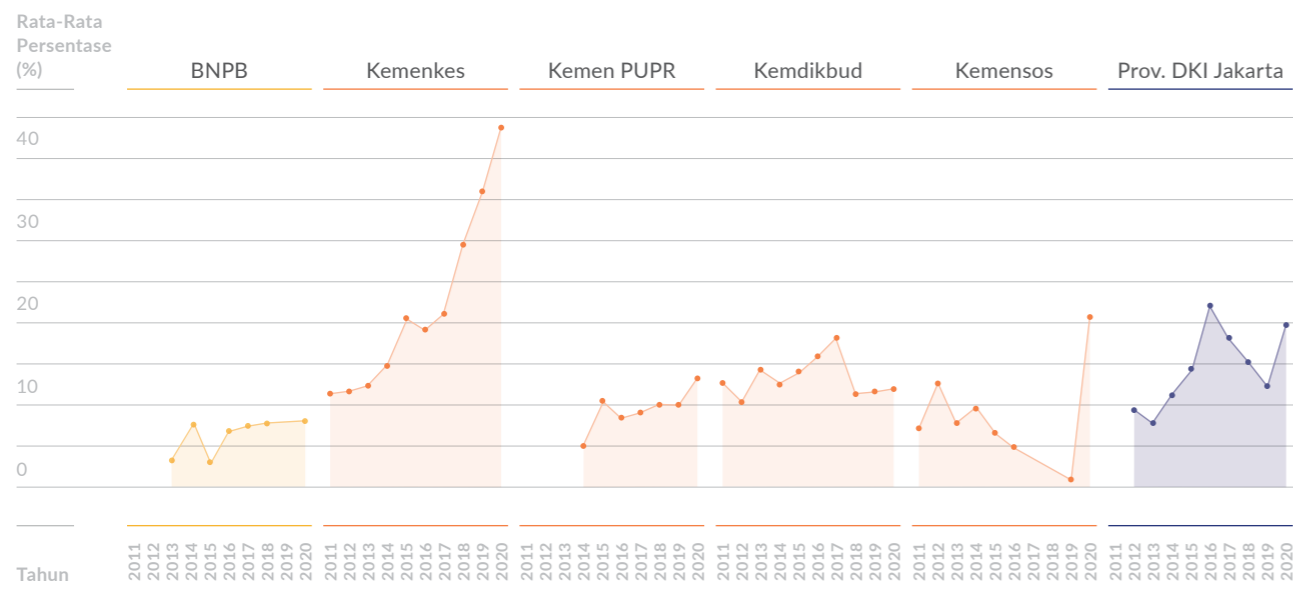
Peneliti kemudian mencoba melihat lebih jauh kementerian yang memiliki rata - rata penghematan tertinggi, yaitu:

Tabel 3.14 K/L/PD dengan Rata - Rata Persentase Penghematan Baik

Instansi	Tahun	Persentase
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2016	6,8
Kementerian Perindustrian	2017	6,0
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2018	6,1
Kementerian Perhubungan	2019	5,1
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	2020	5,2

Berdasarkan tabel 3.14, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menjadi kementerian dengan rata - rata penghematan baik, masing - masing sejak 2016 sampai 2020.

Grafik 3.40 Rata - rata Persentase Penghematan berdasarkan 6 K/L/PD 2011 - 2020



Meskipun secara nasional tren penghematan ada di rentang 6-9%, jika ditelisik lebih jauh ke dalam satu instansi tertentu, maka rata - rata penghematannya bisa lebih dari nilai tersebut. Pada grafik 3.40 menunjukkan bahwa

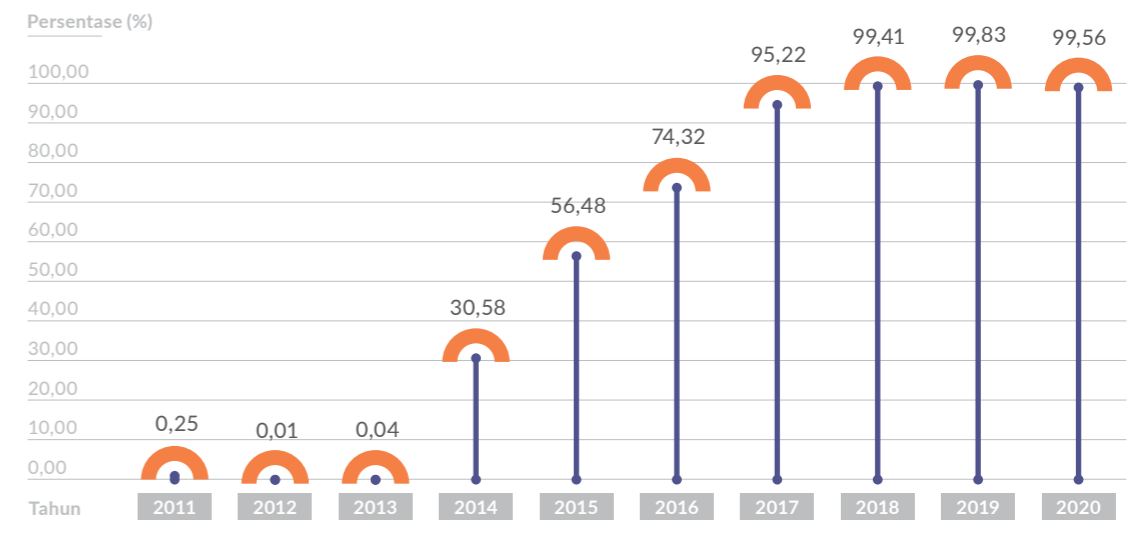
Kementerian Kesehatan memiliki rata - rata persentase penghematan paling tinggi pada 2020, yaitu mencapai 44%.

Namun, tingginya angka penghematan tidak dapat diartikan bahwa pengadaannya semakin efisien, sebab nilai kontrak yang terlalu dibawah nilai HPS juga dapat menandakan adanya permasalahan perencanaan hingga potensi penyimpangan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan standar penghematan yang tidak berpotensi pada penyimpangan serta menelaah lebih jauh kebijakan penganggaran dan belanja di Indonesia.

3.5 Integritas Publik

3.5.1 Persentase Jumlah Tender dengan RUP

Grafik 3.41 Persentase Tender dengan Rencana Pengadaan Secara Nasional 2011 - 2020

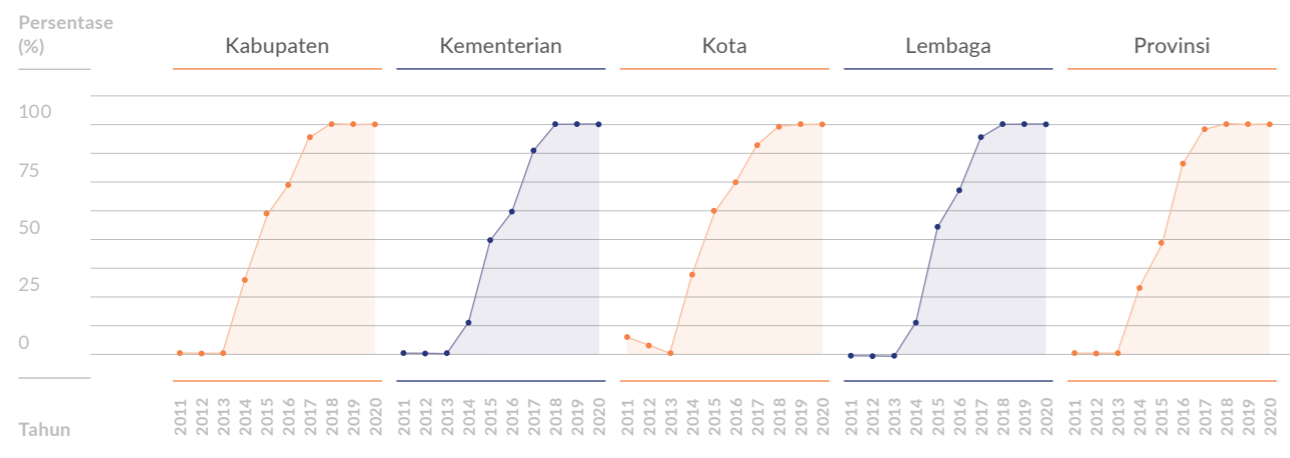


Grafik 3.41 memperlihatkan secara nasional terdapat peningkatan signifikan terhadap persentase tender yang memiliki rencana pengadaan dari 0.25% pada 2011 menjadi 99.5% pada 2020. Hal ini menunjukkan proses pengadaan pemerintah sudah lebih baik dan terencana. Meskipun peneliti tidak dapat melihat lebih jauh kapan tepatnya rencana pengadaan dipublikasi oleh masing - masing instansi, apakah sebelum tahun anggaran berjalan atau beberapa saat sebelum tender diumumkan.

Kurangnya pencapaian 100% dalam 4 tahun terakhir (2017 - 2020) kemungkinan disebabkan oleh kesalahan data dan/atau download yang tidak lengkap dari masing-masing LPSE ke LKPP. Selain itu, terkadang, ketika pemerintah melakukan realokasi anggaran, mereka membuat catatan baru untuk rencana pengadaan (SIRUP) tanpa mengubahnya dalam proses tender (LPSE). Hal ini juga dapat berkontribusi pada kurangnya pencapaian 100% karena catatan dalam LPSE mungkin tidak mencerminkan rencana di sistem SIRUP.

Rencana pengadaan merupakan hal penting, sebab tender yang memiliki perencanaan dan dipublikasi melalui kanal Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) membuka peluang lebih besar bagi penyedia untuk memahami pengadaan pemerintah dan waktu bersamaan membuka ruang bagi masyarakat secara umum untuk terlibat mengawasi proses pengadaan yang akan dilakukan.

Grafik 3.42 Persentase Tender dengan RUP berdasarkan Jenis K/L/PD 2011-2020



Sedangkan pada grafik 3.42 terlihat persentase rencana pengadaan berdasarkan jenis K/L/P/D pada 2011 - 2020 juga memiliki tren peningkatan seperti yang terjadi di tingkat nasional. Peningkatan ini dimulai sejak 2014 hingga 2018 kemudian cenderung stabil hingga 2020.

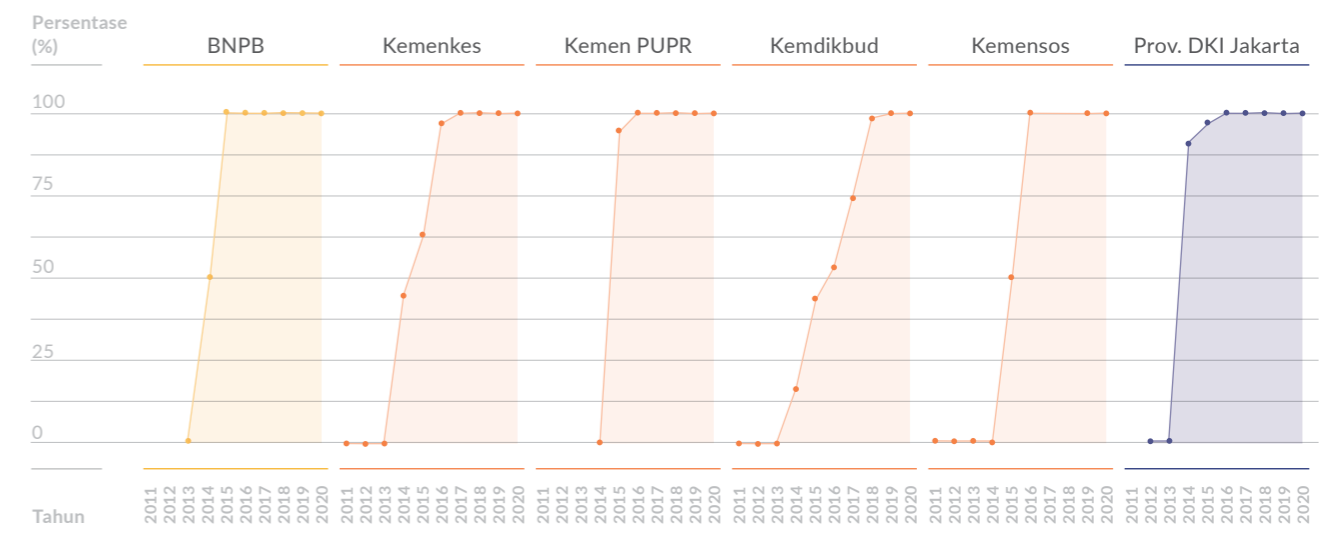
Meningkatnya persentase tender yang memiliki RUP secara signifikan baik ditingkat nasional maupun per jenis instansi, berkaitan dengan kebijakan yang mengharuskan seluruh instansi pemerintah untuk menginformasikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diperkenalkan sejak 2011^{146,147}.

Pengumuman RUP dicatat pada aplikasi SIRUP dilakukan dengan ketentuan¹⁴⁸ sebagai berikut:

- Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran.
- Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- RUP diumumkan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Sejak 2014, informasi RUP semakin efektif tercatat pada setiap pengadaan dengan penerapan yang terintegrasi antara perangkat lunak SIRUP dan SPSE¹⁴⁹. Melalui SPSE versi 4, sistem SPSE mewajibkan input kode RUP sebelum memulai proses tender¹⁵⁰.

Grafik 3.44 Rata - rata Persentase Penghematan berdasarkan 6 K/L/PD 2011 - 2020



¹⁴⁶ Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-kepala-lkpp/peraturan-kepala-lkpp-nomor-12-tahun-2011> diakses pada 20 Februari 2021

¹⁴⁷ Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, pasal 6, <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-kepala-lkpp/peraturan-kepala-lkpp-nomor-13-tahun-2012> di akses pada 20 Februari 2021

¹⁴⁸ Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 29. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-7-tahun-2018> diakses pada 20 Februari 2021

¹⁴⁹ User Guide SPSE v4.4 untuk PPK, <https://inaproc.id/unduh> diakses pada 28 Februari 2021

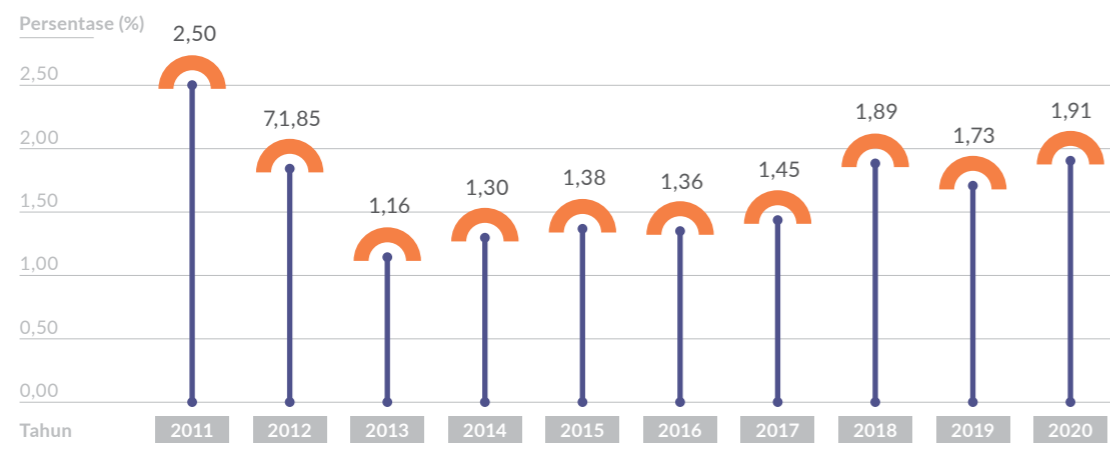
¹⁵⁰ Fajar Adi Hemawan. Analisis Kebijakan Madya pada Direktorat Pengembangan SPSE. Diskusi daring dengan LKPP 2 Maret 2021

Hal serupa juga terjadi jika kita menelisik spesifik ke 6 instansi di atas (grafik 3.44). dapat dikatakan terjadi perbaikan dalam mempublikasi informasi mengenai rencana pengadaan seperti di tingkat nasional.

3.5.2 Persentase Jumlah Tender dengan Judul di bawah 20 Karakter

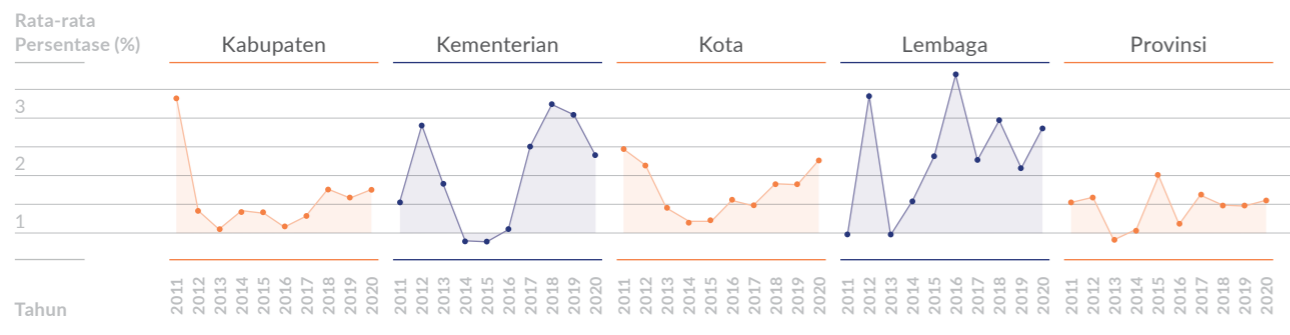
Tender dengan judul kurang dari 20 karakter memperlihatkan judul yang pendek dan tidak deskriptif yang dapat mengurangi kesempatan penyedia untuk menemukan dan memahami tender tersebut, begitu juga dengan masyarakat yang akan melakukan pengawasan.

Grafik 3.45 Persentase Jumlah Tender dengan Judul di bawah 20 Karakter secara Nasional 2011-2020



Grafik 3.45 menunjukkan adanya penurunan persentase tender yang memiliki judul kurang dari 20 karakter dari 2011 ke 2013 yaitu dari 2.5% menjadi 1.16%, kemudian meningkat sedikit hingga tahun 2020 mencapai hampir 1.91%. Contoh tender yang memiliki judul kurang dari 20 karakter, yaitu, Pengadaan Meubelair, Pembangunan Pagar, dan Penataan Lobi Utama.

Grafik 3.46 Persentase Tender dengan RUP berdasarkan Jenis K/L/PD 2011-2020



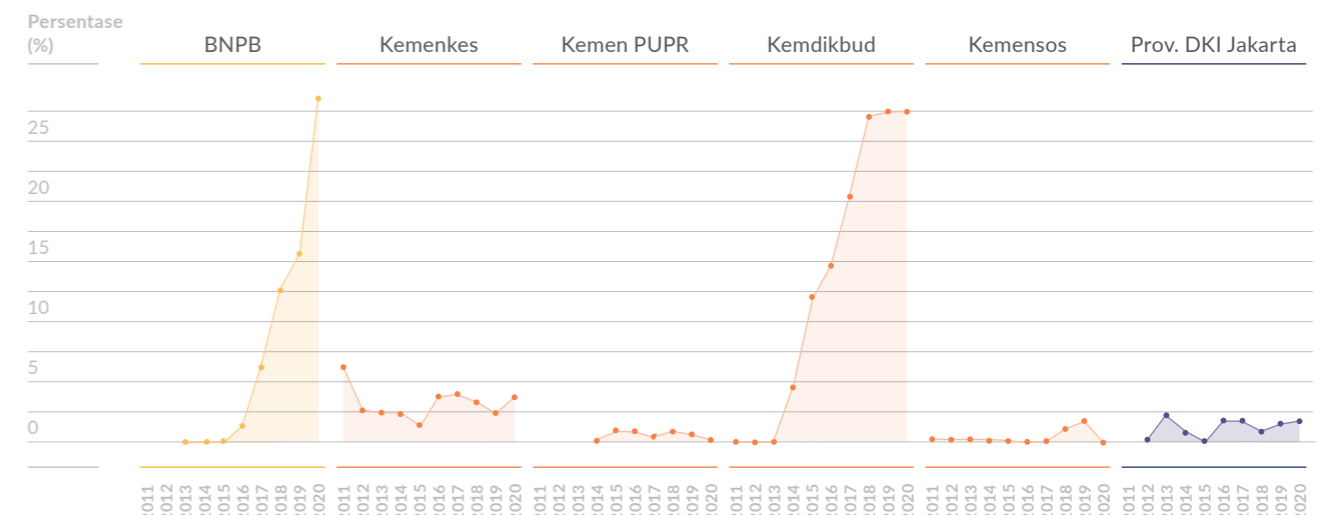
Mengacu grafik 3. 46, Kementerian adalah instansi yang mengalami penurunan persentase judul tender kurang dari 20 karakter pada 2019 ke 2020, yaitu 3% ke 2%. Artinya terjadi sedikit perbaikan integritas dalam tataran Kementerian dalam mempublikasi judul yang lebih lengkap. Peneliti kemudian melihat lebih jauh instansi yang judul pengadaannya kurang dari 20 karakter, diantaranya:

Tabel 3.15 Instansi yang Judul Pengadaan kurang dari 20 karakter

Nama K/L/PD	Tahun Anggaran	Persentase
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2020	28,57
Kabupaten Kepulauan Yapen	2020	18,18
Kota Kendari	2020	18,18
Kementerian Pariwisata	2020	13,95
Kabupaten Pesisir Barat	2020	13,47
Kabupaten Pinrang	2020	12,08
Kabupaten Sleman	2020	11,66
Kabupaten Tanah Datar	2020	10,81
Kabupaten Dharmasraya	2020	10,52
Kabupaten Trenggalek	2020	10,34

Meskipun secara nasional dan per jenis instansi dapat dikatakan cukup sedikit persentase pengadaan dengan judul kurang dari 20 karakter, namun jika di teliti lebih jauh secara spesifik di suatu lembaga, nama persentasenya lebih tinggi (grafik 3.48)

Grafik 3.48 Persentase Jumlah Tender dengan Judul di bawah 20 Karakter di 6 K/L/PD

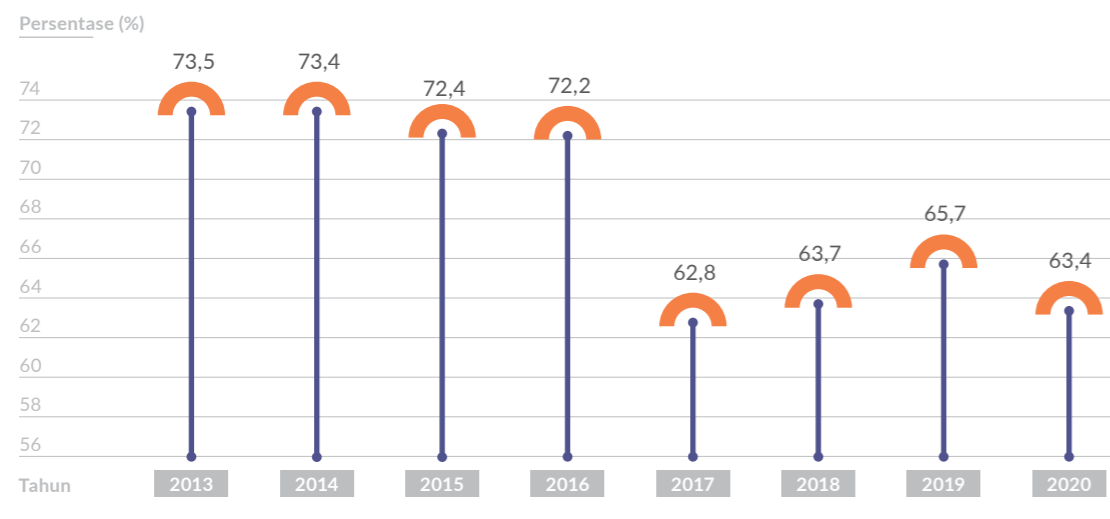


Berdasarkan grafik 3.48, BNPB adalah instansi yang integritasnya semakin berkurang karena persentase pengadaan yang judulnya kurang dari 20 karakter semakin meningkat pada 2020, yaitu mencapai hampir 30%. Pola serupa juga terjadi di Kemenkes dan Kemendikbud, pada 2020 mencapai 5% dan 7%. artinya kedua instansi ini juga berkurang integritasnya.

3.5.3 Persentase Jumlah Tender dengan Keterangan Deskripsi Kurang dari 60 Karakter

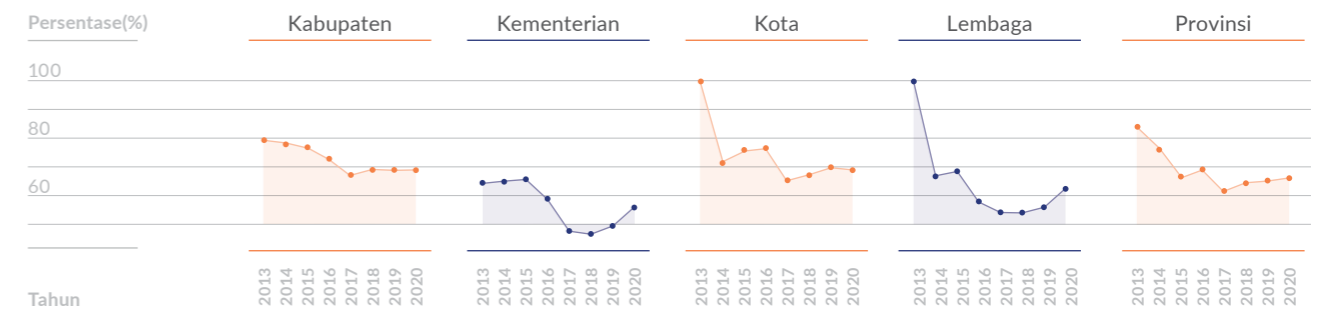
Deskripsi tender kurang dari 60 karakter menunjukkan penjelasan yang singkat akan sebuah tender yang akan dilakukan pemerintah. Deskripsi tender yang singkat dapat mengurangi kesempatan calon penawar untuk menemukan dan memahami pengumuman tersebut. Hal ini dapat menyebabkan lebih sedikit calon penawar yang memilih untuk menawar nantinya. Di sisi lain, bagi masyarakat, sulit melakukan pengawasan karena minimnya informasi yang tersedia.

Grafik 3.49 Persentase Jumlah Tender dengan Keterangan Deskripsi Kurang dari 60 Karakter secara Nasional 2013-2020



Grafik 3.49 menunjukkan persentase tender yang memiliki deskripsi kurang dari 60 karakter dalam kurun waktu 2013 - 2020 menurun dari 73.5% menjadi 63.4%. Artinya ada perbaikan dari segi transparansi karena informasi yang disampaikan sedikit lebih lengkap.

Grafik 3.50 Persentase Jumlah Tender dengan Keterangan Deskripsi Kurang dari 60 Karakter berdasarkan Jenis K/L/PD 2013-2020



Grafik 3.50 juga menunjukkan tren serupa dengan yang terjadi secara nasional, yaitu menurunnya persentase jumlah tender dengan deskripsi kurang dari 60 karakter di masing - masing jenis K/L/P/D.

Persentase yang masih cukup tinggi terhadap deskripsi tender yang kurang dari 60 karakter secara nasional maupun per jenis K/L/P/D (rata - rata 60%) menandakan kurangnya transparansi. Selain itu, deskripsi tender yang singkat dapat mengurangi kesempatan calon penawar untuk menemukan dan memahami pengumuman tersebut. Hal ini dapat menyebabkan lebih sedikit calon penawar yang memilih untuk menawar nantinya. Contoh keterangan yang disampaikan, "aspal", "yupsz", "1 paket". Padahal seharusnya deskripsi harus lebih jelas mengenai pengadaan yang akan dilakukan.

Peneliti kemudian mencoba melihat lebih jauh apakah ada instansi yang seluruh deskripsi pengadaannya kurang dari 60 karakter, diantaranya:

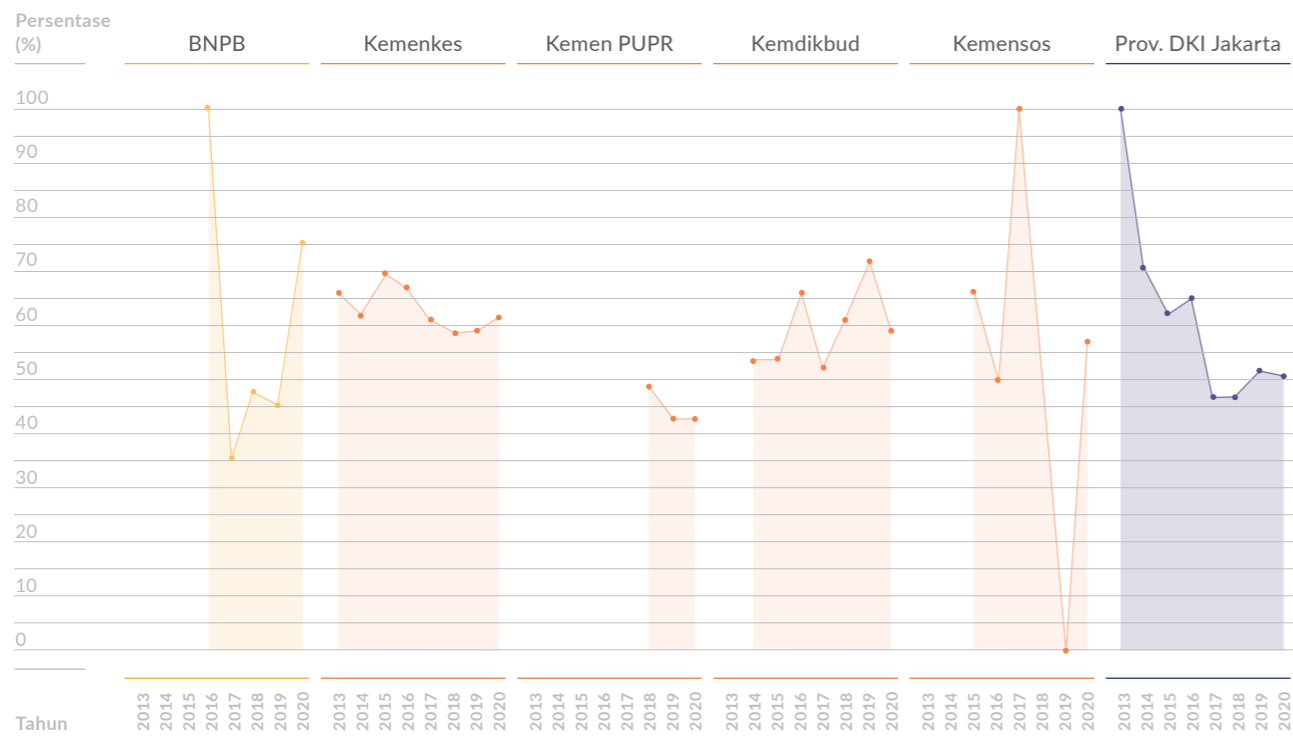
Tabel 3.16 Instansi dengan Tender yang seluruh deskripsinya Kurang dari 60 Karakter

Nama K/L/PD	Tahun Anggaran	Persentase Deskripsi kurang 60 karakter	Jumlah Tender
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	2020	100	5
Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	2020	100	24
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	2020	100	24
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan	2020	100	3
Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang	2020	100	72
Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	2020	100	47

Nama K/L/PD	Tahun Anggaran	Persentase Deskripsi kurang 60 karakter	Jumlah Tender
Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir	2020	100	28
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	2019	100	382
Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu	2019	100	59
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo	2019	100	53
Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta	2019	100	129
Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya	2019	100	127
Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung	2018	100	172
Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo	2018	100	139
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur	2018	100	243
Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis	2018	100	136
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat	2018	100	152

Berdasarkan 6 instansi (grafik 3.52), analisis untuk Kemensos dikeluarkan karena data yang kurang memadai. secara umum, persentase tender yang memiliki deskripsi kurang dari 60 karakter masih berkisar di 40-60%.

Grafik 3.52 Persentase Jumlah Tender dengan Keterangan Deskripsi Kurang dari 60 Karakter di 6 K/L/PD



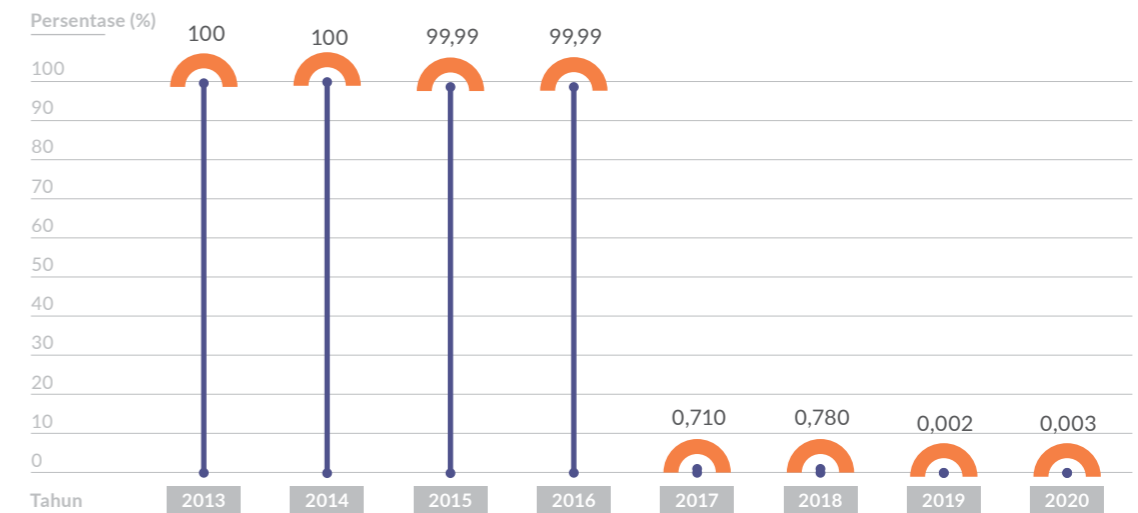
Grafik 3.52 memperlihatkan secara umum di ke-enam instansi tender dengan deskripsi kurang dari 60 karakter berkisar antara 40-60%. Indikator ini tidak menganalisis tender di 6 instansi di atas dengan karakter lebih dari 60. Oleh karena itu, grafik 3.52 memperlihatkan ada beberapa tahun yang tidak ada data yang diasumsikan judul pengadaan di tahun tersebut lebih dari 60 karakter.

3.5.4 Persentase Jumlah Tender Tanpa Informasi Jenis Pengadaan

Persentase tender yang tidak memiliki informasi jenis pengadaan lebih tinggi, dapat menandakan kurangnya transparansi. Informasi mengenai jenis pengadaan yang tidak tersedia mengurangi kesempatan bagi calon penawar untuk menemukan dan memahami pengumuman tersebut. Hal ini dapat menyebabkan lebih sedikit calon penawar yang memilih untuk menawar.

Jenis pengadaan terdiri dari 4 tipe, yaitu, barang, pekerjaan konstruksi, konsultasi dan jasa lainnya. Informasi ini mempermudah masyarakat dan penyedia untuk mengetahui lebih lanjut jenis pengadaan pemerintah jika belum terwakili dari judul tender maupun deskripsinya.

Grafik 3.53 Persentase Jumlah Tender Tanpa Informasi Jenis Pengadaan Secara Nasional 2013-2020

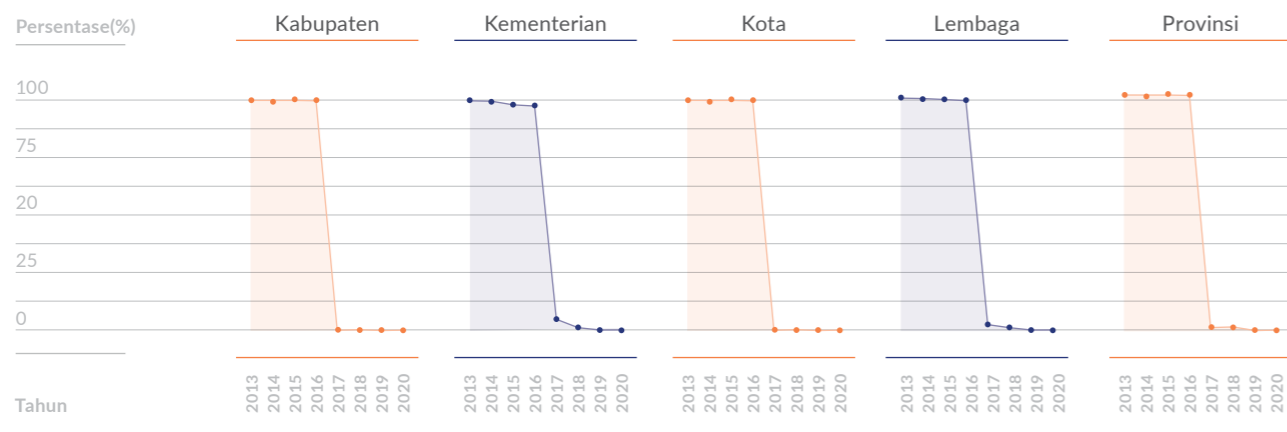


Persentase tender yang tidak memberikan informasi mengenai jenis pengadaannya berkurang signifikan, dari 100% pada 2013 menjadi 0.003% pada 2020 (grafik 3.53).

Kebijakan baru diperkenalkan pada tahun 2011 yang mewajibkan semua instansi pemerintah untuk mempublikasikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) mereka. Dalam rencana pengadaan ini, mereka mencantumkan detail kode jenis pengadaan. Pada tahun 2013, Sistem Informasi Rencana Pengadaan (SiRUP) terintegrasi dengan SPSE. Sistem SPSE mengharuskan pemerintah menginput RUP sebelum proses tender dimulai. Jika tidak, proses tidak dapat dilanjutkan/diblokir. Hal ini termasuk memasukkan jenis pengadaan dalam sistem¹⁵¹.

Tidak tercapainya 100% tender yang memiliki informasi jenis pengadaan pada dalam 4 tahun terakhir (2017 - 2020) kemungkinan karena kesalahan data dan/atau download yang tidak lengkap dari masing-masing LPSE ke LKPP¹⁵².

Grafik 3.54 Persentase Jumlah Tender Tanpa Informasi Jenis Pengadaan berdasarkan Jenis K/L/PD 2013-2020



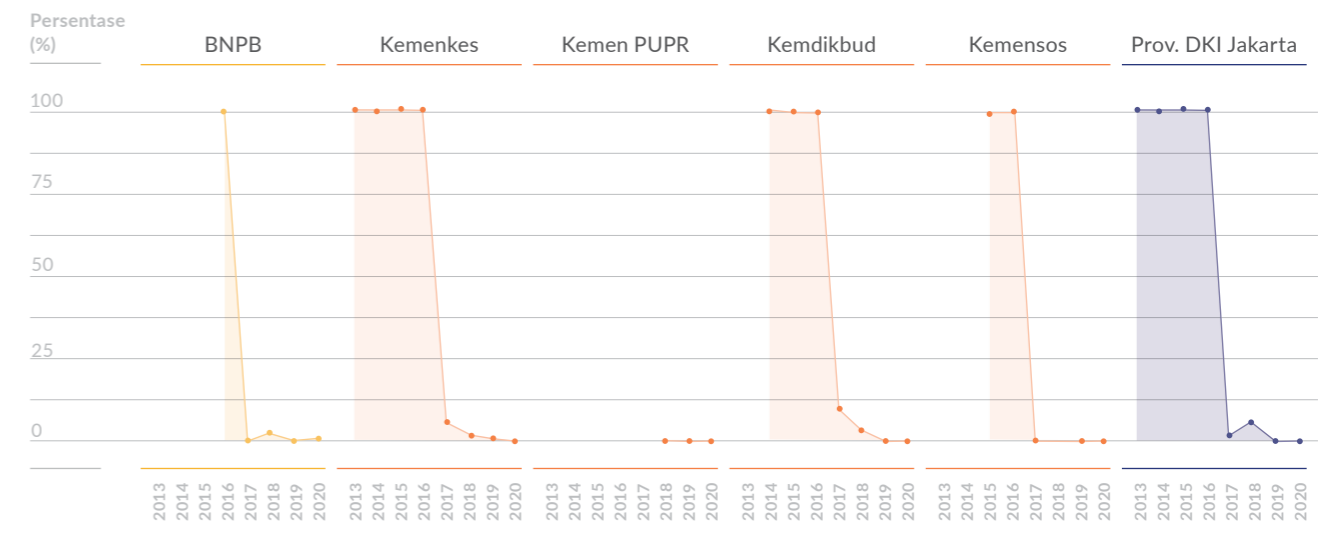
Tren penurunan persentase tender yang tidak memberikan informasi mengenai jenis pengadaan juga terjadi per jenis instansi (3.54).

Hal ini menunjukkan pemerintah semakin terbuka terhadap informasi pengadaan dan mengindikasikan integritas yang lebih baik.

¹⁵¹ Fajar Adi Hemawan. Analisis Kebijakan Madya pada Direktorat Pengembangan SPSE. Diskusi daring dengan LKPP 2 Maret 2021

¹⁵² Ibid.

Grafik 3.55 Persentase Jumlah Tender Tanpa Informasi Jenis Pengadaan di 6 K/L/PD 2013-2020



Berdasarkan keempat indikator diatas (3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, dan 3.5.4) yang mencerminkan integritas, dalam hal kepatuhan menyampaikan informasi mengenai RUP pemerintah memang sudah cukup baik (persentase yang tinggi pada grafik 3.41). Sayangnya hal ini tidak diikuti dengan kualitas data yang disampaikan. Sebagaimana terlihat (indikator 3.5.2, 3.5.3, dan 3.5.4), masih cukup banyak pengadaan yang dilakukan pemerintah tanpa memberikan informasi yang memadai. Misalnya dari judul yang terlalu minim sehingga sulit bagi orang untuk memahaminya, atau deskripsi pengadaan yang kurang jelas, seperti "informasi mengacu KAK (Kerangka Acuan Kerja)", dan "sesuai TOR".

Padahal pemerintah secara spesifik telah mengatur kewajiban menyampaikan informasi yang cukup rinci dalam RUP yang secara spesifik diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No 7/2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. sayangnya, informasi yang disampaikan baru sebatas menggugurkan kewajiban, tidak sepenuh hati menyampaikan informasi yang lengkap dan jelas.

Menyampaikan informasi pengadaan yang jelas dan rinci bukan hanya menunjukkan bagaimana integritas sebuah instansi, tapi juga terkait dengan nilai transparansi. Jika kita mengacu pada Undang-Undang No 14/2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 11 menyebutkan bahwa "Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

1. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
2. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
3. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
4. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
5. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
6. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
7. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
8. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

Peneliti kemudian mengkaji lebih lanjut tingkat akses informasi pengadaan yang disajikan LKPP melalui berbagai platform. Data yang dipublikasikan pada platform tersebut merupakan tanggungjawab masing - masing instansi pemerintah untuk menginput. Dengan demikian, kualitas data akan tergantung pada proses entri data setiap instansi pemerintah. Analisis lebih lanjut ditunjukkan pada Tabel 3.17 di bawah ini

¹⁵³ Sistem Rencana Umum Pengadaan <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro>, diakses pada 26 Februari 2021

¹⁵⁴ Layanan Pengadaan Secara Elektronik <http://inaproc.id/lpse> . diakses pada 26 Februari 2021

¹⁵⁵ Monitoring dan Evaluasi Pengadaan, <https://monev.lkpp.go.id/> . diakses pada 26 Februari 2021

¹⁵⁶ Portal Pengadaan Nasional. <http://inaproc.id/> . diakses pada 26 Februari 2021

¹⁵⁷ Sistem Informasi Kinerja Penyedia, <https://sikap.lkpp.go.id/> . diakses pada 26 Februari 2021

¹⁵⁸ Sebuah perusahaan dapat dikategorikan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atau berdasarkan Sertifikat Badan Usaha (SBU). SBU digunakan untuk perusahaan yang bergerak dalam pekerjaan konstruksi.

Tabel 3.17 Implementasi PBJ dan Akses terhadap Informasi

SIRUP ¹⁵³	LPSE ¹⁵⁴	Monev Tepra ¹⁵⁵	INAPROC ¹⁵⁶	SIKAP ¹⁵⁷
Rencana Pengadaan	Proses Tender	Implementasi	Rencana Pengadaan, Daftar Hitam, LPSE	Sistem informasi penyedia
Bisa diakses publik	Bisa diakses publik	Bisa diakses publik	Bisa diakses publik	Bisa diakses publik sebagian
bisa diakses melalui website tapi tidak dapat di unduh	bisa diakses melalui website tapi tidak dapat di unduh	bisa diakses melalui website tapi tidak dapat di unduh	bisa diakses melalui website tapi tidak dapat di unduh	bisa diakses melalui website tapi tidak dapat di unduh
Informasi yang tersedia: <ul style="list-style-type: none"> • kode RUP • nama paket Penyedia; • kebutuhan penggunaan produk dalam negeri; • peruntukkan paket untuk Usaha kecil atau non kecil; • lokasi Pekerjaan; • metode pemilihan • sumber dana; • besarnya total perkiraan biaya pekerjaan; • uraian pekerjaan; • volume pekerjaan; • spesifikasi teknis/ KAK; • perkiraan jadwal Pengadaan Barang/Jasa 	sebagian informasi yang ada di Sirup, ditambah: <ul style="list-style-type: none"> • kode tender • status tender • tanggal proses tender • peserta yang mendaftar • peserta yang memberikan penawaran beserta nilainya • pemenang • HPS • harga terkoreksi • harga negosiasi • syarat kualifikasi • pemenang berkontrak • hasil evaluasi 	Progres pelaksanaan pengadaan	informasi yang tersedia: <ul style="list-style-type: none"> • nama perusahaan • bentuk usaha • NPWP • kualifikasi (kecil/ menengah/ besar) • kualifikasi izin usaha¹⁵⁸ • status perusahaan (pusat/ cabang) • berapa kali menang tender 	
Kualitas data bermasalah dari poin 9 - poin 12.	Kualitas bermasalah dari poin 11- poin 12	Seluruh informasi mengenai perkembangan pengadaan tidak tersedia/ kualitas bermasalah.	Keterlambatan dalam mempublikasikan informasi Daftar Hitam.	

Jika mengacu pada tabel 3.17, sebenarnya pemerintah memang sudah cukup banyak menyediakan kanal untuk menginformasikan proses PBJ. Sayangnya kembali lagi ke permasalahan kualitas data dan bagaimana data bisa dipergunakan lebih lanjut. Misalnya kanal Monev Tepra yang tujuannya untuk menginformasikan progres dari pengadaan di tiap instansi. Seringkali informasi tidak tersedia karena instansi tidak memperbaharui datanya. Selain itu, Walaupun ada data yang tersedia seperti di Sirup atau LPSE, datanya tidak dapat diolah lebih lanjut karena tidak bisa di unggah. Lebih jauh, bahkan data SIKAP saat ini belum bisa diakses, sehingga sulit untuk melihat rekam jejak kinerja penyedia. Kedepan, pemerintah seharusnya dapat membuka data ini agar masyarakat umum juga dapat mengetahui bagaimana kinerja penyedia pemerintah.

Kurang lengkapnya informasi dan data yang disediakan oleh kanal diatas, menyebabkan masyarakat terkendala dalam melakukan pemantau atas pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah. Apabila masyarakat mengajukan permintaan informasi atas data pengadaan, tidak jarang instansi pemerintah menolak dengan alasan informasi tersebut adalah informasi yang dikecualikan/ rahasia sehingga tidak dapat diakses¹⁵⁹.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengintegrasikan berbagai kanal yang sudah ada, agar proses pencarian data terkait pengadaan lebih mudah bagi masyarakat. Termasuk mengintegrasikan dengan sistem lainnya yang terkait, misal data kepemilikan perusahaan dan penerima manfaat (Beneficial Ownership) yang dikelola Kementerian Hukum dan Ham. Pengintegrasian data ini dengan SIKAP akan membantu panitia pengadaan maupun masyarakat dalam memastikan kualifikasi, rekam jejak, dan memudahkan pemantauan atas tender yang berlangsung.

Selanjutnya, data pengadaan yang dikelola pemerintah juga tidak memiliki pengelompokan berdasarkan isu sektoral yang diwajibkan oleh undang - undang, seperti anggaran kesehatan 10%¹⁶⁰, pendidikan 20%¹⁶¹. Meskipun jumlah alokasi tersebut tidak seluruhnya terkait dengan pengadaan, namun adanya data terpilah yang menunjukkan pengelompokan tersebut akan memudahkan pemerintah untuk melihat belanja pengadaan di sektor - sektor itu.

¹⁵⁹ ICW, Implementing Open Contracting in Indonesia <https://www.antikorupsi.org/en/article/implementing-open-contracting-indonesia>

¹⁶⁰ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 171. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009> diakses pada 26 Februari 2021

¹⁶¹ Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 49. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003> diakses pada 26 Februari 2021

3.6 Red Flag

3.6.1 Pengadaan dengan Nilai Kontrak Tertinggi

Tabel 3.18 Pengadaan dengan Nilai Kontrak Tertinggi Secara nasional 2011-2010

Tahun Anggaran	Judul Tender	Jenis Pengadaan	Nama K/L/PD	Nama Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)
2011	Pembangunan Jalan Samarinda - Sangasanga (TPK Palaran)	Pekerjaan Konstruksi	-	PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK CABANG VI KALIMANTAN	358.542.333.000
2012	Pengadaan Vaksin Reguler	Pengadaan Barang	Kementerian Kesehatan	PT. BIO FARMA	564.074.280.418
2013	Investor dan Operator Bus Untuk Koridor 2 dan 3 Transjakarta Busway Tahap 2	Jasa Lainnya	-	PRIMA LESTARI WISATA	1.140.183.012.276
2014	Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Untuk Manggarai s/d Jatinegara "Pekerjaan Sipil" (tidak mengikat)-	Pekerjaan Konstruksi	-	PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)	1.019.528.521.000
2015	Pengadaan Pesawat Latih Sayap Tetap Single Engine	Pengadaan Barang	Kementerian Perhubungan	PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)	637.230.000.000
2016	Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak Pekerjaan Terintegrasi Rancang Bangun Pembangunan Stadion Utama Provinsi Papua	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Papua	PT. PP (PERSERO) TBK	1.392.477.000.000
2017	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu Phase III	Pekerjaan Konstruksi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION	2.237.279.489.422
2018	Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Paket 4 (MYC)	Pekerjaan Konstruksi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PT. BRANTAS ABIPRAYA (DIVISI 2)	1.372.371.000.000

Tahun Anggaran	Judul Tender	Jenis Pengadaan	Nama K/L/PD	Nama Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)
2019	Pembangunan Bendungan Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah	Pekerjaan Konstruksi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	1.029.707.800.076
2020	Pembangunan Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi 3 (Cileles-Panimbang)	Pekerjaan Konstruksi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	SINO ROAD AND BRIDGE GROUP CO., LTD	4.585.032.615.891

Tabel 3.18 menunjukkan pengadaan dengan nilai kontrak paling besar di masing-masing tahun. Dari data tersebut, pengadaan yang memiliki nilai kontrak besar didominasi dengan pekerjaan konstruksi dan sebagian besar dimenangkan oleh BUMN.

Dari 10 penyedia, dua diantaranya merupakan perusahaan yang berasal dari China. Pertama, China Road and Bridge Corporation merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di jasa konstruksi¹⁶². Pada 2017 memenangkan tender Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu Phase III dengan nilai kontrak Rp 2,23 Triliun dengan sumber dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) tahun 2017¹⁶³. Pekerjaan ini disupervisi oleh PT Seecons dengan nilai tender supervisi mencapai Rp 7,1 Miliar¹⁶⁴. Pemerintah mengambil alih sebagian besar pekerjaan ini (55%) pada 2019 karena proses pembangunan yang lambat¹⁶⁵.

Kedua, Sino Road and Bridge Group Corporation (SRBGC) adalah perusahaan bergerak di jasa konstruksi¹⁶⁶. Pada 2020 memenangkan tender Pembangunan Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi 3 (Cileles-Panimbang) dengan nilai kontrak Rp 4,58 Triliun dengan sumber dana APBN 2020¹⁶⁷.

¹⁶² China Road & Bridge Corporation, <https://www.crbc.com/site/crbcEN/Introduction/index.html> diakses pada 9 Maret 2021

¹⁶³ LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. <https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/31226064/pengumumanlelang> diakses pada 9 Maret 2021

¹⁶⁴ LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. <https://lpse.pu.go.id/eproc4/evaluasi/67560064/pemenang> diakses pada 9 Maret 2021

¹⁶⁵ Tribun, Kerja Lelet Kementerian PUPR Ambil Alih Lokasi Kerja Kontraktor China, <https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/09/05/kerja-lelet-kementerian-pupr-ambil-alih-lokasi-kerja-kontraktor-china> diakses pada 26 Agustus 2021

¹⁶⁶ CSIS.org <https://reconnectingasia.csis.org/database/organizations/sino-road-and-bridge-co-ltd/489a4b20-1ff7-4b8f-8897-8efb663476b1/> diakses pada 9 Maret 2021

¹⁶⁷ LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. <https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/58801064/pengumumanlelang> diakses pada 9 Maret 2021

Pekerjaan ini dilakukan dengan skema Joint Venture (JV), dimana porsi pekerjaan dari nilai kontrak, antara lain PT Adhi Karya sebesar 22,5%, PT Wijaya Karya 22,5% dan SRBGC sebesar 55%¹⁶⁸.

SRBGC bukan pertama kali memenangkan tender pemerintah Indonesia. Pada tender lainnya, rekam jejak SRBGC kurang baik. Pada 2017, memenangkan proyek Tol Manado-Bitung di Sulawesi Utara dimana pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan target, realisasi fisik baru 13,47% yang seharusnya 26,06%¹⁶⁹. Selain itu, pembangunan tol tersebut juga bermasalah dengan pembayaran kepada sub kontraktor yang terlambat¹⁷⁰. Mengingat kinerja SRBGC yang buruk, tidak jelas mengapa pemerintah masih memenangkan perusahaan ini dengan pekerjaan yang serupa.

3.6.2 Pengadaan di Kuartal ke-Empat

Indikator ini memperlihatkan jumlah tender di kuartal 4 (Oktober, November, Desember) dengan tahun tunggal dan bukan tender pradipa¹⁷¹. Seringkali pengadaan di kuartal empat dikaitkan dengan menghabiskan anggaran dan cenderung tidak memiliki perencanaan yang baik, serta memiliki potensi kecurangan yang lebih tinggi.



¹⁶⁸ CNBC.com. Adhi Wika Garap Jalan Tol Serang Panim. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201125091424-17-204417/adhi-wika-garap-jalan-tol-serang-panimbang-rp-41-t> diakses pada 9 Maret 2021

¹⁶⁹ Kompas.com. Basuki Bakal Tendang Kontraktor Tol Manado-Bitung Asal China <https://properti.kompas.com/read/2017/11/14/091818221/basuki-bakal-tendang-kontraktor-tol-manado-bitung-asal-china> diakses pada 9 Maret 2021

¹⁷⁰ Madanoterkini.com. Subkon Proyek Tol Keluhkan Sikap PT Sino Road and Bridge Group.Co.Ltd dan PT Hutama Karya. <https://www.madanoterkini.com/2017/10/52932/subkon-proyek-tol-keluhkan-sikap-pt-sino-road-and-bridge-group-co-ltd-dan-pt-hutama-karya/> diakses pada 9 Maret 2021

¹⁷¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pasal 50 ayat 9 dan 10 menyebutkan bahwa: Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah:

- penetapan Pagu Anggaran K/L; atau
- persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Jadi tender pradipa adalah tender yang dilakukan sebelum tahun anggarannya berjalan. Misalnya pengadaan dengan tahun anggaran 2021, tendernya dilakukan pada Desember 2020.

Tabel 3.19 Jumlah Pengadaan di Kuartal 4 Nasional 2011-2020

Tahun Anggaran	Jasa Konsultansi	Jasa Lainnya	Pekerjaan Konstruksi	Pengadaan Barang	Total
2011	62	93	255	1.025	1.435
2012	85	221	687	1.707	2.700
2013	212	456	733	2.968	4.369
2014	163	390	682	2.715	3.950
2015	580	542	1.123	2.705	4.950
2016	626	290	1.078	1.727	3.721
2017	577	416	1.465	1.460	3.918
2018	166	383	986	1.879	3.414
2019	68	204	753	1.532	2.557
2020	198	179	1.074	2.304	3.755
Total	2.737	3.174	8.836	20.022	34.769

Tabel 3.19 menunjukkan dari tahun 2011-2020, pengadaan di kuartal 4 di dominasi oleh pengadaan barang (58%) dan pekerjaan konstruksi (25%) (tabel 3.19). Pengadaan barang mendominasi pengadaan di kuartal empat karena cenderung penghabisan anggaran dengan membeli barang lebih mudah. Sebagai pengadaan terbanyak kedua, pekerjaan konstruksi di kuartal 4 perlu dianalisis lebih jauh, khususnya jika pengadaannya merupakan tahun tunggal, dimana pekerjaan konstruksi harus diselesaikan maksimal dalam 3 bulan.

Jumlah pengadaan di kuartal keempat paling tinggi ditemukan pada tahun 2015 dengan jumlah 4.950 tender yang didominasi oleh pengadaan barang dan pekerjaan konstruksi. Hal ini mungkin dapat dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak pada 9 Desember 2015. Pilkada diikuti oleh 269 daerah dimana 53%¹⁷² merupakan calon incumbent. Sehingga potensi untuk menggunakan anggaran daerah demi kepentingan Pilkada cukup besar yang salah satu caranya melalui belanja barang/ jasa.

Setelah 2015, tren meningkat secara signifikan. Ada penurunan 48% secara nasional untuk pengadaan di kuartal keempat dari 4.950 (tahun 2015) menjadi 2.557 (tahun 2019) tender. Tren yang sama juga terlihat pada jasa konsultansi dengan penurunan 88% selama 4 tahun dari 626 menjadi 68 tender. Tren

¹⁷² Detik.com, Ada 145 Calon Incumbent yang Akan Bersaing di Pilkada 2015, <https://news.detik.com/berita/d-2979930/ada-145-calon-incumbent-yang-akan-bersaing-di-pilkada-2015> diakses pada 15 Mei 2021

penurunan pekerjaan konstruksi terlihat pada tahun 2019 dimana terjadi penurunan 49% selama 2 tahun dari 1.465 (tahun 2017) menjadi 753 tender (tahun 2019).

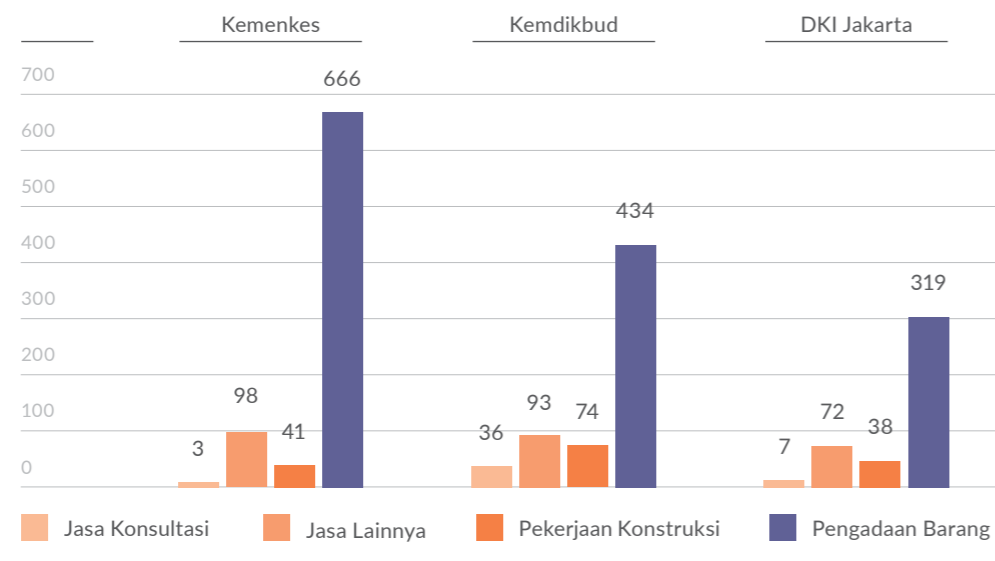
Namun, terjadi peningkatan pengadaan di kuartal 4 menjadi 46,9% pada tahun 2020 dari 2.557 (tahun 2019) menjadi 3.755 pengadaan (tahun 2020). Peningkatan pengadaan pada kuartal 4 di tahun 2020 dapat dimaklumi karena pada awal tahun 2020, seluruh instansi pemerintah fokus pada penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk memfokuskan kembali anggaran dan mengizinkan setiap instansi untuk menghentikan atau menunda pengadaan yang sedang berlangsung atau yang direncanakan. Banyaknya pengadaan di kuartal 4 ini kemungkinan karena Covid-19 dinilai cukup terkendali sehingga pemerintah bisa mulai menjalankan rencana pengadaannya.

Tabel 3.20 Pengadaan di Kuartal Empat di 6 K/L/PD

Nama K/L/PD	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Badan Nasional Penanggulangan Bencana							3	2	9		14
Kementerian Kesehatan	131	77	87	64	80	45	69	75	58	122	808
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					6	12	32	25	62	31	168
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	76	131	156	79	58	51	11	37	30	8	637
Kementerian Sosial		3	2							1	6
Provinsi DKI Jakarta			31	199		55	27	80	20	24	436
Total	207	211	276	342	144	163	142	219	179	186	2.069

Jika membandingkan antara 6 instansi diatas, maka dalam 10 tahun, Kementerian Kesehatan yang paling banyak pengadaan di kuartal 4. Kemudian diikuti dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Provinsi DKI Jakarta.

Grafik 3.57 Jenis Pengadaan di Kemenkes, Kemdikbud, dan DKI Jakarta di Kuartal 4 Tahun 2011-2020



Grafik diatas menunjukkan jenis pengadaan yang paling banyak dilakukan dalam kuartal 4 pada ketiga instansi (grafik 3.57) adalah pengadaan barang, diikuti oleh pekerjaan konstruksi. Contoh pengadaan di Kementerian Kesehatan di kuartal 4 pada tahun 2020, “Pengadaan Alat Kesehatan Tahap 1 sebanyak 86 (delapan puluh enam) Jenis Alat Kesehatan dengan Dana BA-BUN 2 Tahun 2020 Non E- Catalogue (Pengadaan Alat Kedokteran Mesin Sterilisasi Suhu Rendah Gas Ethylene Oxide dilengkapi Abator di Instalasi Sterilisasi Pusat)”, “Pekerjaan Renovasi Gedung dan Bangunan BPFK Jakarta 2020”.

3.7 Opentender sebagai Platform Data dan Informasi serta Dampak Pelibatan Pengguna Data

3.7.1 Dampak Pelibatan Pengguna Data

Penelitian ini menggali data terkait penggunaan, manfaat, dan dampak ketersediaan data PBJ di platform opentender.net ke empat (4) kelompok sasaran, yakni akademisi, pemerintah (APIP), jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil.

a. Akademisi

Tabel 3.21. Manfaat Opentender Bagi Akademisi/ Tenaga Pengajar¹⁷³

Akademisi	
Latar belakang pengguna	Tenaga Pengajar pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Katolik Parahyangan ¹⁷⁴
Mengetahui opentender.net dari	2016 dari Sely Martini (ICW) saat diundang sebagai narasumber dalam kelas yang diasuh ¹⁷⁵ .
Terakhir kali penggunaan	November 2020 ¹⁷⁶ .
Intensitas akses opentender.net	Minimal 2 kali per kelas per semester pada tahun 2016-2018 ¹⁷⁷ .
Penggunaan data opentender	Sebagai akademisi, terdapat peluang bagi peneliti untuk melakukan riset dengan topik PBJ ¹⁷⁸ . Pemerintah mewajibkan tugas pokok Jabatan Akademik Dosen adalah melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ¹⁷⁹ sebagaimana syarat yang diatur untuk kenaikan jabatan dan pangkat ¹⁸⁰ , penelitian dapat menjadi salah satu aspek dalam penetapan angka kredit. Data opentender digunakan untuk bahan mengajar pada Mata Kuliah Penganggaran Publik dan Mata Kuliah <i>ICT For Public Administration</i> pada tahun 2016, 2017. Juga Mata Kuliah <i>Governansi Digital</i> dan Mata Kuliah <i>Etika Administrasi Publik</i> pada tahun 2018 ¹⁸¹ . Selain sebagai materi ajar pada 2016-2018, mulai tahun 2019- 2020, data opentender digunakan sebagai data awal untuk riset kolaborasi internasional antara Universitas Parahyangan bersama tim peneliti Perancis.
Keuntungan penggunaan data opentender	Opentender menjadi informasi pembanding dari data LPSE dalam penelitian terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Contohnya melakukan riset kolaborasi ¹⁸² .

¹⁷³ Informan 1. Akademisi. Wawancara Daring, 28 Januari 2021.

¹⁷⁴ Ibid.

¹⁷⁵ Ibid.

¹⁷⁶ Ibid.

¹⁷⁷ Ibid.

¹⁷⁸ Ibid.

¹⁷⁹ Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Pasal 3. <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2015/08/PERBERSAMA-MENDIKBUD-NO.4-VIII-PB-2014-DAN-KEPALA-BKN-NO.24-TAHUN-2014-KETENTUAN-PELAKSANAAN-PERMPAN-DAN-RB-NO.17-TAHUN-2013-DIUBAH-DENGAN-PERMPAN-DAN-RB-NO.46-TAHUN-2013-TENTANG-JF-DOSEN-DAN-AK.pdf> diakses pada 26 Februari 2021.

¹⁸⁰ Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Pasal 29 dan Pasal 30. <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2015/08/PERBERSAMA-MENDIKBUD-NO.4-VIII-PB-2014-DAN-KEPALA-BKN-NO.24-TAHUN-2014-KETENTUAN-PELAKSANAAN-PERMPAN-DAN-RB-NO.17-TAHUN-2013-DIUBAH-DENGAN-PERMPAN-DAN-RB-NO.46-TAHUN-2013-TENTANG-JF-DOSEN-DAN-AK.pdf> diakses pada 26 Februari 2021.

¹⁸¹ Informan 1. Akademisi. Wawancara Daring, 28 Januari 2021.

¹⁸² Ibid.

Akademisi	
Penggunaan oleh pihak ketiga berdasarkan referral	Dari 480 mahasiswa yang terpapar opentender, 2 orang menyusun skripsi dengan tema opentender, yaitu: Skripsi pertama yang ditulis pada 2019 mengambil kesimpulan bahwa transparansi melalui opentender oleh ICW (Indonesia Corruption Watch) masih belum optimal dalam melibatkan publik untuk memantau pengadaan sebagai upaya pencegahan korupsi ¹⁸³ . Skripsi kedua, menganalisa opentender.net dan menyatakan bahwa pelanggaran pengadaan barang/jasa yang terkena sanksi daftar hitam disebabkan oleh aktor-aktor pengadaan yang tidak berperilaku etis berintegritas ¹⁸⁴ . Kedua mahasiswa tersebut melakukan penelitian untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat kelulusan. Hasil penelitian oleh mahasiswa tersebut tidak ditindaklanjuti sebagai bahan advokasi.
Bagaimana proses penggunaan oleh pihak ketiga berdasarkan referral	Mahasiswa melihat database opentender, Top 10 dan top project untuk bahan pembelajaran dan sebagai tugas kelompok ¹⁸⁵ .



Profil Singkat Pengguna

Informan 1 merupakan akademisi dan tenaga pengajar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung - Jawa Barat.

Manfaat Opentender sebagai Materi Kuliah Tenaga Pendidik di Universitas

Opentender.net juga dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran. Data dan informasi yang tersedia dalam platform tersebut dijadikan materi dan medium ajar pada 2 mata kuliah, pada tahun 2016 hingga 2017, yaitu: Kelas Penganggaran Publik dan ICT For Public Administration. Pada tahun 2018, Mata Kuliah Penganggaran Publik dan Mata Kuliah *ICT For Public Administration* dihapus, diganti dengan Mata Kuliah Governance Digital dan Mata Kuliah Etika Administrasi Publik. Informan 1 tetap menggunakan opentender dalam proses mengajar di kedua mata kuliah tersebut¹⁸⁶.

¹⁸³ Natasja Calista. 2019. Analisa Aksiomatis antara Transparansi terhadap Korupsi melalui Opentender oleh *Indonesia Corruption Watch*. Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

¹⁸⁴ Dayva Constantia Viola. 2020. Analisis Pelanggaran Terhadap Mekanisme Daftar Hitam Oleh Pengada Barang dan Jasa Pemerintah di Kota Bandung. Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

¹⁸⁵ Informan 1. Akademisi. Wawancara Daring. 28 Januari 2021.

¹⁸⁶ Ibid.

Kedua mata kuliah tersebut memiliki 2 kelas tiap tahunnya dengan jumlah mahasiswa/i 40 orang tiap kelas. Dari segi mahasiswa yang terpapar informasi dan data yang ada dalam opentender.net, terdapat setidaknya 480 orang mahasiswa/i yang mengetahui Opentender dari 2016-2018. Dari 480 mahasiswa tersebut, terdapat sekitar 80 laporan/tugas setiap tahunnya yang dihasilkan dari kedua mata kuliah tersebut yang menggunakan data dari opentender.net¹⁸⁷.

Dalam pengajaran mata kuliah Penganggaran Publik, Opentender digunakan agar mahasiswa dapat memahami perspektif bahwa masyarakat bisa melakukan *monitoring* (pengawasan) terhadap penggunaan *public money* (anggaran publik) melalui platform opentender tersebut. Sementara untuk Mata Kuliah *ICT For Public Administration*, mahasiswa diajari untuk melihat bagaimana upaya untuk mereformasi dan mentransformasi pemerintah agar bisa menjalankan pemerintahan yang menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas¹⁸⁸.

Manfaat Opentender sebagai Bahan Skripsi

Dari 480 peserta mahasiswa/i yang terpapar isu pengadaan barang dan jasa melalui platform Opentender.net, penelitian pertama muncul pada tahun 2019 yang memiliki kesimpulan bahwa transparansi melalui opentender oleh ICW (Indonesia Corruption Watch) masih belum optimal dalam melibatkan publik untuk memantau pengadaan sebagai upaya pencegahan korupsi¹⁸⁹. Penelitian tersebut menemukan bahwa pada tataran akses terhadap informasi, Opentender.net memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk melihat data pengadaan barang dan jasa dalam satu portal website secara bebas dengan penyajian data yang mudah digunakan, dioperasikan dan diunduh. Opentender juga dinilai belum memiliki kanal umpan balik bagi pengguna¹⁹⁰.

Penelitian kedua yang menganalisa opentender.net menyatakan platform tersebut membantu menunjukkan pelanggaran pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa yang terkena sanksi daftar hitam disebabkan oleh aktor-aktor pengadaan yang tidak berperilaku etis berintegritas.

¹⁸⁷ Ibid.

¹⁸⁸ Ibid.

¹⁸⁹ Natasja Calista. 2019. Analisa Aksiomatis antara Transparansi terhadap Korupsi melalui Opentender oleh *Indonesia Corruption Watch*. Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

¹⁹⁰ Ibid.

Saran yang diberikan oleh peneliti adalah pembuatan sistem penilaian kinerja bagi penyedia oleh LKPP yang mencakup umpan balik proyek yang telah dilakukan oleh penyedia, pelanggaran yang pernah dilakukan oleh pengadaan, dan penilaian publik setelah proyek selesai dilakukan¹⁹¹.

Opentender Belum Dapat Dijadikan Sumber Data Utama dalam Penelitian Akademisi

Sebagai akademisi, terdapat peluang bagi peneliti untuk melakukan riset dengan topik PBJ¹⁹².

Saat penelitian dilaksanakan, Informan 1 menggunakan data-data yang tersaji pada opentender sebagai data referensi dalam penggalan data awal untuk keperluan riset kolaborasi antara Universitas Katolik Parahyangan dan Tim Peneliti Perancis. Riset tersebut memiliki 2 tujuan yaitu: untuk melihat apakah ada perubahan dari aspek korupsi PBJ di Indonesia dan melihat apakah PBJ di Indonesia sudah menentukan aspek *socially responsible public procurement*. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, tim peneliti melakukan *cross-check* data opentender terhadap sumber data awal yakni LPSE¹⁹³.

Bagi Informan 1, opentender.net membantu proses penggalan penelitian untuk menyambungkan beberapa ide penelitian. Opentender.net dan data yang tersedia di dalamnya merupakan inspirasi topik penelitian. Contohnya adalah saat tim peneliti Perancis mengajukan proposal awal kolaborasi penelitian, fokus penelitian ada pada korupsi kepada Usaha Kecil dan Menengah. Setelah mendapat informasi bahwa telah dilakukan penelitian menggunakan data *time series* yang berasal dari opentender.net, fokus penelitian berubah menjadi aspek korupsi PBJ di Indonesia. Data dari opentender.net dijadikan sebagai referensi dalam penggalan data awal riset. Namun, data pada opentender.net masih belum dapat dijadikan sebagai bahan dan referensi utama penelitian, khususnya karena data yang tidak *realtime* sehingga ada perbedaan data dengan yang terdapat di LPSE pemerintah¹⁹⁴.

¹⁹¹ Dayva Constantia Viola. 2020. Analisis Pelanggaran Terhadap Mekanisme Daftar Hitam Oleh Pengada Barang dan Jasa Pemerintah di Kota Bandung. Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

¹⁹² Informan 1. Akademisi. Wawancara Daring. 28 Januari 2021.

¹⁹³ Ibid.

¹⁹⁴ Ibid.

b. Jurnalis

Tabel 3.22. Manfaat Opentender Bagi Jurnalis

	Jurnalis
Latar belakang pengguna	Delapan jurnalis di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bojonegoro - Jawa Timur ¹⁹⁵ yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan. Sejak 2017 sampai 2020, ICW telah melakukan pelatihan kepada 66 jurnalis (11 perempuan, 55 laki - laki) untuk mengakses dan menggunakan Opentender sebagai salah satu sumber data dalam penulisan artikel.
Mengetahui opentender.net dari	Para jurnalis mengetahui opentender dari berbagai kegiatan peningkatan kapasitas oleh jaringan masyarakat sipil dan jurnalis: <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Investigasi Berbasis Open Data pada Pilkada 2015 oleh Jaring.id¹⁹⁶; • Fellowship ICW 2017^{197 198}; • Pelatihan Audit Sosial Sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada 2019^{199 200}; • Pelatihan Antikorupsi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2019^{201 202}; • Workshop Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dan Jurnalis untuk Monitoring Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah pada 1-3 Juli 2019 di Yogyakarta^{203 204}; • Sosialisasi Opentender oleh Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) di Sekretariat AJI Makassar tahun 2016²⁰⁵; dan • Pelatihan Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa di ICW kolaborasi Klub Jurnalis Investigasi (KJI) tahun 2019²⁰⁶.

¹⁹⁵ Kelompok FGD Jurnalis. FGD Daring. 21 Januari 2021.

¹⁹⁶ Informan 7. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

¹⁹⁷ Informan 5. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

¹⁹⁸ Informan 6. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

¹⁹⁹ Informan 8. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²⁰⁰ Bojonegoro Institute. 2019. https://www.instagram.com/p/BvApkAkjNRG/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=7mj9oddrfo9 diakses pada 25 Februari 2021.

²⁰¹ Informan 11. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²⁰² Informan 8. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²⁰³ Informan 10. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²⁰⁴ Informan 9. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²⁰⁵ Informan 6. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²⁰⁶ Informan 4. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

	Jurnalis
Terakhir kali penggunaan	2019 ²⁰⁷ , Oktober 2020 ²⁰⁸ , Desember 2020 ^{209 210} , Januari 2021 ²¹¹ , Februari 2021 ^{212 213} .
Penggunaan data opentender	<p>Bagi jurnalis, data opentender digunakan sebagai:</p> <p>Pertama, bahan tulisan²¹⁴ dan bahan dasar jurnalisisme investigasi²¹⁵.</p> <p>Kedua, referensi untuk cross check terkait data yang disebutkan oleh narasumber yang tidak spesifik²¹⁶. juga melihat suatu perusahaan menguasai berapa persen nilai proyek dari APBD pada tahun tertentu²¹⁷.</p> <p>Ketiga, alat untuk memantau potensi-potensi proyek yang punya potensi pelanggaran²¹⁸ dan untuk mengecek korupsi sektor pendidikan dengan mekanisme paket penunjukan langsung selama 2020²¹⁹.</p>
Keuntungan penggunaan data opentender	<p>3 keuntungan penggunaan data opentender bagi jurnalis, yaitu:</p> <p>Keuntungan bagi wartawan adalah efisiensi waktu. Mereka dapat melacak jaringan perusahaan dari 1 bulan menjadi 1-5 menit bersama dengan detail area dan nilai kontrak²²⁰, hal ini karena tersedia database berisi Top 10, tender cepat, e-katalog, pencarian tidak manual lagi²²¹, opentender langsung menampilkan perusahaan-perusahaan yang berisiko, juga perusahaan tertentu memenangkan proyek berapa kali²²². Penelusuran jejaring perusahaan dapat dilakukan 1-5 menit dengan detail daerah dan nilai kontrak²²³, juga mempermudah mencari tahu proyek PBJ yang mencurigakan²²⁴.</p>

²⁰⁷ Informan 5. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²⁰⁸ Informan 9. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²⁰⁹ Informan 8. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²¹⁰ Informan 4. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²¹¹ Informan 10. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²¹² Informan 7. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²¹³ Informan 10. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²¹⁴ Informan 9. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²¹⁵ Informan 4. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²¹⁶ Informan 8. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²¹⁷ Informan 7. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²¹⁸ Informan 10. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²¹⁹ Informan 11. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²²⁰ Informan 9. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²²¹ Informan 4. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²²² Informan 7. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²²³ Informan 4. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²²⁴ Informan 9. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

	Jurnalis
Keuntungan penggunaan data opentender	<p>Kedua, opentender membuka sudut pandang lebih luas di kalangan jurnalis. Jurnalis yang memiliki sedikit informasi di awal bisa memiliki informasi yang lebih komprehensif setelah menggali data di opentender sehingga bisa memberi ide penulisan berita²²⁵. Berita yang disajikan pun berbasis data²²⁶.</p> <p>Ketiga, opentender menjadi referensi dalam kerja jurnalis²²⁷. Opentender menjadi pembanding, memvalidasi data memudahkan terutama mencari paket-paket, detail PBJ²²⁸ alamat, dan rekam jejak perusahaan. Opentender juga menjadi solusi ketika di daerah situs LPSE kadang tertutup, situs tidak bisa diakses²²⁹.</p>

Profil Singkat Pengguna

Jurnalis di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bojonegoro - Jawa Timur²³⁰ yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan dan *Fellowship* yang ICW dan jaringan jurnalis yang diselenggarakan pada rentang tahun 2015-2019.

Bagi jurnalis, data opentender digunakan sebagai: Pertama, bahan tulisan²³¹ dan bahan dasar jurnalisisme investigasi²³². Kedua, referensi untuk cross check terkait data yang disebutkan oleh narasumber yang tidak spesifik²³³. juga melihat suatu perusahaan menguasai berapa persen nilai proyek dari APBD pada tahun tertentu²³⁴. Ketiga, alat untuk memantau potensi-potensi proyek di yang punya potensi pelanggaran²³⁵ dan untuk mengecek korupsi sektor pendidikan dengan mekanisme paket penunjukan langsung selama 2020²³⁶.

²²⁵ Informan 4. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²²⁶ Informan 11. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²²⁷ Informan 5. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²²⁸ Informan 11. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²²⁹ Informan 6. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²³⁰ Kelompok FGD Jurnalis. FGD Daring. 21 Januari 2021.

²³¹ Informan 9. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²³² Informan 4. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²³³ Informan 8. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²³⁴ Informan 7. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²³⁵ Informan 10. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²³⁶ Informan 11. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

Manfaat Opentender sebagai Bahan Jurnalistik

Terdapat beberapa manfaat dan/atau perubahan yang dirasakan oleh kelompok jurnalis setelah menggunakan opentender.net. yakni penghematan waktu kerja²³⁷, peningkatan kesadaran terhadap isu pengadaan pemerintah²³⁸, perubahan perilaku dengan membuat artikel lebih banyak yang berbasis data²³⁹, sebagai back up sumber informasi²⁴⁰ dan data, serta tindak lanjut oleh pihak ketiga sebagai hasil dari artikel yang ditulis oleh kelompok jurnalis.

Dalam perihal menghemat waktu kerja, jurnalis dapat melakukan penelusuran jejaring perusahaan dalam waktu 1-5 menit²⁴¹ dengan detail daerah dan nilai kontrak sementara proses pencarian data manual akan memakan waktu lebih lama. Proses ini juga mempermudah jurnalis mencari tahu proyek PBJ yang mencurigakan²⁴² seperti pengalaman jurnalis di Harian KOMPAS^{243 244 245}, GATRA.Com^{246 247 248 249 250}, dan Harian Jogja^{251 252 253 254}.

²³⁷ Informan 4. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²³⁸ Informan 7. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²³⁹ Informan 11. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²⁴⁰ Informan 8. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²⁴¹ Informan 4. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²⁴² Informan 9. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²⁴³ HARIAN KOMPAS. Relokasi PKL MALIOBORO: Bau Tak Sedap Lelang Cepat di Sebelah Istana (1). <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2019/11/20/sengkarut-relokasi-pkl-malioboro-1-bau-tak-sedap-lelang-cepat-di-sebelah-istana> diakses pada 21 Februari 2021.

²⁴⁴ HARIAN KOMPAS. Kisut Temuan BPK dan Dugaan Monopoli Proyek (2). <https://www.kompas.id/label/bioskop-indra/> diakses pada 21 Februari 2021.

²⁴⁵ HARIAN KOMPAS. Dalam Jerat Sengketa Lahan Eks Bioskop Tua Yogyakarta (3). <https://www.kompas.id/label/eks-bioskop-indra/> diakses pada 21 Februari 2021.

²⁴⁶ GATRA.COM. Sentra PKL Malioboro: Proyek Berisiko Di Lahan Sengketa. <https://www.gatra.com/detail/news/457636/hukum/sentra-pkl-malioboro-proyek-berisiko-di-lahan-sengketa> diakses pada 21 Februari 2021.

²⁴⁷ GATRA.COM. Sentra PKL Malioboro: Dibayangi Monopoli, Ditutupi ke Publik. <https://www.gatra.com/detail/news/457874/hukum/sentra-pkl-malioboro-dibayangi-monopoli-ditutupi-ke-publik> diakses pada 21 Februari 2021.

²⁴⁸ GATRA.COM. Sentra PKL Malioboro: Tender Cepat Rp 44 M Salah Tempat. <https://www.gatra.com/detail/news/458091/hukum/sentra-pkl-malioboro-tender-cepat-rp44-m-salah-tempat> diakses pada 21 Februari 2021.

²⁴⁹ GATRA.COM. Sentra PKL Malioboro: Bikin Negara Rugi Dua Kali. <https://www.gatra.com/detail/news/458290/hukum/proyek-sentra-pkl-malioboro-bikin-negara-rugi-dua-kali> diakses pada 21 Februari 2021.

²⁵⁰ GATRA.COM. Di Balik Proyek Sentra PKL Malioboro Rp 62 Miliar. <https://www.gatra.com/detail/news/458427/hukum/di-balik-proyek-sentra-pkl-malioboro-rp62-miliar> diakses pada 21 Februari 2021.

²⁵¹ HarianJogja.com. EKS BIOSKOP INDRA: Catatan Merah Lelang Proyek Pusat PKL Malioboro. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/11/20/510/1025167/eks-bioskop-indra-catatan-merah-lelang-proyek-pusat-pkl-malioboro> diakses pada 21 Februari 2021.

²⁵² HarianJogja.com. EKS BIOSKOP INDRA: Aroma Monopoli dalam Proyek Relokasi PKL. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/11/21/510/1025265/eks-bioskop-indra-aroma-monopoli-dalam-proyek-relokasi-pkl-> diakses pada 21 Februari 2021.

²⁵³ HarianJogja.com. EKS BIOSKOP INDRA: Dokumen Lelang Ditutup Rapat. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/11/22/510/1025356/eks-bioskop-indra-dokumen-lelang-ditutup-rapat> diakses pada 21 Februari 2021.

²⁵⁴ Harian Jogja.com. EKS BIOSKOP INDRA: Rawan Rasuah di Lahan Sengketa. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/11/23/510/1025461/eks-bioskop-indra-rawan-rasuah-di-lahan-sengketa> diakses pada 21 Februari 2021.

Informasi yang tersaji dalam opentender.net serta upaya ICW dalam memberikan pelatihan dan *fellowship* mendorong peningkatan kesadaran²⁵⁵ dan perubahan perilaku jurnalis tidak hanya dalam pemberitaan isu terkait potensi korupsi seputar pengadaan pemerintah²⁵⁶ tapi juga dalam membuat artikel berbasis data²⁵⁷. Sebagai contoh, Di Kabupaten Bojonegoro, data opentender dijadikan rujukan saat diskusi di media setempat mengenai liputan berbau korupsi²⁵⁸. Salah satunya pada Suarabanyuurip.com artikel mengenai dugaan persekongkolan proyek pembangunan wahana wisata telah dibaca 4085 kali dan disebar 3900 kali²⁵⁹. Opentender juga membantu menyediakan data untuk dijadikan *straight news* sampai 20 artikel selama tahun 2020²⁶⁰. Pada tahun ini, tim jurnalis di Bojonegoro sempat membuat kanal berita independen, Matadata.id, yang fokus mengenai pengadaan barang dan jasa di daerah Bojonegoro. Sayangnya, portal berita ini berumur pendek karena kekurangan sumber daya. Sedangkan pada tahun sebelumnya, hampir tidak ada artikel mengenai pengadaan barang dan jasa berbasis data Opentender, kecuali yang dihasilkan dari *fellowship* dengan ICW, yaitu sebanyak 2 artikel.

Di tahun 2019, jurnalis dari 3 media di Yogyakarta menghasilkan artikel *in-depth reporting* dalam upaya kolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil setempat²⁶¹.

Opentender juga membuka sudut pandang lebih luas di kalangan jurnalis. Jurnalis yang memiliki sedikit informasi di awal bisa memiliki informasi yang lebih komprehensif setelah menggali data di opentender sehingga bisa memberi ide penulisan berita²⁶². Berita yang disajikan pun berbasis data²⁶³

²⁵⁵ Informan 6. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²⁵⁶ Informan 11. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²⁵⁷ Ibid.

²⁵⁸ Ibid.

²⁵⁹ SuaraBanyuurip.com. Dugaan Persekongkolan di Proyek Wahana Wisata Dander Park. <https://suarabanyuurip.com/index.php/?kabar/baca/dugaan-persengkongkolan-di-proyek-wahana-wisata-dander-park> diakses pada 25 Februari 2021.

²⁶⁰ Informan 11. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²⁶¹ Informan 7. Informan 9. Informan 10. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²⁶² Informan 4. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²⁶³ Informan 11. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

Lebih lanjut, Opendender menjadi back up sumber referensi²⁶⁴ alternatif yang penting. Hal ini dikarenakan situs LPSE di daerah kadang tidak bisa diakses. Dengan mengakses opendender.net, jurnalis memudahkan dalam mencari informasi terkait perusahaan, alamat, dan rekam jejak perusahaan²⁶⁵.

Jurnalis juga merasakan manfaat, dari artikel yang mereka tulis, berdampak pada adanya tindak lanjut dari pemerintah. Contohnya pada kasus pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul merespon artikel yang diberitakan oleh jurnalis dengan memperbaiki informasi mengenai proyek. Kantor perusahaan yang semula tidak ada plang nama perusahaan, diperbaiki dengan pemasangan plang perusahaan dan alamat perusahaan menjadi jelas²⁶⁶.

Namun tidak semua respon pemerintah positif. Di Sulawesi Selatan, saat jurnalis melakukan wawancara meminta agar pengadaan traktor tidak diberitakan²⁶⁷, Hermanto, selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan saat tender berlangsung dan sudah pensiun saat wawancara dilakukan, justru menyatakan proyek tersebut ada tapi rahasia dan hanya penyidik yang bisa minta datanya²⁶⁸. Permohonan informasi mengenai penerima bantuan tidak direspon²⁶⁹, tidak mau memberikan data atau bukti tender²⁷⁰. Hingga laporan penelusuran diturunkan pada 28 September 2017, jejak bantuan 75 traktor tangan yang dibiayai APBD Sulawesi Selatan tahun 2015 masih belum jelas.

Dalam melaksanakan tugasnya, jurnalis paling sering menggunakan fitur opendender.net berikut; Top 10 pengadaan paling beresiko dengan skor potensi penyelewengan²⁷¹, peringkat perusahaan yang paling sering menang proyek dan paling besar nilai proyek²⁷², profil perusahaan pemenang,

²⁶⁴ Informan 8. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²⁶⁵ Informan 6. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²⁶⁶ Informan 7. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²⁶⁷ Informan 6. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²⁶⁸ ICW. 2017. Gelap Bantuan Traktor Tangan. <https://antikorupsi.org/id/article/gelap-bantuan-traktor-tangan> diakses pada 25 Februari 2021.

²⁶⁹ Informan 6. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²⁷⁰ Infosusel.com. Cegah Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa YASMIB Perkenalkan Aplikasi Untuk Memantau Proses Tender. <https://infosusel.com/2017/08/cegah-korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-yasmib-perkenalkan-aplikasi-untuk-memantau-proses-tender/html> diakses pada 25 Februari 2021.

²⁷¹ Informan 8. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²⁷² Kelompok FGD Jurnalis. FGD Daring. 21 Januari 2021.

database tender²⁷³ dan tender khusus (tender cepat dan *e-katalog*²⁷⁴). Sedangkan fitur yang paling jarang digunakan juga termasuk fitur chart/statistik²⁷⁵. tentang kami²⁷⁶. artikel²⁷⁷. *e-purchasing*²⁷⁸, dan tender cepat²⁷⁹.

c) Organisasi Masyarakat Sipil

Tabel 3.23. Manfaat Opendender Bagi Organisasi Masyarakat Sipil

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	
Latar belakang pengguna	Pegiat Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Blitar - Jawa Timur, dan Kabupaten Bojonegoro - Jawa Timur ²⁸⁰ .
Mengetahui opendender.net dari	Pegiat OMS mengetahui opendender dari berbagai kegiatan peningkatan kapasitas berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Training Sekolah Kader Antikorupsi di Blitar Tahun 2017²⁸¹, • Multistakeholder Meeting Pemantauan PBJ 2015²⁸². • Pelatihan Audit Sosial Sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada 2019^{283 284}, • Workshop Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dan Jurnalis untuk Monitoring Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah pada 1-3 Juli 2019 di Yogyakarta²⁸⁵, • Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) ICW 2017 dan Pelatihan Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa 2020²⁸⁶.

²⁷³ Informan 4. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²⁷⁴ Informan 10. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²⁷⁵ Informan 9. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²⁷⁶ Informan 4. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²⁷⁷ Informan 8. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²⁷⁸ Informan 7. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²⁷⁹ Informan 6. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

²⁸⁰ Kelompok FGD Organisasi Masyarakat Sipil.

²⁸¹ Informan 15. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

²⁸² Informan 18. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

²⁸³ Informan 16. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

²⁸⁴ Bojonegoro Institute. 2019. https://www.instagram.com/p/BvApkAkjNRG/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=7mj9oddrfo9 diakses pada 25 Februari 2021.

²⁸⁵ Informan 17. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

²⁸⁶ Informan 13. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	
Terakhir kali penggunaan	tujuh pegiat OMS dari 7 organisasi yang diwawancarai, menggunakan opentender pada rentang 2019 ²⁸⁷ , Agustus/September 2019 ²⁸⁸ , Maret 2020 ²⁸⁹ , Juni/Juli 2020 ²⁹⁰ , Agustus 2020 ²⁹¹ , Desember 2020 ²⁹² , hingga Januari 2021 ²⁹³ .
Penggunaan data opentender	Bagi OMS, data opentender digunakan untuk 2 hal: Pertama, materi dalam berbagai upaya peningkatan kapasitas jaringan jurnalis, masyarakat sipil, dan pemerintah setempat terkait upaya pemberantasan korupsi ^{294 295 296 297 298 299} . Kedua, alat bantu dalam pemantauan, diantaranya untuk isu COVID-19 ^{300 301 302} , bantuan beras miskin ³⁰³ , konstruksi Water Park ³⁰⁴ , gedung pasar relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ³⁰⁵ .
Keuntungan penggunaan data opentender	Dalam rentang waktu 2015-2020, OMS merasakan 3 keuntungan utama menggunakan opentender yakni meningkatkan kesadaran serta memberikan pengetahuan baru dalam advokasi kebijakan ³⁰⁶ , mendorong kolaborasi OMS ³⁰⁷ bersama jurnalis dalam memantau proses PBJ pemerintah, dan mempermudah penggalan dan pencarian data ³⁰⁸ dalam kerja-kerja advokasi.

²⁸⁷ Informan 16. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

²⁸⁸ Informan 15. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

²⁸⁹ Informan 14. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

²⁹⁰ Informan 17. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

²⁹¹ Informan 18. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

²⁹² Informan 13. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

²⁹³ Informan 12. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

²⁹⁴ Informan 12. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

²⁹⁵ Informan 17. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

²⁹⁶ Informan 14. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

²⁹⁷ Informan 15. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

²⁹⁸ Informan 16. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

²⁹⁹ Informan 3. OMS. Wawancara Daring. 3 Februari 2021.

³⁰⁰ Informan 14. Pemantauan anggaran COVID-19 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³⁰¹ Informan 16. Pemantauan pengadaan alat kesehatan COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³⁰² Informan 17. Pemantauan pengadaan alat kesehatan COVID-19 di Sulawesi Tenggara FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³⁰³ Informan 15. Pemantauan Bantuan Beras Miskin di Kabupaten Blitar. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³⁰⁴ Informan 16. Investigasi PBJ Dander Park di Kabupaten Bojonegoro. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³⁰⁵ Informan 16. investigasi pengadaan tempat relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Eks Bioskop INDRA Daerah Istimewa Yogyakarta FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³⁰⁶ Informan 16. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³⁰⁷ Informan 17. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³⁰⁸ Ibid.

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	
Perubahan setelah menggunakan opentender	Di Kota Manado, Sulawesi Utara, mantan Kepala Dinas Tata Kota Manado yang dilaporkan oleh Yayasan Suara Nurani Minaesa (YSNM) ditahan oleh aparat penegak hukum dan ditindaklanjuti dengan penuntutan kasus korupsi serta vonis 16 bulan penjara terhadap mantan Kepala Dinas Tata Kota Manado ³⁰⁹ . YSNM menyampaikan temuan-temuan pemantauan terhadap proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) <i>System Solar Cell</i> Manado kepada LPSE setempat melakukan sehingga proses pengadaan tersebut dihentikan dan proyek diulang pada tahun anggaran berikutnya ³¹⁰ .

Profil Singkat Pengguna

Tujuh pegiat Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, Kabupaten Blitar - Jawa Timur, dan Kabupaten Bojonegoro - Jawa Timur³¹¹.

Dalam rentang waktu 2015-2020, OMS merasakan 3 keuntungan utama menggunakan opentender yakni meningkatkan kesadaran serta memberikan **pengetahuan baru dalam advokasi kebijakan**³¹², **mendorong kolaborasi OMS**^{313 314} bersama jurnalis dalam memantau proses PBJ pemerintah, dan mempermudah **penggalan dan pencarian data**³¹⁵ dalam kerja-kerja advokasi.

Opentender membantu menyajikan data detail, lebih cepat dan, tidak memakan waktu untuk memantau proyek berisiko³¹⁶, bisa diakses di mana pun, kapan pun, tanpa harus datang ke lokasi data disimpan atau menyalin dari hard file satu per satu, hingga waktu menjadi efisien. Penelusuran yang semula dilakukan setahun dapat dilakukan 3 bulan. Selain itu, opentender juga memudahkan untuk menemukan potensi fraud dalam pengadaan dengan mekanisme *filter* dan *scoring* yang disediakan. Tanpa perlu menyelenggarakan rapat atau workshop yang membutuhkan biaya sekitar Rp 1,5 juta per pertemuan, data sudah tersedia^{317 318}.

³⁰⁹ TribunManado.co.id. Mantan Kadistakot Manado Divonis 16 Bulan Penjara atas Kasus Korupsi Solar Cell. <https://manado.tribunnews.com/2018/07/10/mantan-kadistakot-manado-divonis-16-bulan-penjara-atas-kasus-korupsi-solar-cell> diakses pada 25 Februari 2021.

³¹⁰ Informan 14. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³¹¹ Kelompok FGD Organisasi Masyarakat Sipil. FGD Daring 21 Januari 2021.

³¹² Informan 16. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³¹³ Informan 17. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³¹⁴ Informan 3. OMS. Wawancara Daring. 3 Februari 2021.

³¹⁵ Informan 17. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³¹⁶ Informan 16. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³¹⁷ Informan 17. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³¹⁸ Informan 13. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

Memberikan Pengetahuan Baru dalam Advokasi Kebijakan bagi Kelompok Masyarakat Sipil

Bagi kelompok masyarakat sipil, data dan informasi yang tersaji dalam opentender menjadi sumber informasi dalam advokasi³¹⁹ ³²⁰ khususnya penyajian informasi terkait potensi fraud dalam proses pengadaan pemerintah³²¹. Data dan informasi, khususnya mengenai pemenang pengadaan, kompetisi, dengan tingkat keakuratan yang bisa diinvestigasi lebih jauh³²² membantu peran-peran masyarakat sipil dalam memantau proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Di Kota Manado, Sulawesi Utara, Yayasan Suara Nurani Minaesa (YSNM) melakukan pemantauan terhadap proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) System Solar Cell Manado yang mendapat nilai resiko tinggi dalam opentender. YSNM menyampaikan temuan-temuannya kepada LPSE setempat sehingga proses pengadaan tersebut dihentikan dan proyek diulang pada tahun anggaran berikutnya³²³. Temuan-temuan YSNM tersebut kemudian juga disampaikan kepada aparat penegak hukum setempat dan ditindaklanjuti dengan penuntutan kasus korupsi serta vonis 16 bulan penjara terhadap mantan Kepala Dinas Tata Kota Manado³²⁴.

Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (PUSPAHAM) mampu memberikan informasi pembanding kepada jurnalis berbasis data opentender ketika Kepala Biro Layanan Pengadaan (BLP) Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan sebuah perusahaan tidak ada masalah, padahal perusahaan peserta lelang tersebut masuk dalam daftar hitam opentender³²⁵. Temuan pemantauan ini kemudian dipublikasikan PUSPAHAM kepada publik melalui media massa³²⁶. Kepala Biro Layanan Pengadaan (BLP) Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian merespon hasil publikasi dengan pernyataan bahwa perusahaan baru diketahui masuk daftar hitam, setelah memenangkan tender dan proses pengadaan telah berjalan³²⁷. Namun, hingga

³¹⁹ Informan 12. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³²⁰ Informan 16. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³²¹ Informan 13. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³²² Informan 15. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³²³ Informan 14. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³²⁴ TribunManado.co.id. Mantan Kadistakot Manado Divonis 16 Bulan Penjara atas Kasus Korupsi Solar Cell. <https://manado.tribunnews.com/2018/07/10/mantan-kadistakot-manado-divonis-16-bulan-penjara-atas-kasus-korupsi-solar-cell> diakses pada 25 Februari 2021.

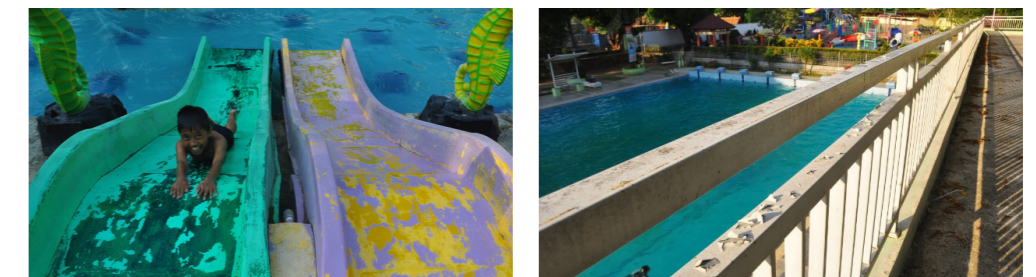
³²⁵ Informan 18. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³²⁶ ZonaSultra.com. Masuk Daftar Hitam, Perusahaan ini Menang Tender di Sultra. <https://zonasultra.com/masuk-daftar-hitam-perusahaan-ini-menang-tender-di-sultra.html> diakses pada 22 Februari 2020

³²⁷ Informan 18. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

penelitian dilakukan masih tidak diketahui tindak lanjut dari pemerintah terhadap hasil pemantauan ini. Berdasarkan informasi dari LPSE Provinsi Sulawesi Tenggara, perusahaan ini tetap dinyatakan sebagai pemenang tender Peningkatan Jalan Lingkar Kendari tahun 2014³²⁸. Proyek ini menjadi pekerjaan terakhir yang pernah dimenangkan perusahaan tersebut.

Sebagai contoh memanfaatkan data dan informasi yang terdapat dalam opentender, organisasi masyarakat sipil melakukan pemantauan anggaran COVID-19 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara³²⁹, pemantauan bantuan beras miskin di Kabupaten Blitar, Jawa Timur³³⁰, investigasi PBJ Pembangunan Konstruksi Dander Park di Kabupaten Bojonegoro³³¹, investigasi pengadaan gedung pasar tempat relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL), pemantauan pengadaan alat kesehatan COVID-19 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Tenggara³³⁴.



Dander Park di Kabupaten Bojonegoro

³²⁸ Opentender.net, <https://opentender.net/#/tender-detail/286043> diakses pada 22 Februari 2021

³²⁹ Informan 14. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³³⁰ Informan 15. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³³¹ Informan 16. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³³² Informan 17. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³³³ Informan 17. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³³⁴ Informan 18. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

Mendorong Kolaborasi Antar Pihak dalam Memantau Proses Pengadaan

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, peningkatan kapasitas serta ketersediaan data dalam opentender yang disediakan oleh ICW mendorong kolaborasi antar OMS dan jurnalis. Jurnalis setempat menerbitkan artikel pelaporan mendalam setelah 3 bulan investigasi bersama organisasi masyarakat sipil pada tahun 2019. Sementara itu, masyarakat sipil setempat memberikan laporan hasil investigasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)³³⁵.

Dalam laporan Koalisi Masyarakat sipil Yogyakarta Peduli PBJ kepada KPPU RI³³⁶ dilaporkan temuan adanya a) penyalahgunaan tender cepat; dan b) satu pemilik perusahaan yang menggunakan 2 perusahaannya dalam satu paket pengadaan. Dugaan persekongkolan horizontal muncul dalam laporan ini³³⁷. Dari kedua laporan yang diberikan, KPPU Kantor Wilayah IV menindaklanjuti laporan tersebut dan menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran terkait proses pembangunan tempat relokasi PKL di eks Bioskop Indra telah diteliti dan berdasarkan Pasal 6 ayat 2 dan 3 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019, namun laporan tersebut tidak memenuhi persyaratan bukti awal yang cukup adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga penanganannya dihentikan dan dimasukkan ke dalam buku daftar penghentian laporan³³⁸.

Merespon laporan investigasi hasil kolaborasi yang dilakukan OMS dan jurnalis di Daerah Istimewa Yogyakarta ini, KPK RI menindaklanjuti dengan meminta keterangan OMS dan jurnalis untuk mendapatkan data nomor rekening media/vendor dan nomor rekening Biro Layanan Pengadaan. Namun, OMS dan jurnalis tidak memiliki akses untuk menelusuri lebih jauh dan berharap penelusuran dilakukan oleh KPK RI³³⁹.

Tersedianya data dan informasi untuk memantau proses PBJ pemerintah juga mendorong organisasi masyarakat sipil di Provinsi Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan pemerintah setempat dalam mensosialisasikan proses pemantauan pengadaan barang/jasa oleh publik. Opentender digunakan sebagai materi dalam Pusat Belajar Anggaran (PUSJAGA) Tingkat Menengah ke Atas (Level 2) di Provinsi Sulawesi Selatan di mana anggotanya terdiri dari Dinas Pendidikan Kota Makassar, mahasiswa dan media. Opentender telah disosialisasikan dalam 20-30 kali pelatihan pada tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB)³⁴⁰. Namun, setelah lebih dari 20 kali pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2019, masih belum dapat dipetakan tindak lanjut dari pelatihan tersebut dan apakah ada manfaat lanjutan dari pelatihan tersebut dari segi advokasi.

Di Kabupaten Bojonegoro, OMS dan jurnalis menganalisa data anggaran dan data opentender untuk memantau proyek pembangunan³⁴¹. Inspektorat Kabupaten Bojonegoro merespon dengan mengapresiasi upaya tersebut. Namun, belum dapat dipetakan apakah hasil laporan tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten setempat.

³³⁵ Informan 17. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³³⁶ Laporan melalui surat No.01/Eks/KMSY/XI/2019

³³⁷ HarianJogja.com. EKS BIOSKOP INDRA: Aroma Monopoli dalam Proyek Relokasi PKL. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/11/21/510/1025265/eks-bioskop-indra-aroma-monopoli-dalam-proyek-relokasi-pkl>- diakses pada 21 Februari 2021.

³³⁸ KPPU RI Kantor Wilayah IV melalui Surat Nomor 482/Wil.IV/S/XI/2020 tanggal 24 November 2020

³³⁹ Informan 17. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021

³⁴⁰ Informan 12. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³⁴¹ Informan 16. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.



Studi Kasus

Studi Kasus Pemanfaatan Data Opendender Dalam Pengungkapan Korupsi PBJ



Di Kota Manado, Sulawesi Utara, Yayasan Suara Nurani Minaesa (YSNM) melakukan pemantauan terhadap proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) System Solar Cell Manado yang mendapat nilai resiko tinggi dalam opentender.

YSNM menyampaikan temuan-temuannya kepada LPSE setempat sehingga proses pengadaan tersebut dihentikan dan proyek diulang pada tahun anggaran berikutnya³⁴². Temuan-temuan YSNM tersebut kemudian juga disampaikan kepada aparat penegak hukum setempat³⁴³ dan ditindaklanjuti dengan penuntutan kasus korupsi serta vonis 16 bulan penjara terhadap mantan Kepala Dinas Tata Kota Manado³⁴⁴. Robert Selaku PPK Dinas Tata Kota Manado, Lucky selaku PPTK, Aryanthi selaku Penerima Kuasa PT Subota International Contractor telah dijatuhi hukuman penjara 4 hingga 5 tahun³⁴⁵.

Proyek bernilai Rp 9,6 Miliar³⁴⁶ dengan kerugian Negara: Rp 3 Miliar lebih³⁴⁷. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi, salah satu pelaku dijatuhkan denda Rp 50 juta dan uang pengganti Rp 2,4 miliar³⁴⁸, namun, tidak ada informasi yang tersedia untuk memastikan apakah uang ini sudah disetorkan ke kas negara.

Dalam persidangan, terungkap bahwa sebelum lelang dilaksanakan, Salindeho dan Mailangkay terlibat pertemuan dengan Ariyanti Marolla, Lucky Dandel dan Robert Wowor di Hotel Quality Manado. PT Subota International Contractor lolos seleksi dan memenangkan tender meski Jaminan Penawaran (Bank Garansi) yang diajukan PT Subota International Contractor tidak tercatat dalam sistem Bank Mandiri³⁴⁹. Pelaku juga mengubah spesifikasi baterai 12120 Ah merk Best Solution Battery menjadi baterai Bulls Power (BSBp) 120 (SNI). Akibatnya, baterai hanya mampu bertahan 3 sampai 6 jam, yang mestinya menyala 10 jam per hari³⁵⁰.

³⁴² Informan 14. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³⁴³ Informan 3. OMS. Wawancara Daring. 3 Februari 2021.

³⁴⁴ TribunManado.co.id. Mantan Kadistakot Manado Divonis 16 Bulan Penjara atas Kasus Korupsi Solar Cell. <https://manado.tribunnews.com/2018/07/10/mantan-kadistakot-manado-divonis-16-bulan-penjara-atas-kasus-korupsi-solar-cell> diakses pada 25 Februari 2021.

³⁴⁵ Manado Tribunnews. Kejari Pidanakan 3 Pelaku Korupsi PJU Solar Cell Manado. <https://manado.tribunnews.com/2017/12/05/kejari-pidanakan-3-pelaku-korupsi-pju-solar-cell-manado> diakses pada 18 Februari 2021.

³⁴⁶ Republika.co.id. Tersangka Korupsi Lampu Jalan Bertenaga Surya Ditahan. <https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/08/02/ou0uce414-tersangka-korupsi-lampu-jalan-bertenaga-surya-ditahan> diakses pada 25 Februari 2021.

³⁴⁷ Mega Manado. Pasang Badan di Persidangan, Salindeho Diduga Amankan Orang Nomor Satu. <http://www.megamanado.com/2017/05/09/pasang-badan-di-persidangan-salindeho-diduga-amankan-orang-nomor-satu/> diakses pada 18 Februari 2021.

³⁴⁸ Mahkamah Agung, Direktorat Putusan, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/60ae53b082bb61c93c71dea64bc97abb/pdf/zaeb53c81d399a06ae78313134373331 diakses pada 25 Februari 2021.

³⁴⁹ Indobrita. Sidang Perkara PJU Solar Cell Manado Batal Digelar. <https://www.indobrita.co/2018/01/04/sidang-perkara-pju-solar-cell-manado-batal-digelar/> diakses pada 18 Februari 2021.

³⁵⁰ Mega Manado. Pasang Badan di Persidangan, Salindeho Diduga Amankan Orang Nomor Satu. <http://www.megamanado.com/2017/05/09/pasang-badan-di-persidangan-salindeho-diduga-amankan-orang-nomor-satu/> diakses pada 18 Februari 2021.

d. APIP - Aparat Pengawas Internal Pemerintah

Tabel 3.24. Manfaat penggunaan oleh APIP³⁵¹

APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)	
Latar belakang pengguna	APIP di salah satu provinsi di Indonesia ³⁵² .
Mengetahui opentender.net dari	ia mengetahui opentender melalui pemberitaan Harian KOMPAS tahun 2018 mengenai peluncuran opentender, dengan bantuan mesin pencari google menemukan link opentender ³⁵³ .
Terakhir kali penggunaan	ia terakhir kali menggunakan opentender pada proses probity audit pada Juli/Agustus 2020 ³⁵⁴ .
Intensitas akses opentender.net	Dalam setahun, minimal 4 kali akses opentender dalam pelaksanaan tugas APIP ³⁵⁵ .
Penggunaan data opentender	<p>Probity dan Post Audit, masing-masing 4 kali dalam setahun.</p> <p>Probity Audit dan Post Audit pada 2018 hingga 2020</p> <p>Sejak 2018 telah menggunakan sebanyak 13 kali audit³⁵⁶, yaitu:</p> <p>2018: 4 kali</p> <p>2019: 4 kali</p> <p>2020: 4 kali</p> <p>2021: 1 kali</p> <p>Pada data SPSE, tersedia fitur untuk melihat proses dari awal pengumuman sampai dengan pemenang tender, tetapi tidak tersedia histori perusahaan pemenang tersebut. Opentender menyajikan histori perusahaan. Informasi yang disediakan opentender berguna bagi auditor/APIP untuk melaksanakan <i>post audit</i>³⁵⁷.</p> <p>APIP mengambil data dari opentender.net yang memiliki nilai potensi kecurangan (Potential Fraud Analysis) sampai dengan 19, 18, 17, dimana nilai tertinggi adalah 20 (Opentender V3). Data ini digunakan sebagai sampel untuk pelaksanaan audit. Data ini sangat membantu dalam penentuan proyek – proyek mana yang mempunyai potensi penyimpangan dan disandingkan dengan data dari SPSE³⁵⁸.</p> <p>Data opentender belum dapat digunakan untuk probity audit 2021 karena data yang tersedia belum <i>realtime</i>.</p>

³⁵¹ Informan 2. APIP. Wawancara Daring. 29 Januari 2021.

³⁵² Ibid.

³⁵³ Ibid.

³⁵⁴ Ibid.

³⁵⁵ Ibid.

³⁵⁶ Ibid.

³⁵⁷ Ibid.

³⁵⁸ Ibid.

APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)	
Keuntungan penggunaan data opentender	<p>Sampling Audit yang Tepat. Dari 10 sampling dari opentender, 10 sampling yang digunakan seluruhnya ada temuan. Dengan data Opentender, APIP menemukan sebuah perusahaan memenangkan 2 tender pada Maret 2016, 1 tender pada April 2016, 1 tender pada Mei 2016, dengan selisih 1 bulan dengan total kontrak 49 miliar, dalam triwulan kedua³⁵⁹. Auditor menduga perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan proyek sebanyak itu. Informan mengindikasikan Opentender memberikan gambaran lebih komprehensif bagi APIP, terutama karena kewenangannya hanya melihat SPSE tingkat provinsi, namun dengan opentender APIP dapat mengetahui di wilayah kabupaten/kota mana saja perusahaan memenangkan pengadaan³⁶⁰.</p> <p>Efisiensi Waktu. Sebelum menggunakan Opentender, dalam 20 hari APIP memperoleh 10 temuan administrasi. Data opentender membuat proses audit lebih cepat, sehingga dalam 20 hari, dapat ditemukan 20-30 temuan administrasi³⁶¹. Jika menggunakan data SPSE, proses pengambilan sampel dapat membutuhkan waktu beberapa hari, namun dengan opentender hanya memerlukan 15-30 menit³⁶².</p>
Rekomendasi opentender ke pihak lain (referral)	Pada tahun 2018, ia menggunakan opentender sebagai materi dalam Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), kepada 70 orang dari 104 auditor yang ada ³⁶³ .

³⁵⁸ Ibid.

³⁵⁹ Ibid.

³⁶⁰ Ibid.

³⁶¹ Ibid.

³⁶² Ibid.

³⁶³ Ibid.



Cerita Singkat Pengguna - Aparat Pengawas Internal Pemerintah

Profil Singkat Pengguna

Pengguna adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah di inspektorat salah satu provinsi di Indonesia.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan³⁶⁴. Demi mencapai tujuan tersebut, pemerintah berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui: a. audit; b. reviu; c. evaluasi; d. pemantauan; dan e. kegiatan pengawasan lainnya³⁶⁵.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (selanjutnya disebut "APIP") merupakan pejabat pemerintah yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor³⁶⁶.

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, APIP dapat melakukan pengawasan sejak proses perencanaan pengadaan barang/ jasa, hingga kegiatan serah terima pekerja. Dimana cakupan pengawasan yang dapat dilakukan oleh APIP meliputi:

1. Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
2. Kepatuhan terhadap peraturan;
3. Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
4. Penggunaan produk dalam negeri;
5. Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
6. Pengadaan Berkelanjutan.

Selain melakukan pengawasan, APIP juga dapat menerima pengaduan masyarakat mengenai pengadaan pemerintah dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan yang dimiliki.

Hasil hasil pengawasan APIP kemudian disampaikan kepada Menteri/ kepala lembaga/ kepala daerah untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disampaikan. Rekomendasi yang diberikan oleh APIP dapat berupa pengembalian ke kas negara, pelaksanaan sanksi administrasi pegawai, perbaikan laporan dan penertiban administrasi. Jika dalam laporan tersebut ditemukan adanya indikasi Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), maka APIP dapat meneruskan laporan ke penegak hukum.

Manfaat Opendender.net dalam Proses Audit Internal Pemerintah

Sampling Audit yang Tepat. Dengan data Opendender, APIP menemukan sebuah perusahaan memenangkan 2 tender pada Maret 2016, 1 tender pada April 2016, 1 tender pada Mei 2016, dengan selisih 1 bulan dengan total kontrak 49 miliar, dalam triwulan kedua untuk LPSE yang berbeda³⁶⁷. Hal ini mustahil dikerjakan oleh sebuah perusahaan yang tidak terlalu besar, dimana dalam waktu bersamaan melakukan sekaligus beberapa pekerjaan. Opendender memberikan gambaran lebih komprehensif bagi APIP, terutama karena kewenangannya hanya melihat SPSE tingkat provinsi, namun dengan opendender APIP dapat mengetahui di wilayah kabupaten/kota mana saja perusahaan memenangkan pengadaan³⁶⁸.

Efisiensi Waktu. Sebelum menggunakan Opendender, dalam 20 hari APIP memperoleh 10 temuan administrasi. Data opendender membuat proses audit lebih cepat, sehingga dalam 20 hari, dapat ditemukan 20-30 temuan administrasi³⁶⁹. Jika menggunakan data SPSE, proses pengambilan sampel dapat membutuhkan waktu beberapa hari, namun dengan opendender hanya memerlukan 15-30 menit³⁷⁰.

"Bagi APIP, indikasi tersaji matang di opendender. Sebagai APIP di tingkat provinsi, APIP tidak memiliki kewenangan untuk melihat SPSE di tingkat kabupaten karena bukan kewenangannya, namun dengan opendender, sebagai APIP tingkat provinsi, dapat melihat pula mendapat gambaran lebih komprehensif di wilayah mana saja perusahaan X memenangkan lelang, sehingga lebih tahu track record perusahaan. Dari penelusuran di opendender, ada 3 temuan yang diperoleh dengan merujuk data pada opendender. Temuan terkait adanya indikasi persekongkolan atau kerja sama³⁷¹."

³⁶⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pasal 2 ayat (1). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4876>. Diakses pada 10 Februari 2021

³⁶⁵ Ibid. Pasal 48.

³⁶⁶ Ibid. Pasal 51 ayat (1)

³⁶⁷ Informan 2. APIP. Wawancara Daring. 29 Januari 2021.

³⁶⁸ Ibid.

³⁶⁹ Ibid..

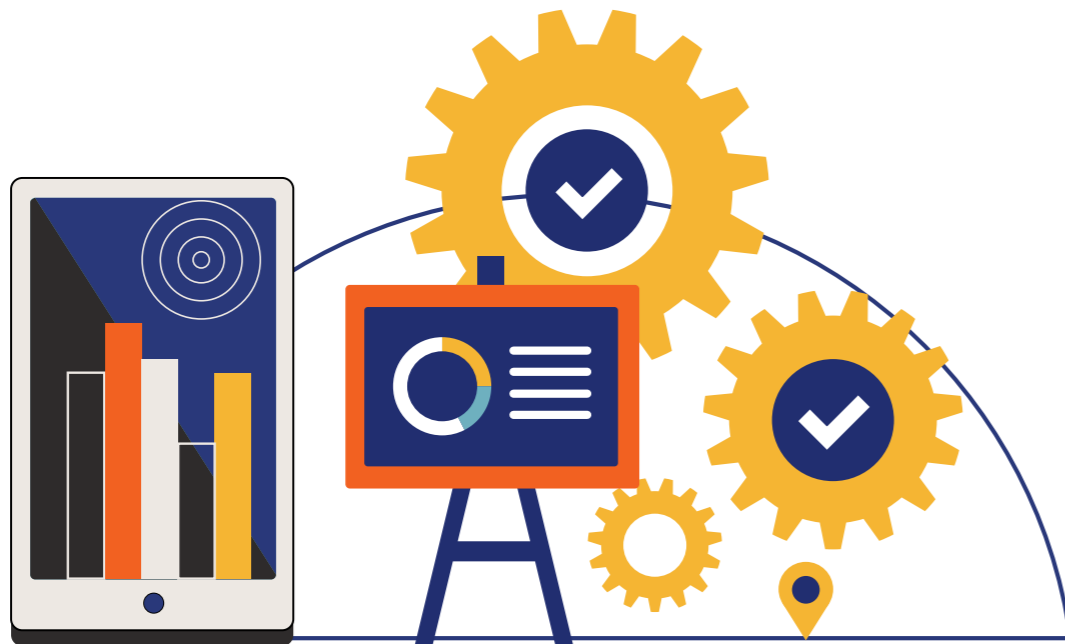
³⁷⁰ Ibid.

³⁷¹ Ibid..

Dalam tugasnya melakukan internal audit, opentender dimanfaatkan dalam proses *Probity Audit* dan *Post Audit* pada 2018 hingga 2020 khususnya pada proses pengambilan sampel. Setiap audit tersebut dilaksanakan masing-masing sebanyak 4 kali dalam setahun. Dengan demikian, sejak mengetahui opentender, APIP telah menggunakan data opentender sebanyak 9 kali³⁷². Probity audit adalah kegiatan penilaian independen yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/ jasa dilakukan secara adil, dapat dipertanggungjawabkan, dan transparan, sesuai dengan harapan publik dan ketentuan yang berlaku³⁷³.

Manfaat Opentender.net sebagai bahan Pelatihan Kantor Sendiri

Opentender.net juga digunakan sebagai materi dalam Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) untuk tim auditor di pemerintah provinsi. Sejak 2018, telah dilakukan 3 (tiga) kali PKS bagi staf di kantor dihadiri oleh sekitar 70 orang dari sekitar 104 auditor yang ada³⁷⁴. PKS adalah pelatihan di kantor sendiri yang diselenggarakan dari pegawai untuk pegawai sendiri. PKS biasanya dilakukan dengan kelompok-kelompok kecil, waktunya pendek, dan dapat dilakukan sesering mungkin³⁷⁵.



³⁷² Ibid.

³⁷³ LKPP. 2013. KREDIBEL Majalah Pengadaan Indonesia. Hal.12 http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/5_ybGqcGelSNakFhKqblqEnOOBgKrJozw.pdf diakses pada 10 Februari 2021.

³⁷⁴ Informan 2. APIP. Wawancara Daring. 29 Januari 2021.

³⁷⁵ Keputusan Kepala BPKP RI Nomor: KEP-504/K/SU/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan BPKP. <https://jdih.bpkp.go.id/search/www/storage/document/PeraturanKeputusan-Kepala-BPKP-tahun-2004-504-04.pdf> diakses pada 23 Februari 2021.

3.7.2 Opentender sebagai Platform Data dan Informasi

Fitur Populer dan Tidak Populer

Tabel di bawah ini menunjukkan fitur-fitur di opentender yang paling sering diakses dan jarang diakses oleh pengguna data:

Tabel 3.25 Fitur Opentender

Aktor	Fitur Paling Sering Diakses	Fitur Paling Tidak Diakses
Akademisi ³⁷⁶	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disclaimer 2. Glosarium 3. FAQ 4. Metode 5. Top 10 6. Top Project 	Sign in
Jurnalis ³⁷⁷	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ranking/ Top 10/ Score paling beresiko; 2. Profil perusahaan pemenang 3. Database 4. Indikator skor potensi penyelewengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungi Kami, 2. Tentang Kami, 3. E-purchasing 4. Chart/Data Statistik 5. Artikel 6. Tender cepat
OMS ³⁷⁸	<ol style="list-style-type: none"> 1. Top 10³⁷⁹ 2. database, 3. paket pengadaan, 4. penyedia, dan 5. Top 10 Sumber APBD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sign in 2. PBJ bersumber APBN atau dilaksanakan oleh BUMN 3. Top 10 Satuan Kerja
Aparat Pengawas Internal Pemerintah ³⁸⁰	<ol style="list-style-type: none"> 1. Top 10/Score 2. Database 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grafik/Chart

Sumber: Diolah dari Wawancara dan FGD Informan

³⁷⁶ Informan 1. Akademisi. Wawancara Daring. 28 Januari 2021..

³⁷⁷ Kelompok FGD Jurnalis. FGD Daring. 21 Januari 2021.

³⁷⁸ Kelompok FGD Organisasi Masyarakat Sipil. FGD Daring 21 Januari 2021.

³⁷⁹ Informan 3. OMS. Wawancara Daring. 3 Februari 2021.

³⁸⁰ Informan 2. APIP. Wawancara Daring. 29 Januari 2021.

Analisis Pengunjung Opentender

Untuk mendapat gambaran tentang pengunjung platform Opentender, peneliti menggunakan perangkat lunak Webalizer³⁸¹ dengan cakupan data kunjungan mulai 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020, serta data Google Analytics untuk situs Opentender³⁸² dengan cakupan data kunjungan mulai 8 Oktober hingga 31 Desember 2020.

Menurut Google Analytics, pengguna Opentender mayoritas mengakses melalui desktop³⁸³.

Tabel 3.26 Persentase Pengunjung Opentender (8 Oktober - 31 Desember 2020)

Dawai	Jumlah	Persentase
desktop	2134	51,1%
mobile	2018	48,3%
tablet	24	0,6%

Mayoritas pengunjung Opentender adalah kelompok usia 18-34 tahun³⁸⁴.

Tabel 3.27 Persentase Pengunjung Opentender berdasarkan Usia (8 Oktober - 31 Desember 2020)

Usia	Pengguna	Persentase
18-24	153	26,6%
25-34	178	30,9%
35-44	129	22,4%
45-54	83	14,4%
55-64	18	3,1%
65+	15	2,6%
Jumlah	576	100,0%

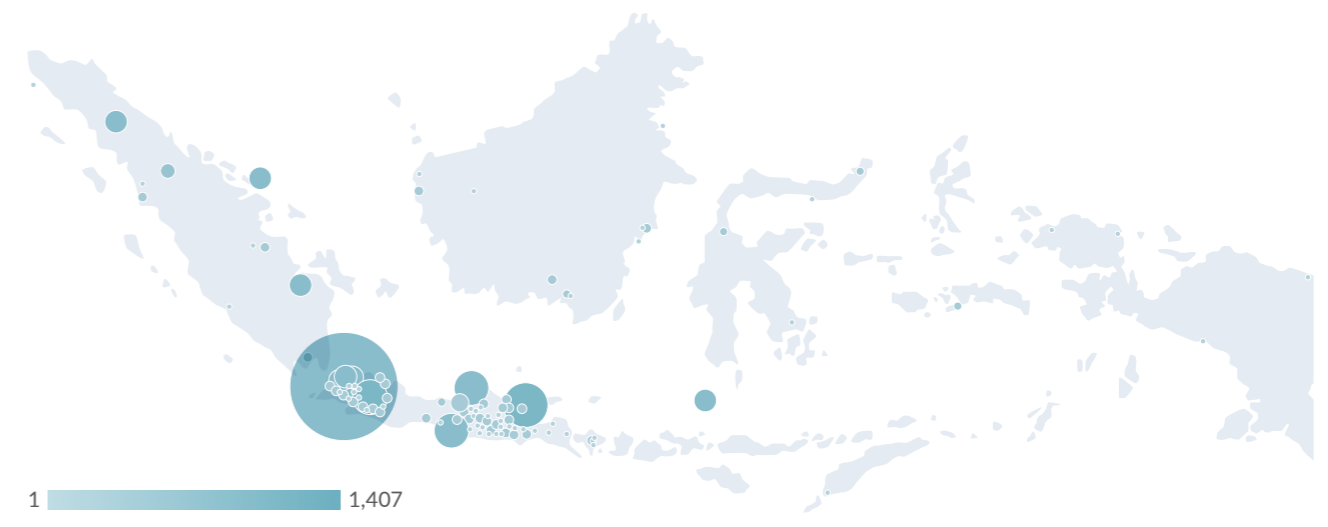
³⁸¹ Data Webalizer Opentender, <https://v3.opentender.net/vstats/index.html> diakses 1 Maret 2021.

³⁸² Google Analytics untuk Opentender, <https://analytic.google.com> diakses tanggal 1 Maret 2021.

³⁸³ ibid.

³⁸⁴ ibid.

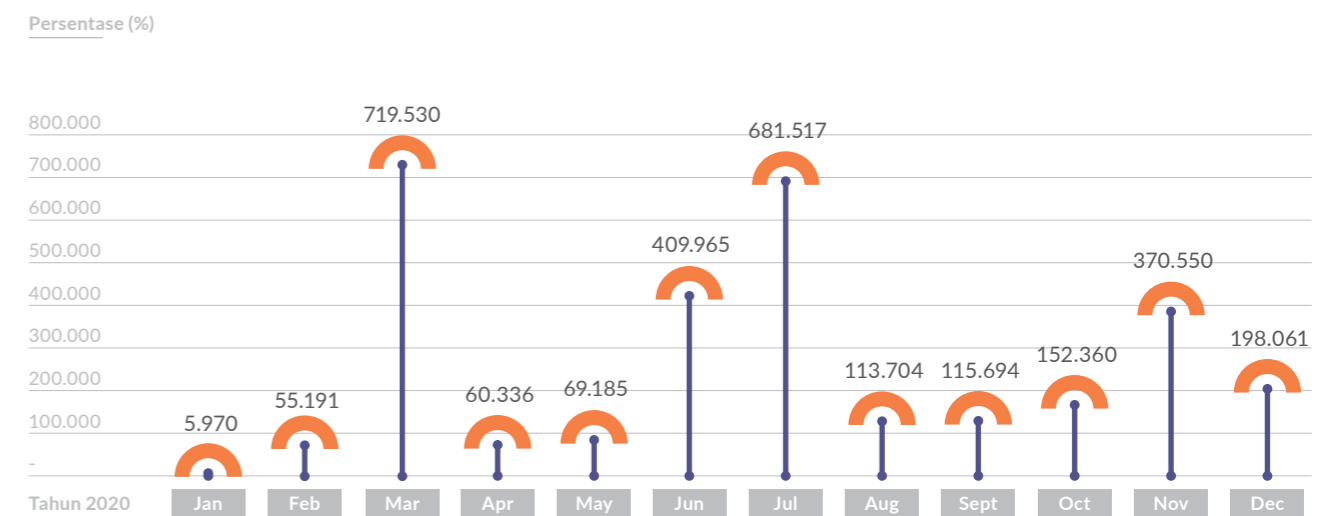
Gambar 1 Sebaran Pengguna Opentender di Indonesia (8 Oktober - 31 Desember 2020)³⁸⁵



Gambar diatas menunjukkan 91.82% penggunaan Opentender di Indonesia dengan konsentrasi di Jakarta namun tersebar hampir di seluruh pulau di Indonesia, sedangkan 8,12% lainnya merupakan pengunjung dari luar Indonesia.

Sementara itu, berdasarkan pencatatan perangkat lunak Webalizer yang dipasang pada server Opentender, jumlah kunjungan terlihat meningkat pada bulan Maret dan Juli tahun 2020 seperti grafik di bawah ini.

Grafik 3.58 Jumlah Pengunjung Opentender tahun 2020



Sumber: ICW, olahan penulis³⁸⁶

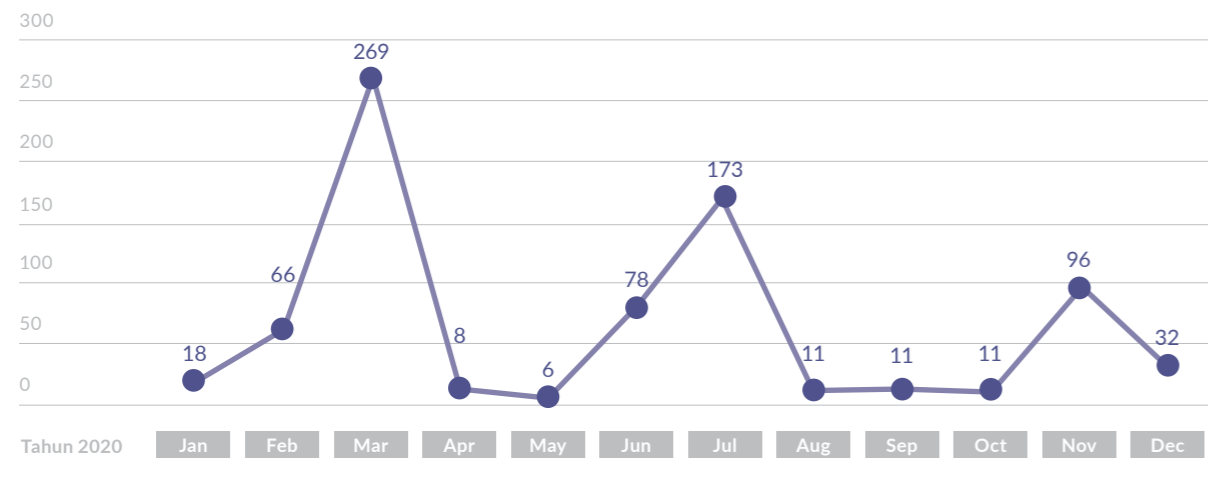
³⁸⁵ Ibid.

³⁸⁶ ICW. <https://v3.opentender.net/vstats/index.html> . menggunakan software webalizer. Diakses 1 Maret 2021.

Pada bulan Maret 2020, pemerintah Indonesia menetapkan Indonesia dengan status keadaan tertentu darurat bencana pandemi COVID-19³⁸⁷ yang segera diikuti dengan inisiasi program bantuan sosial serta refocusing anggaran. Sementara pada bulan Juli 2020, ICW merilis hasil pemantauan atas implementasi pengadaan barang/jasa terkait penanganan COVID-19³⁸⁸.

Pada dua bulan tersebut itu juga bahwa rata-rata jumlah halaman yang dikunjungi untuk menggali data di Opendender meningkat seperti yang tergambar di bawah ini.

Grafik 3.59 Rata - Rata Jumlah Laman per kunjungan tahun 2020



Sumber: ICW, olahan penulis³⁸⁹

³⁸⁷ BNPB. 17 Maret 2020. Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia <https://bnpb.go.id/berita/status-keadaan-tertentu-darurat-bencana-wabah-penyakit-akibat-virus-corona-di-indonesia> diakses 1 Maret 2021.

³⁸⁸ ICW. Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa Terkait COVID-19.

³⁸⁹ ICW. <https://v3.opendender.net/vstats/index.html> . menggunakan software webalizer. Diakses 1 Maret 2021.

Jangkauan Opendender

Opendender telah direkomendasikan akademisi³⁹⁰, jurnalis³⁹¹, OMS³⁹² dan APIP³⁹³, diantaranya pada 5 aktor berikut:

Tabel 3.28. Kelompok Jangkauan Opendender

OMS	Perkumpulan Ide dan Analitika Indonesia (IDEA) Yogyakarta ³⁹⁴ , Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (PUSPAHAM) Kendari ³⁹⁵ , Yayasan Suara Nurani Minaesa (YSNM) Manado ³⁹⁶ , Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Utara ³⁹⁷ , OMS di Kabupaten Blitar ³⁹⁸ , Bojonegoro Institute, eLSAL Indonesia, FITRA Jatim ³⁹⁹ .
Jurnalis	Jurnalis di Sulawesi Selatan ⁴⁰⁰ , Manado ⁴⁰¹ , Kalimantan Barat ⁴⁰² , Blitar ⁴⁰³ , Bojonegoro ⁴⁰⁴ , Sulawesi Tenggara ⁴⁰⁵ dan DKI Jakarta ⁴⁰⁶ .
Mahasiswa	Mahasiswa di Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan ⁴⁰⁷ , IAIN Manado, Universitas Sam Ratulangi ⁴⁰⁸ , dan mahasiswa di Sulawesi Selatan ⁴⁰⁸ .
Pemerintah	Bagian PBJ Pemerintah Kota Pontianak ⁴¹⁰ . Dinas Pendidikan Kota Makassar ⁴¹¹ , Badan Layanan Pengadaan Kabupaten Blitar, dan LPSE Kabupaten Blitar ⁴¹² , dan auditor di salah satu provinsi di Indonesia ⁴¹³ .
Legislatif	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar dan DPRD Kota Blitar ⁴¹⁴ .

³⁹⁰ Informan 1. Akademisi. Wawancara Daring. 28 Januari 2021..

³⁹¹ Kelompok FGD Jurnalis. FGD Daring. 21 Januari 2021.

³⁹² Kelompok FGD Organisasi Masyarakat Sipil. FGD Daring 21 Januari 2021.

³⁹³ Informan 2. APIP. Wawancara Daring. 29 Januari 2021.

³⁹⁴ Informan 17. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³⁹⁵ Informan 18. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³⁹⁶ Informan 14. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³⁹⁷ Ibid.

³⁹⁸ Informan 15. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

³⁹⁹ Informan 16. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

⁴⁰⁰ Informan 12. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

⁴⁰¹ Informan 14. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

⁴⁰² Informan 13. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

⁴⁰³ Informan 15. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

⁴⁰⁴ Informan 16. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

⁴⁰⁵ Informan 18. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

⁴⁰⁶ Informan 4. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

⁴⁰⁷ Informan 1. Akademisi. Wawancara Daring. 28 Januari 2021..

⁴⁰⁸ Informan 14. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

⁴⁰⁹ Informan 12. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

⁴¹⁰ Informan 13. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

⁴¹¹ Informan 12. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

⁴¹² Informan 15. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

⁴¹³ Informan 2. APIP. Wawancara Daring. 29 Januari 2021.

⁴¹⁴ Informan 15. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

Opentender juga telah disebarkan informasinya oleh pengguna dalam penelitian ini ke jaringan-jaringan masing-masing. Detil dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.29 Referral Opentender ke Pihak Ketiga

Akademisi⁴¹⁵	Mahasiswa pada Mata Kuliah Penganggaran Publik dan Mata Kuliah <i>ICT For Public Administration</i> pada tahun 2016, 2017. Juga Mata Kuliah <i>Governansi Digital</i> dan Mata Kuliah Etika Administrasi Publik pada tahun 2018.
Jurnalis	Opentender direkomendasikan pada rekan sesama jurnalis ⁴¹⁶ salah satunya anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta ⁴¹⁷ untuk crosscheck, juga memetakan pengadaan yang menggunakan anggaran besar sehingga pengawasannya harus lebih ketat ⁴¹⁸ .
APIP	Pada tahun 2018, ia menggunakan opentender sebagai materi dalam Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), kepada 70 orang dari 104 auditor yang ada ⁴¹⁹ .
OMS	<p>OMS telah merekomendasikan opentender pada peserta PUSJAGA (Pusat Belajar Anggaran yang diselenggarakan oleh OMS di Makassar)⁴²⁰. Jurnalis di AJI Manado⁴²¹, Suara Pemred, Pontianak Post, Tribun, media lokal lainnya di Provinsi Kalimantan Barat⁴²², jurnalis di Kabupaten Blitar⁴²³, jurnalis di Kabupaten Bojonegoro⁴²⁴, jurnalis di Provinsi Sulawesi Tenggara, diantaranya Tempo.com, Rakyat Sultra, dan Berita Kota⁴²⁵.</p> <p>OMS telah memperkenalkan opentender pada mahasiswa di IAIN Manado dan Universitas Sam Ratulangi⁴²⁶.</p> <p>Opentender direkomendasikan bagi internal IDEA Yogyakarta⁴²⁷, PUSPAHAM Sulawesi Tenggara⁴²⁸, dan YSNM Manado untuk mencari data realokasi anggaran pandemi Covid-19⁴²⁹. OMS memperkenalkan opentender pada OMS lainnya, diantaranya: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Utara⁴³⁰, OMS di Blitar⁴³¹, Bojonegoro Institute, eLSAL Indonesia, FITRA Jatim⁴³².</p> <p>Opentender juga diperkenalkan kepada Bagian PBJ Pemerintah Kota Pontianak⁴³³, Badan Layanan Pengadaan Kabupaten Blitar, LPSE Kabupaten Blitar⁴³⁴, DPRD Kabupaten Blitar, dan DPRD Kota Blitar⁴³⁵.</p>

⁴¹⁵ Informan 1. Akademisi. Wawancara Daring. 28 Januari 2021.

⁴¹⁶ Informan 10. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

⁴¹⁷ Informan 4. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

⁴¹⁸ Informan 8. Jurnalis. FGD Jurnalis Daring. 21 Januari 2021.

⁴¹⁹ Informan 2. APIP. Wawancara Daring. 29 Januari 2021.

⁴²⁰ Informan 12. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

⁴²¹ Informan 14. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

⁴²² Informan 13. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

⁴²³ Informan 15. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

⁴²⁴ Informan 16. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

⁴²⁵ Informan 18. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

⁴²⁶ Informan 14. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

⁴²⁷ Informan 17. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

⁴²⁸ Informan 18. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

⁴²⁹ Informan 14. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

⁴³⁰ Ibid.

⁴³¹ Informan 15. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

⁴³² Informan 16. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

⁴³³ Informan 13. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

⁴³⁴ Informan 15. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.

⁴³⁵ Ibid.

BAB

4.

Kesimpulan dan
Rekomendasi



4.1 Kesimpulan

Kompetisi dan Kesempatan Pasar

Tingkat konsentrasi pasar, di tingkat nasional dan daerah, menunjukkan tren yang sama. Secara nasional penurunan tingkat konsentrasi pasar dalam proses tender sebesar 30% dari tahun 2011 sampai 2019 (dari 1.414 ke 977), namun meningkat di tahun 2020 sebesar 159% (dari 977 ke 2.535). Temuan terkait tingkat konsentrasi pasar ini menunjukkan kesempatan pasar di Indonesia yang semakin membaik dari tahun 2011 ke 2019, namun kembali memburuk di tahun 2020. Penurunan tingkat konsentrasi pasar pada 2011 ke 2019 kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa kebijakan pemerintah di pengadaan, seperti, penggunaan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) pada 2010. Kebijakan tersebut mengharuskan pemerintah untuk menyusun rencana Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada 2011, dan mempublikasi RUP dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) pada 2012. SiRUP membuka akses informasi di mana perusahaan dapat menemukan peluang pengadaan publik yang akan datang atau yang direncanakan. Pada tahun 2020, tingkat konsentrasi pasar meningkat menjadi 2.535 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat disebabkan oleh situasi pandemi Covid-19. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS, pada 2020 8,76% perusahaan berhenti beroperasi dan 24,31% beroperasi dengan mengurangi kapasitas. Sedangkan temuan INKINDO menunjukkan 27% perusahaan jasa konsultasi tutup akibat dampak Covid-19.

Berkaitan dengan Top 10 penyedia selama 10 tahun (2011-2020), penelitian ini menemukan secara nasional masih didominasi oleh BUMN. Sebanyak 3 dari 10 perusahaan yang paling banyak mendapatkan pengadaan dari tahun 2011-2020 berasal dari BUMN yaitu PT Telekomunikasi Indonesia, PT Rajawali Nusindo, dan PT Indofarma Global Medika. Dalam periode waktu yang sama, 9 dari 10 tender dengan jumlah nilai kontrak paling banyak juga dimenangkan oleh BUMN, dan 1 BUMD di DKI Jakarta. Seluruh BUMN dan BUMD yang menjadi 10 penyedia tertinggi secara nasional merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi.

Penelitian mengerucutkan analisa atas jumlah kontrak yang diberikan kepada Top 10 penyedia di tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir (2016 - 2020) dan menemukan adanya indikasi peluang pasar yang lebih baik. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, persentase jumlah pengadaan di tingkat nasional yang diberikan kepada Top 10 berkurang 0,41% (dari 1,13% ke 0,72%). Jika dilihat lebih dalam, instansi di tingkat nasional (yakni Kementerian dan Lembaga) memiliki tren yang lebih tinggi antara 17-30% kontrak tender

yang diberikan kepada top 10 Penyedia sementara di tingkat subnasional (Kabupaten/Kota), hanya 13-15% kontrak tender yang dimenangkan oleh Top 10 Penyedia. Hal ini menunjukkan dominasi 10 perusahaan yang paling banyak memenangkan kontrak pemerintah secara jumlah lebih banyak ditemukan di pemerintah tingkat nasional.

Masih pada konteks kompetisi dan kesempatan pasar, pada 3 tahun pertama (2011-2013) terdapat tren peningkatan baik di tingkat nasional dan subnasional untuk Jumlah Penyedia Baru yang memenangkan tender (139% dari 9.136 ke 21.883). Setelah tahun 2013 hingga 2020, tren tersebut mengalami penurunan di mana penyedia baru yang memenangkan tender menurun 71,2% (dari 21.883 ke 6.305). Sedangkan dalam 10 tahun terakhir (2011-2020) terdapat tren penurunan di tingkat nasional dan subnasional untuk Persentase Penyedia Baru dengan Seluruh Penyedia sebesar 67,4% (dari 74,8% ke 7,36%) dan pertumbuhan penyedia baru sebesar 2,92% (dari 2,95% ke 0,03%). Peningkatan penyedia baru pada 2010 - 2013 merupakan efek dari penyesuaian pemerintah terhadap kebijakan pengadaan secara elektronik yang baru diterapkan. Sedangkan penurunan jumlah penyedia baru dalam kompetisi tender dapat disebabkan oleh munculnya metode pengadaan lain yang berkembang, seperti E-purchasing dan Tender Cepat uang mulai diperkenalkan pada 2015. Metode-metode baru tersebut membuka peluang terhadap penyedia untuk terlibat dalam pengadaan pemerintah namun tidak masuk dalam analisa penelitian ini. Sehingga dalam konteks tender tren yang muncul adalah tren menurun.

Efisiensi Internal

Sepanjang 2011 sampai 2020, persentase tender gagal secara nasional menurun dari 31% di 2011 menjadi 18% di 2017 kemudian meningkat sedikit sebesar 22% di 2020 (Grafik 3.25). Tren yang sama ditemukan di instansi tingkat pusat (Kementerian dan Lembaga) dan daerah (kota, kabupaten, provinsi). Namun dalam kurun waktu yang sama, Lembaga menjadi instansi dengan penurunan persentase tender gagal paling tinggi yaitu 20% (dari 35% ke 15%).

Berdasarkan per jenis instansinya, dari 2011 ke 2020 instansi di tingkat pusat (Kementerian dan Lembaga) memiliki tren penurunan persentase tender gagal. Disisi lain, untuk instansi di tingkat lokal (kota, kabupaten, dan provinsi) memiliki tren penurunan persentase tender gagal pada 2011 - 2017, namun sejak 2018 hingga 2020 sedikit meningkat. Penurunan persentase tender gagal menunjukkan perbaikan dalam efisiensi internal. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan kapasitas panitia pengadaan dalam

menyusun perencanaan yang terus diasah melalui serangkaian pelatihan yang diselenggarakan oleh LKPP. Sedangkan peningkatan persentase tender gagal pada 2020 merupakan dampak dari pandemi Covid-19 dimana pemerintah melakukan refocusing anggaran untuk memitigasi dampak pandemi, sehingga sebagian tender ada yang dihentikan hingga dibatalkan.

Dalam konteks durasi tender, terdapat peningkatan efisiensi dimana tender mengalami proses yang lebih cepat dari 50 hari (2011) ke 40 hari (2020). Perbaikan ini dapat terjadi salah satunya didukung oleh pembentukan unit khusus pengadaan (ULP atau sekarang UKPBJ) yang didedikasikan untuk mengelola pengadaan di masing - masing instansi. Kebijakan mengenai ULP/ UKPBJ sudah ada sejak 2010 namun membutuhkan proses sampai akhirnya instansi pemerintah membentuknya. Selain itu, rangkaian peningkatan kapasitas dan pembukaan kanal konsultasi bagi UKPBJ yang dipimpin oleh LKPP, serta proses sertifikasi dalam rangka mendorong kualitas sumber daya manusia di UKPBJ yang lebih baik, berkontribusi terhadap proses perbaikan ini. Namun, penelitian menemukan adanya perubahan cara penghitungan durasi tender, dimana pada 2011 dihitung berdasarkan hari kalender, kemudian berubah pada 2018 berdasarkan hari kerja. Penelitian ini tidak mengakomodir hari libur dan/atau hari raya nasional sehingga perubahan durasi tender yang dianalisa seluruhnya berdasarkan hari kalender.

Nilai Manfaat Uang

Dalam kurun waktu 10 tahun, terjadi penurunan rata - rata persentase nilai kontrak yang melebihi HPS baik secara nasional (grafik 3.33) maupun per jenis instansi (grafik 3.34). Secara nasional, pada 2011 nilai kontrak yang melebihi nilai HPS mencapai 194,87% yang turun secara signifikan pada 2020 mencapai 17,36%. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berkontribusi positif terhadap capaian ini, seperti Keputusan Presiden No 80/ 2003, dan Perpres 16/ 2018 yang tidak memperbolehkan penawaran diatas HPS.

Dilihat dari sisi rata - rata persentase nilai kontrak dibawah HPS, terdapat tren peningkatan dalam 5 tahun terakhir (2016-2020) secara nasional dari 6% menjadi 8% (grafik 3.37). Kementerian merupakan instansi yang menunjukkan rata - rata persentase penghematan lebih tinggi sepanjang 2011 - 2020, yaitu antara 10-12% jika dibandingkan dengan kabupaten, kota, provinsi, dan lembaga (grafik 3.38).

Integritas Publik

Berdasarkan dimensi integritas publik, terdapat perubahan signifikan dalam kurun waktu 2011-2020 terkait persentase jumlah tender dengan RUP, dan persentase jumlah tender tanpa jenis pengadaan, baik secara nasional maupun jika dilihat berdasarkan jenis instansi di tingkat nasional dan daerah. Secara nasional, hanya 0,25% tender yang memiliki RUP pada 2011, namun jumlah ini meningkat hingga 99,56% pada 2020 (grafik 3.41). Selain itu, tidak ada satu pun tender (0%) yang memiliki informasi jenis pengadaan pada tahun 2013. Pada 2020, 99,997% tender memiliki informasi jenis pengadaan (grafik 3.53). Perbaikan ini salah satunya didorong oleh kebijakan yang mewajibkan semua instansi pemerintah untuk mulai mempublikasi RUP mereka pada tahun 2011. Semua UKPBJ/ ULP harus mencantumkan detail kode jenis pengadaan dalam rencana umum pengadaan mereka. Selain itu pada 2013, Sistem Informasi Rencana Pengadaan (SiRUP) terintegrasi dengan SPSE dimana SPSE mengharuskan pemerintah menginput RUP sebelum proses tender dimulai. Jika tahap input tersebut tidak dilakukan, maka secara sistem proses tidak dapat dilanjutkan/diblokir. Dalam rencana umum pengadaan, terdapat informasi jenis pengadaan yang harus dimasukkan ke dalam sistem.

Dalam hal informasi mengenai judul dan deskripsi pengadaan, penelitian ini menemukan perbaikan yang tidak terlalu signifikan dari tahun 2011 ke tahun 2020. Secara nasional, jumlah tender yang memiliki judul kurang dari 20 karakter menurun dari 2,5% pada 2011 menjadi 1,16% pada 2013. Pada Tahun 2020, angka tersebut meningkat sedikit menjadi 1.91% tender memiliki judul kurang dari 20 karakter (grafik 3.45). Jika dilihat dari deskripsi tender, terdapat perbaikan secara nasional dalam kurun waktu 2013 - 2020 dari 73.5% menjadi 63.4% tender yang memiliki deskripsi kurang dari 60 karakter (grafik 3.49) . Artinya ada perbaikan dari segi transparansi karena informasi yang disampaikan sedikit lebih lengkap meskipun tidak signifikan.

Red Flag

Dalam kurun waktu 2011 - 2020, pengadaan dengan nilai kontrak terbesar didominasi oleh pekerjaan konstruksi dengan 6 dari 10 penyedia yang mendapatkan kontrak merupakan BUMN (tabel 3.18). Dari sisi lain, jika dilihat berdasarkan pengadaan di kuartal 4 secara nasional, tender pada tahun 2011-2020 , didominasi oleh pengadaan barang (58%) dan pekerjaan konstruksi (25% (tabel 3.19). Pengadaan barang mendominasi pengadaan di kuartal empat karena cenderung lebih mudah melakukan

pembelian barang dalam upaya penghabisan anggaran. Dari tahun 2011 ke 2020, terdapat peningkatan 279% terkait pengadaan di kuartal 4 secara nasional. Pada tahun 2011, terdapat 1.435 tender yang meningkat ke 3.755 pada 2020 dan masih juga didominasi oleh pengadaan barang dan pekerjaan konstruksi (tabel 3.19). Pandemi global COVID-19 merupakan kontributor terhadap peningkatan pengadaan di kuartal 4 pada 2020 di mana seluruh instansi pemerintah fokus pada penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan refocusing anggaran dan memperbolehkan setiap instansi untuk menghentikan maupun menunda pengadaan yang sedang berjalan atau telah direncanakan.

Pemanfaatan Opentender



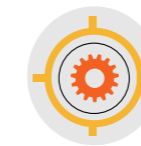
Akademisi menggunakan Opentender sebagai bahan ajar dan bahan penelitian. Sejak 2016-2018 terdapat setidaknya 480 orang mahasiswa/i yang terpapar informasi dan data Opentender, di mana setengahnya menghasilkan tugas/laporan berdasarkan data Opentender. Menurut tenaga pengajar, Opentender digunakan agar mahasiswa mendapat perspektif bagaimana masyarakat bisa melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik. Peneliti juga menggunakan data-data yang tersaji pada opentender sebagai referensi dalam penggalan data awal untuk keperluan riset.



Jurnalis menggunakan data dalam Opentender untuk menggali ide bahan liputan dan menjadikannya sebagai titik awal dalam liputan investigasi. Kelompok-kelompok jurnalis mengadakan berbagai kegiatan untuk mengembangkan jurnalisme data dengan memanfaatkan data Opentender, seperti pelatihan atau, fellowship. Opentender digunakan untuk mengidentifikasi pekerjaan tender yang memiliki potensi pelanggaran. Menurut para jurnalis, informasi dalam Opentender membantu untuk memangkas waktu yang dibutuhkan untuk menulis sekaligus mengubah kebiasaan menulis menjadi lebih berbasis data. Hasil tulisan yang diterbitkan pun lebih direspon oleh pejabat publik, walaupun tak selalu respon tersebut bersifat positif.



Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menggunakan data dalam Opentender sebagai bahan peningkatan kapasitas internal dan jaringan, bahan advokasi dalam proses pemantauan layanan publik serta bagian dari kolaborasi multipihak termasuk dengan jurnalis, pemerintah dan universitas. Data dan informasi di Opentender, khususnya mengenai pemenang pengadaan, dapat diinvestigasi lebih jauh dan membantu peran-peran masyarakat sipil dalam memantau proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Temuan dan rekomendasi yang disampaikan OMS kepada pemerintah pun banyak yang ditindaklanjuti, baik dengan memperbaiki proses, mengubah kebijakan, menjalin kerjasama pemantauan, maupun dengan mengambil tindakan hukum.



Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menggunakan data Opentender sebagai bahan referensi materi post audit dan probity audit reguler yang diadakan 4 kali dalam setahun untuk meningkatkan efektifitas dalam mengidentifikasi pekerjaan PBJ yang hendak diaudit. Informan menyebutkan bahwa 100% dari sampling data yang diambil berdasarkan nilai skor Opentender menghasilkan temuan yang dapat ditindaklanjuti dengan proses audit. Dalam hal efisiensi waktu, Sebelum menggunakan Opentender, dalam 20 hari APIP memperoleh 10 temuan administrasi, setelah menggunakan opentender membuat prosesnya lebih cepat, sehingga dalam 20 hari, dapat ditemukan 20-30 temuan administrasi. Selain itu, jika menggunakan data SPSE, proses pengambilan sampel dapat membutuhkan waktu beberapa hari, namun dengan opentender hanya memerlukan 15-30 menit. Namun, penelitian ini belum dapat mengidentifikasi APIP lain yang menjalankan pengawasan internal berbasis data opentender.

Opentender sebagai Platform Data dan Informasi

Menurut survey kepada empat kelompok pengguna hingga tahun 2020, fitur di Opentender yang paling sering dikunjungi oleh pengguna adalah Top 10 dan database red flag. Mayoritas kelompok pengguna Opentender adalah kelompok OMS, dan jurnalis. Sementara itu, terdapat sebagian kecil pengguna opentender yang dapat dipetakan lainnya yaitu kelompok akademisi dan APIP.

Berdasarkan data Google Analytics, pengunjung opentender mayoritas ada dalam kelompok usia 18-34 tahun dan 51% mengakses via desktop, sedangkan sisanya menggunakan handphone/tablet. Sementara menurut statistik server menggunakan software webalizer, selama tahun 2020 pengunjung platform paling banyak ada pada bulan Maret dan Juli. Bulan Maret adalah saat pemerintah mengumumkan status bencana nasional terkait pandemi COVID-19 dan bulan Juli adalah saat ICW merilis hasil penelitian terkait pengadaan barang/jasa merespon COVID-19.

Peta pengguna Opentender 2014-2020, ada pada wilayah subnasional di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, khususnya Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur. Sementara pada 3 bulan terakhir tahun 2020, peta pengguna opentender dapat ditemukan pada pulau-pulau besar di Indonesia, khususnya Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua.

4.2 Rekomendasi

4.2.1 Rekomendasi untuk Pemerintah

Rekomendasi Kebijakan



LKPP dan KemenkumHAM. LKPP dan KemenkumHAM perlu menerbitkan surat keputusan bersama atau peraturan bersama untuk memperkuat sistem pemantauan kinerja Penyedia dengan mengintegrasikan data kinerja Penyedia dengan data pemilik manfaat (beneficial owners) yang dapat diakses publik.



Kementerian Koperasi dan UKM. Untuk mencegah terjadinya konsentrasi pasar kepada perusahaan-perusahaan tertentu, pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM, perlu memberi perhatian khusus pada pemulihan ekonomi perusahaan terdampak COVID-19, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi sejalan dengan komitmen pembangunan ekonomi yang inklusif.



Kementerian BUMN. Dengan banyaknya jumlah kontrak pengadaan pemerintah yang dimenangkan oleh BUMN dan masuk ke dalam top 10 penyedia berturut-turut selama 10 tahun terakhir, Kementerian BUMN perlu mendorong kebijakan transparansi proses anggaran termasuk proses pengadaan BUMN di Indonesia sebagai badan publik.

Perbaikan Ketersediaan Data



LKPP. Selama 10 tahun terakhir, BUMN selalu menjadi penyedia yang masuk dalam Top 10 penyedia dengan nilai kontrak tertinggi di mana sebagian besar berkaitan dengan pekerjaan konstruksi. Untuk dapat menganalisa lebih lanjut keterlibatan perusahaan swasta dan/atau BUMN dalam pekerjaan konstruksi, LKPP perlu mengagregasi, mengelola dan membuka data peserta tender yang dikelola di tiap-tiap LPSE.



LKPP. Untuk dapat menganalisis nilai manfaat uang, efisiensi internal, dan integritas publik pengadaan pemerintah secara lebih utuh dan komprehensif, data terkait proses berkontrak dan implementasi pengadaan perlu diagregasi, diolah, dan dipublikasikan. Data tersebut meliputi informasi kontrak, tanggal mulai kontrak, nama penyedia berkontrak, perkembangan pelaksanaan pekerjaan kontrak, pembayaran, berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan, hingga tanggal dan bukti serah terima pekerjaan.



LKPP dan Kementerian Koperasi dan UKM. Pemerintah perlu mengalokasikan 40% nilai anggaran belanja barang/jasa Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi⁴³⁶. Namun implementasi dari alokasi afirmasi positif ini belum dapat diawasi oleh publik akibat tidak tersedianya data status usaha, seperti usaha mikro, kecil, dan koperasi, yang terlibat dalam pengadaan pemerintah.

Aksesibilitas Data



LKPP. Dari metode pengadaan Tender, tingkat penyedia baru yang terlibat dalam pengadaan pemerintah menurun. Sementara itu, analisis red flag hanya dapat dilakukan untuk pengadaan dengan metode tender. Agar analisis dapat dilakukan secara lebih komprehensif untuk seluruh pengadaan pemerintah, pemerintah perlu membuka semua informasi terkait metode pengadaan lain selain tender dan tender cepat seperti epurchasing, penunjukkan langsung, dan pengadaan langsung.



LKPP. Lebih jauh lagi, akses terhadap kinerja penyedia tidak dapat diawasi oleh publik karena penilaian kinerja hanya dibuka bagi penyedia yang terdaftar dalam sistem tersebut (SIKAP). Agar publik dapat mengetahui kinerja penyedia yang menerima anggaran negara, maka informasi kinerja penyedia perlu dibuka.

⁴³⁶ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 65 ayat 3. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-12-tahun-2021> diakses pada 26 Februari 2021.

Kualitas Data



LKPP. Data yang tersedia saat ini untuk data alokasi usaha kecil hanya tersedia pada tahap perencanaan. Oleh karena itu, untuk memastikan keberpihakan pemerintah terhadap usaha kecil dan mikro⁴³⁷, LKPP perlu mempublikasikan data status badan usaha terpilah, termasuk secara eksplisit status usaha mikro, kecil, atau koperasi, yang memenangkan pengadaan pemerintah.



LKPP. Untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap mengenai pengadaan konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah, perlu ada kode khusus (identifikasi) untuk menghubungkan antara pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi dalam satu pengadaan konstruksi yang sama.



LKPP. Berdasarkan kebijakan nasional, pemerintah wajib mengalokasikan 5% APBN dan 10% APBD untuk kesehatan⁴³⁸, 20% APBN/APBD untuk pendidikan⁴³⁹. Implementasi kebijakan tersebut tidak dapat dianalisa akibat tidak adanya klasifikasi sektor dalam dokumentasi data pengadaan. Untuk dapat dianalisa lebih jauh, pemerintah perlu menambahkan klasifikasi sektor dalam data pengadaan.



LKPP. Dari tabel 3.17 di subbab 3.5.4, dapat dilihat bahwa seluruh data pengadaan pemerintah hanya bisa diakses melalui situs web pemerintah yang belum terintegrasi. Seluruh data pengadaan tersebut juga tidak dapat diunduh sehingga membatasi keterlibatan publik dalam mengawasi pengadaan pemerintah dan melakukan kajian riset oleh kelompok peneliti dan akademisi di sektor pengadaan. Untuk dapat meningkatkan partisipasi publik yang lebih jauh dalam proses pengadaan pemerintah, maka data tersebut perlu diintegrasikan dan dibuka (dapat diunduh dalam format-format data terbuka) bagi publik.

⁴³⁷ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 65. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-12-tahun-2021> diakses pada 26 Februari 2021.

⁴³⁸ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 171 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009> diakses pada 26 Februari 2021

⁴³⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 49 ayat 1 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003> diakses pada 26 Februari 2021



LKPP. Data yang dipublikasikan masih berupa tampilan website dengan fungsi unduh di beberapa bagian dalam format proprietary (misalnya excel dan pdf). LKPP perlu mempublikasikan data dalam standar format terbuka agar dapat meningkatkan interoperabilitas antar sistem pemerintah dengan menggunakan data PBJ dan meningkatkan upaya pelaksanaan pembangunan dengan basis data yang terintegrasi, serta lebih membuka ruang partisipasi bagi agar mudah dipahami calon penyedia maupun masyarakat luas, pemerintah perlu mempublikasi data dalam format terbuka yang terstandarisasi. Salah satu contoh standar yang dapat dijadikan acuan misalnya dengan format Open Contracting Data Standard (OCDS).



Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Perlu meningkatkan kualitas data yang terstandarisasi agar pengawasan publik dapat lebih maksimal. Di antaranya adalah informasi mengenai judul dan deskripsi tender yang lebih informatif.

4.2.2 Rekomendasi untuk ICW

Pemanfaatan Data / Pelibatan Pengguna Data



Akademisi

ICW perlu melibatkan Perguruan Tinggi, khususnya yang memiliki kurikulum kelas seperti Program Merdeka Belajar yang dicanangkan Kemendikbud dan program lain yang relevan dengan antikorupsi⁴⁴⁰. Jurusan yang dapat diprioritaskan dalam pelibatan seperti jurusan: FISIP, Teknik Sipil, ekonomi, hukum, yang akan terkait dengan konstruksi⁴⁴¹ yang paling banyak terlibat PBJ. Mahasiswa juga dapat dilibatkan untuk menyusun esai berbasis data dan evidence agar tertarik menggunakan data opentender.



Jurnalis

ICW perlu melibatkan kelompok media termasuk tim manajemen media tersebut (seperti tim redaksi) agar lebih mendorong pemberitaan berbasis data. ICW juga dapat melibatkan asosiasi jurnalis untuk pemanfaatan opentender yang lebih luas.



OMS

ICW perlu melibatkan OMS melalui isu tematik agar mendorong kolaborasi antar OMS (misalnya: COVID, lingkungan, dan lainnya). Hal ini mendorong agar pemantauan tidak dilakukan hanya oleh 1 OMS yang fokus pada anggaran/ antikorupsi.



BPK/BPKP/ APIP

ICW perlu sosialisasi opentender ke APIP tingkat provinsi/ kabupaten/kota. Agar dapat menggaungkan manfaat opentender ke skala yang lebih besar, ICW juga dapat melibatkan Badan Pengawas Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

⁴⁴⁰ Informan 1. Akademisi. Wawancara Daring. 28 Januari 2021.

⁴⁴¹ Informan 15. OMS. FGD OMS Daring. 21 Januari 2021.



APH (Aparat Penegak Hukum) dan Lembaga Kuasi Negara

ICW dapat berkolaborasi dengan APH dan Lembaga Kuasi Negara untuk memastikan temuan, laporan, dan/atau aduan ditindaklanjuti oleh otoritas yang berwenang (seperti Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Pemberantas Korupsi).

Perbaiki Opentender sebagai Platform Data dan Informasi

Hasil penelitian ini memberi rekomendasi agar opentender dapat diperbaharui dengan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Opentender perlu mendeklarasikan bahwa informasi yang disajikan Opentender adalah informasi yang bersifat terbuka termasuk menyediakan API yang juga bersifat terbuka untuk umum. Informasi ini diperlukan agar peneliti dapat mempertanggungjawabkan secara hak intelektual bahwa proses crawling data untuk keperluan penelitian mereka dapat dilakukan.
2. Opentender perlu membuat satu laman khusus untuk klaster pengadaan yang masih dalam proses kompetisi tender agar dapat membantu APIP sebagai sistem early warning bagi Pokja yang melakukan evaluasi dokumen pengadaan .
3. Opentender juga perlu menyajikan data dan analisa di opentender secara realtime agar dapat digunakan untuk pelaksanaan probity audit oleh APIP.
4. Metode penilaian untuk indikator perlu diberi penjelasan agar pengguna dapat lebih paham metode yang digunakan untuk menghasilkan skor tertentu.
5. Pengumpulan data pengguna perlu mulai dilakukan agar di kemudian hari ICW dapat memperbaiki platform dan/atau memperbaharui data sesuai dengan kebutuhan pengguna aktif.
6. Opentender perlu menampilkan laporan investigasi yang telah berhasil di advokasi agar dapat menjadi acuan bagi masyarakat sipil lainnya yang ingin melakukan advokasi sejenis.

4.2.3 Penelitian Lebih Lanjut

Berikut ini adalah beberapa penelitian lebih lanjut yang dapat dilakukan untuk melengkapi hasil penelitian ini.

- Berkaitan dengan minimnya perusahaan swasta yang terlibat dalam tender pekerjaan konstruksi, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui bagaimana tingkat kompetisi pasar pada pekerjaan konstruksi. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas, pada tingkat ketertarikan berpartisipasi dan kemampuan perusahaan konstruksi swasta.
- Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menelaah penyebab tender gagal terjadi agar dapat lebih tepat dan lebih utuh menganalisa pengadaan pemerintah.
- Dari seluruh K/L/PD, pemerintah provinsi memiliki durasi tender yang hampir dua kali lipat lebih lama dibandingkan dengan instansi pemerintah lainnya pada tahun 2020. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mencari tahu alasan durasi tender di tingkat Provinsi hampir dua kali lipat lebih lama.
- Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk dapat melihat potensi kecurangan dalam metode pengadaan selain tender dan tender cepat (seperti di epurchasing, penunjukkan langsung, dan pengadaan langsung).
- Berdasarkan temuan pengadaan di kuartal keempat, yang 25% terkait dengan pekerjaan konstruksi, maka perlu dianalisis lebih lanjut jenis dan bentuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan pemerintah.
- Tingginya angka penghematan tidak dapat diartikan bahwa pengadaanya semakin efisien, sebab nilai kontrak yang terlalu jauh dibawah nilai HPS juga dapat menandakan adanya permasalahan perencanaan hingga potensi penyimpangan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan standar penghematan yang tidak berpotensi pada penyimpangan serta menelaah lebih jauh kebijakan penganggaran dan belanja di Indonesia.

Lampiran dan Daftar Pustaka

Daftar Pertanyaan

Daftar Pertanyaan Narasumber

Aktor	Pertanyaan	Catatan
Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapan terakhir Anda menggunakan opentender? 2. Data opentender dipergunakan untuk apa? 3. Apakah Anda merekomendasikan Opentender kepada pihak lain? Sebutkan. 4. Apa keuntungan menggunakan opentender? (kejar kualitatif dan kuantitatif) (mis: berapa lama waktu yang dihemat dalam kerja / berapa banyak uang negara yang dihemat) 5. Apakah ada keuntungan lain dari opentender? (mis. jaringan) 	Jawaban dari "siapa" mungkin bisa dijadikan pertanyaan lanjutan
Akademisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapan terakhir Anda menggunakan opentender? 2. Data opentender dipergunakan untuk apa? 3. Apakah Anda merekomendasikan Opentender kepada pihak lain? Sebutkan. 4. Apa keuntungan menggunakan opentender? (kejar kualitatif dan kuantitatif) (mis: berapa lama waktu yang dihemat dalam kerja) 5. Apakah ada keuntungan lain dari opentender? (mis. jaringan) 6. Apakah Anda menggunakan data opentender untuk keperluan riset? 7. Apakah data PBJ ini membuka peluang penelitian yang sebelumnya tidak ada? 8. Mengapa Anda mau melakukan penelitian terkait PBJ? <ol style="list-style-type: none"> a. Berapa lama waktu yang dihemat dengan adanya data di opentender ini jika dibandingkan dengan tidak ada opentender? 9. Berapa banyak riset yang menggunakan opentender (dibanding tahun sebelumnya)?* 	* Hanya bisa dilakukan untuk penelitian lanjutan

Daftar Pertanyaan Narasumber

Aktor	Pertanyaan	Catatan
Akademisi	<ol style="list-style-type: none"> 10. Mengapa Anda mau menggunakan/memberikan rekomendasi penggunaan Opentender ke pihak lain selain Anda sendiri? (mis. mahasiswa) 11. Berapa banyak mahasiswa anda yang pernah mengerjakan tugas menggunakan opentender (dan berapa banyak tugas) 12. Apakah anda tahu mahasiswa/pihak yang anda beri rekomendasi opentender, masih menggunakan data PBJ setelah penugasan dari Anda? 13. Apakah Anda memiliki rekomendasi berdasarkan hasil riset (atau tugas mahasiswa anda) untuk perbaikan data PBJ pada umumnya, dan/atau data opentender? 14. Apa yang paling utama/sering digunakan dari data Opentender untuk Anda 15. Apa yang paling utama/sering digunakan dari data opentender oleh Mahasiswa Anda? (jika dia tahu) 16. Apa yang paling tidak pernah digunakan dari data opentender untuk Anda/Mahasiswa Anda? 17. Apakah Anda tahu ada dosen / jurusan / kampus lain yang menggunakan data opentender? 18. Apakah Anda tahu jika ada dosen/jurusan/ kampus lain yang kira-kira akan menganggap data opentender ini berguna untuk mereka? 19. Apakah ada rekomendasi untuk pengembangan opentender? 	
Jurnalis (Pernah menerima peningkatan kapasitas pemantauan barang dan jasa yang diselenggarakan Indonesia Corruption Watch)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapan terakhir Anda menggunakan opentender? 2. Data opentender dipergunakan untuk apa? 3. Apakah Anda merekomendasikan Opentender kepada pihak lain? Sebutkan. 4. Apa keuntungan menggunakan opentender? (kejar kualitatif dan kuantitatif) (mis: berapa lama waktu yang dihemat dalam penulisan artikel terkait PBJ / dari tidak menjadi pernah / sering menulis artikel PBJ/investigasi atau dari pernah menjadi lebih sering menulis artikel terkait PBJ/investigasi berdasarkan data dari opentender.net di salah satu tahap penulisan) 	

Daftar Pertanyaan Narasumber

Aktor	Pertanyaan	Catatan
Jurnalis (Pernah menerima peningkatan kapasitas pemantauan barang dan jasa yang diselenggarakan Indonesia Corruption Watch)	5. Apakah ada keuntungan lain dari opentender? (mis. jaringan)	
	6. Bagaimana model kolaborasi pasca capacity building joint-investigation bersama OMS?	
	a. Bagaimana kolaborasi tersebut membantu kerja Anda sebagai jurnalis?	
	7. Apakah di (wilayah dan) media Anda cukup sering memberitakan terkait PBJ pemerintah sebelum mengikuti pelatihan opentender dari icw?	
	a. Jika ada, kira-kira berapa banyak?	
	i. Satu bulan sekali	
	ii. 3-6 bulan sekali	
	iii. 1 tahun sekali	
	iv. Lainnya	
	8. Apakah media Anda menjadi lebih sering memberitakan kasus-kasus terkait PBJ dengan merujuk pada data opentender?	
	9. Apakah Anda sendiri, sebagai jurnalis, menulis lebih banyak artikel terkait PBJ?	
	a. (Jika ya, berapa banyak dibandingkan sebelum tahun)	
	b. Ke media apa saja?	
	c. Apakah anda memiliki pengalaman hasil investigasi Anda tidak dapat tayang? Jika ya, mengapa dan Apa strategi Anda? (mis. tidak lolos tayang di media host)	
10. Apakah Anda tahu jika kasus yang anda beritakan ditindaklanjuti oleh pihak lain?		
a. Jika ya, Sebutkan (mis. Pemerintah itu sendiri, APH termasuk KPK, BPK, Kepolisian, BPKP, Kejaksaan, Dinas terkait, kepala daerah)		
i. Seperti apa tindak lanjutnya?		
11. (fitur/data) Apa yang paling utama/sering digunakan dari data Opentender untuk Anda		
12. (fitur/data) Apa yang paling tidak pernah digunakan dari data opentender untuk Anda?		
13. Apakah Anda tahu ada jurnalis/media lain yang menggunakan data opentender?		
14. Apakah Anda tahu jika ada jurnalis/media lain yang kira-kira akan menganggap data opentender ini berguna untuk mereka?		

Daftar Pertanyaan Narasumber

Aktor	Pertanyaan	Catatan
OMS	1. Kapan terakhir Anda menggunakan opentender?	
	2. Data opentender dipergunakan untuk apa?	
	3. Apakah Anda merekomendasikan Opentender kepada pihak lain? Sebutkan.	
	4. Apa keuntungan menggunakan opentender? (kejar kualitatif dan kuantitatif) (mis: berapa lama waktu yang dihemat dalam kerja / berapa banyak uang negara yang dihemat)	
	5. Apakah ada keuntungan lain dari opentender? (mis. jaringan)	
	6. Apakah Anda tahu jika data opentender yang anda gunakan ditindaklanjuti oleh pihak lain?	
	a. Jika ya, Sebutkan (mis. Pemerintah itu sendiri, APH termasuk KPK, BPK, Kepolisian, BPKP, Kejaksaan, Dinas terkait, kepala daerah)	
	i. Seperti apa tindak lanjutnya?	
	ii. Apakah ada perubahan sistemik terhadap tindak lanjut tersebut di wilayah Anda? misal, perubahan APBD, kebijakan pengadaan (dihentikan/ diubah skemanya), perubahan datanya (ditutup jadi terbuka)	
	7. Apakah ada advokasi yang sedang berjalan atau baru selesai yang menggunakan data opentender sebagai basis/referensinya?	
8. Apakah ada kolaborasi Anda bersama pihak lain dalam menggunakan data pengadaan / follow up data pengadaan di luar OMS / di luar organisasi Anda? (ie. DPRD, Media, akademisi/mahasiswa, dll)		
a. Jika ya, seperti apa bentuknya. Jelaskan.		
9. Apakah ada penambahan intensitas analisa menggunakan data opentender?		
a. Jika ya, berapa nambahnya?		
10. Apakah ada perubahan kepedulian kelompok masyarakat (mis. mahasiswa, kelompok tani, buruh, dll) setelah anda menyajikan analisis menggunakan data opentender?		
a. Jika ya, bentuk perubahannya apa? Siapa kelompoknya?		

Daftar Pertanyaan Narasumber

Aktor	Pertanyaan	Catatan
OMS	<ol style="list-style-type: none"> 11. Apakah data opentender membantu teman-teman dalam kerja-kerja advokasi? <ol style="list-style-type: none"> a. Seperti apa? Apakah lebih cepat kerjanya? berapa hari? Apakah lebih banyak kasus yang bisa di-cover dalam 1 tahun? Berapa? 12. Adakah kegunaan tidak terduga (menyimpang), yang anda ketahui, dalam penggunaan opentender.net? misal, karena ada data Opentender, pebisnis/pemerintah jadi lebih lihai dalam menghindari audit 13. (fitur/data) Apa yang paling utama/sering digunakan dari data Opentender untuk Anda? 14. (fitur/data) Apa yang paling utama/sering digunakan dari data Opentender untuk Anda? 15. Apakah Anda tahu ada pihak (termasuk kelompok warga) lain yang menggunakan data opentender di wilayah anda? 16. Apakah Anda tahu jika ada pihak lain yang kira-kira akan menganggap data opentender ini berguna untuk mereka? 17. Apakah anda pernah bekerjasama dengan institusi lain/pengawas eksternal (mis. ombudsman/kpk/inspektorat) dalam menggunakan/memanfaatkan data opentender? 18. Rekomendasi untuk opentender? 	
Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapan terakhir Anda menggunakan opentender? 2. Seberapa sering anda mengakses data di opentender dalam setahun? 3. Data opentender dipergunakan untuk apa? 4. Apakah Anda merekomendasikan Opentender kepada pihak lain? Sebutkan. 5. Apa keuntungan menggunakan opentender dalam pekerjaan audit yang ada lakukan? (kejar kualitatif dan kuantitatif) (mis: berapa lama waktu yang dihemat dalam kerja/jumlah kasus yang dianalisa tiap tahun) <ol style="list-style-type: none"> a. Berapa banyak kasus baru (dibanding sebelumnya) berkat adanya bantuan data dari opentender? 	

Daftar Pertanyaan Narasumber

Aktor	Pertanyaan	Catatan
Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> b. Berapa banyak rekomendasi yang disusun berdasarkan data/informasi yang diambil di opentender dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait? c. Apakah waktu investigasi menjadi lebih singkat sejak ada data opentender? 6. Berapa potensi kasus korupsi yang berhasil Anda hentikan berdasarkan data dari opentender? <ol style="list-style-type: none"> a. Berapa besar angka proyek tersebut? di tahun berapa? 7. Apakah ada keuntungan lain dari opentender? (mis. jaringan) 8. Apakah jumlah SDM tercukupi dalam kerja-kerja audit? <p>Jika kurang, berdasarkan pengalaman Anda, apakah persoalan kekurangan SDM tersebut menjadi lebih terbantu dengan keberadaan opentender.net? Jelaskan.</p> 9. Adakah kegunaan tidak terduga (menyimpang) dalam penggunaan opentender.net? 10. Apa yang paling utama/sering digunakan dari data Opentender untuk Anda 11. Apa yang paling tidak pernah digunakan dari data opentender untuk Anda? 12. Apakah Anda tahu ada dinas/institusi lain yang menggunakan data opentender? 13. Apakah Anda tahu jika ada dinas/institusi lain yang kira-kira akan menganggap data opentender ini berguna untuk mereka? 14. Apakah anda pernah bekerjasama dengan institusi lain/pengawas eksternal (mis. ombudsman) dalam menggunakan data opentender? 	

Referensi

Kebijakan

Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Keputusan Presiden No 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 mengenai pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang e-Tendering

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah No 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering.

Kebijakan

Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

Keputusan Kepala BPKP RI Nomor: KEP-504/K/SU/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan BPKP.

Publikasi Lembaga

ICW. 2011. Tren Penindakan Kasus Korupsi 2011.

ICW. 2016. Trends of Corruption Prosecution 2016.

ICW. 2017. Trends of Corruption Prosecution 2017.

ICW. 2018. Trends of Corruption Prosecution 2018.

ICW. 2019. Trends of Corruption Prosecution 2019.

ICW. 2019. [Monitoring Governments Procurement Project with Open Tender.](#)

ICW. 2020. [Investigating Procurement Allegations Fraud using Open Tender](#)

ICW. [Opentender.net](#)

ICW. 2017. Gelap Bantuan Traktor Tangan.

ICW. Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa Terkait COVID-19.

ICW. [Implementing Open Contracting in Indonesia.](#)

Artikel Online

Open Contracting Partnership. The Contracting Process.

Open Contracting Partnership. Redflags to OCDS Mapping.

Open Contracting Partnership. Use case guide: Indicators linked to OCDS.

Open Contracting Partnership. Indicator to Diagnose the Performance of a Procurement Market.

LKPP. Kajian Akademis Unit Layanan Pengadaan.

Open Contracting Partnership. Use case guide: Indicators linked to OCDS.

Investopedia. Herfindahl-Hirschman Index.

BPS. Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha.

INKINDO. Survei Dampak Covid-19 Terhadap Konsultan.

BPKP. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

China Road & Bridge Corporation

Skripsi

Natasja Calista. 2019. Analisa Aksiomatis antara Transparansi terhadap Korupsi melalui Opentender oleh *Indonesia Corruption Watch*. Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Dayva Constantia Viola. 2020. Analisis Pelanggaran Terhadap Mekanisme Daftar Hitam Oleh Pengada Barang dan Jasa Pemerintah di Kota Bandung. Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Situs

Sistem Rencana Umum Pengadaan LKPP

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP

Portal Pengadaan Nasional

Sistem Informasi Kinerja Penyedia

LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

BNPB. 17 Maret 2020. Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia

Berita Online

Detik.com. Nindya Karya BUMN Pertama yang Jadi Tersangka Korupsi.

Kompas.com. Kasus Dermaga Sabang, KPK Periksa Direksi PT Nindya Karya.

Kompas.com. KPK Sita Uang Rp 12 Miliar dalam Kasus Proyek Fiktif Waskita Karya.

JawaPos.com. Kasus Korupsi PT Adhi Karya. KPK Sita Proyek Waterfront City.

Detik.com. Eks Dirkeu PT Brantas Abipraya Ditetapkan Lagi Jadi Tersangka Korupsi.

Kompas.com. Jokowi Minta Seluruh Pemda serta Kementerian dan Lembaga Pangkas Belanja Tak Penting

BBC.com. Pelantikan Anies-Sandi, kehadiran Prabowo, dan absennya Djarot.

CNBC.com. Adhi Wika Garap Jalan Tol Serang Panim.

Kompas.com. Basuki Bakal Tendang Kontraktor Tol Manado-Bitung Asal China.

Madanoterkini.com. Subkon Proyek Tol Keluhkan Sikap PT Sino Road and Bridge Group.Co.Ltd dan PT *Hutama Karya*.

HARIAN KOMPAS. Relokasi PKL MALIOBORO: Bau Tak Sedap Lelang Cepat di Sebelah Istana (1).

HARIAN KOMPAS. Kisut Temuan BPK dan Dugaan Monopoli Proyek (2).

HARIAN KOMPAS. Dalam Jerat Sengketa Lahan Eks Bioskop Tua Yogyakarta (3).

GATRA.COM. Sentra PKL Malioboro: Proyek Berisiko Di Lahan Sengketa.

GATRA.COM. Sentra PKL Malioboro: Dibayangi Monopoli, Ditutupi ke Publik.

GATRA.COM. Sentra PKL Malioboro: Tender Cepat Rp 44 M Salah Tempat.

GATRA.COM. Sentra PKL Malioboro: Bikin Negara Rugi Dua Kali.

GATRA.COM. Di Balik Proyek Sentra PKL Malioboro Rp 62 Miliar.

HarianJogja.com. EKS BIOSKOP INDRA: Catatan Merah Lelang Proyek Pusat PKL Malioboro.

HarianJogja.com. EKS BIOSKOP INDRA: Aroma Monopoli dalam Proyek Relokasi PKL.

HarianJogja.com. EKS BIOSKOP INDRA: Dokumen Lelang Ditutup Rapat.

Harian Jogja.com. EKS BIOSKOP INDRA: Rawan Rasuah di Lahan Sengketa.

SuaraBanyuurip.com. Dugaan Persekongkolan di Proyek Wahana Wisata Dander Park.



Indonesia Corruption Watch

Jalan Kalibata Timur IV No.6, RT.10/RW.8,
Kalibata, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740

Tel.: +6221.7901885 /+6221.7994015

Fax.: +6221.7994005

IG: @sahabaticw

Twitter: @antikorupsi

Youtube: Sahabat ICW

www.antikorupsi.org

